



**Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara**

LPPD **Tahun 2023**

**Laporan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah ini .

Tenggarong, 28 Maret 2024

Inspektur,



H. Heriansyah, SE. M.Si. CGCAE., CPSp.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19790801 200112 1 001

KATA PENGANTAR



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karuniaya kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disampaikan garis besar pelaksanaan, realisasi dan capaian tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan

mengusung tema ***“Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar, Konektifitas dan Pengembangan SDM”***.

Substansi materi laporan ini menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat indikator kinerja makro, indikator kinerja kunci urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021, selain itu laporan ini juga memuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Perangkat Daerah terutama Perangkat Daerah pengampu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan *stakeholder* terkait yang telah memberikan dukungan, pemikiran, saran serta kritik sebagai upaya mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

Disadari sepenuhnya akan segala keterbatasan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan tugas berkesinambungan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, saran masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 kami sampaikan, semoga dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bupati Kutai Kartanegara

Drs. Edi Damansyah, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	13
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	26
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	29
2.1. Capaian Kinerja Makro	29
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia	29
2.1.2. Angka Kemiskinan	31
2.1.3. Angka Penangguran	32
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi	33
2.1.5. Pendapatan Perkapita	35
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan	36
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	36
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	36
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	70
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang	88
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	91
2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023	92
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	93
2.3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	210
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	219
3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	219
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	220
4.1. Urusan Pendidikan	220
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	220

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	220
4.1.3. Realisasi	224
4.1.4. Alokasi Anggaran.....	229
4.1.5. Dukungan Personil	232
4.1.6. Permasalahan dan Solusi.....	234
4.2. Urusan Kesehatan	234
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	234
4.2.2. Target Pencapaian SPM.....	235
4.2.3. Realisasi	245
4.2.4. Alokasi Anggaran.....	262
4.2.5. Dukungan Personil	263
4.2.6. Permasalahan dan Solusi.....	264
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	272
4.3.1. Jenis Pelayanan	272
4.3.2. Target Pencapaian	272
4.3.3. Realisasi	275
4.3.4. Alokasi Anggaran.....	279
4.3.5. Dukungan Personil	280
4.3.6. Permasalahan dan Solusi.....	281
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	281
4.4.1. Jenis Pelayanan	281
4.4.2. Target Pencapaian	282
4.4.3. Realisasi	283
4.4.4. Alokasi Anggaran.....	287
4.4.5. Dukungan Personil	288
4.4.6. Permasalahan dan Solusi.....	289
4.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	289
4.5.1. Jenis Pelayanan	289
4.5.2. Target Pencapaian	290
4.5.3. Realisasi	296
4.5.4. Alokasi Anggaran.....	305
4.5.5. Dukungan Personil	308
4.5.6. Permasalahan dan Solusi.....	310
4.6. Urusan Sosial	315
4.6.1. Jenis Pelayanan	315
4.6.2. Target Pencapaian	316
4.6.3. Realisasi	321
4.6.4. Alokasi Anggaran.....	328
4.6.5. Dukungan Personil	329
4.6.6. Permasalahan dan Solusi.....	331
BAB V PENUTUP.....	334

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca UU IKN.....	3
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	5
Tabel 3. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa	6
Tabel 4. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	6
Tabel 5. Jumlah P3K Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	10
Tabel 6. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023	11
Tabel 7. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023	12
Tabel 8. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023	13
Tabel 9. Keterkaitan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara	16
Tabel 10. Program Pembangunan Tahun 2023	18
Tabel 11. Prioritas Pembangunan Tahun 2023	25
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Makro	29
Tabel 13. Indikator Pembentuk IPM Tahun 2019-2023	30
Tabel 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	33
Tabel 15. PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 2021-2023	34
Tabel 16. Angka Ketimpangan Pendapatan Tahun 2023	36
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran	37
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil	70
Tabel 19. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	92
Tabel 20. Skala Ordinal Pengukuran Sasaran	95
Tabel 21. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	95
Tabel 22. Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	97
Tabel 23. Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	98
Tabel 24. Rekapitulasi Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	99
Tabel 25. Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2023	100

Tabel 26. Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	101
Tabel 27. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target RPJMD.....	101
Tabel 28. Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2023	101
Tabel 29. Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2023	104
Tabel 30. Hasil Survey Penilaian Integritas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.....	108
Tabel 31. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD.....	108
Tabel 32. Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2023	108
Tabel 33. Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2023	114
Tabel 34. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	116
Tabel 35. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.....	119
Tabel 36. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.....	119
Tabel 37. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	120
Tabel 38. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	120
Tabel 39. Hasil IKM Per Unsur Pelayanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	121
Tabel 40. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Target RPJMD.....	121
Tabel 41. Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2023	122
Tabel 42. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Target RPJMD.....	142
Tabel 43. Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2023	143
Tabel 44. Realisasi Program Beasiswa Tahun 2023	145
Tabel 45. Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2023	145
Tabel 46. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Target RPJMD.....	147
Tabel 47. Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2023	148
Tabel 48. Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2023	149
Tabel 49. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Target RPJMD.....	151

Tabel 50. Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2023.....	151
Tabel 51. Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2023.....	152
Tabel 52. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.....	159
Tabel 53. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Target RPJMD.....	159
Tabel 54. Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2023.....	160
Tabel 55. Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2023.....	161
Tabel 56. Jumlah dan Perubahan Pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2023.....	163
Tabel 57. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Target RPJMD.....	167
Tabel 58. Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2023.....	167
Tabel 59. Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2023.....	169
Tabel 60. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 Terhadap Target RPJMD.....	170
Tabel 61. Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2023.....	170
Tabel 62. Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2023.....	172
Tabel 63. Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2023	174
Tabel 64. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Target RPJMD.....	175
Tabel 65. Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2023.....	175
Tabel 66. Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2023.....	177
Tabel 67. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 Terhadap Target RPJMD.....	178
Tabel 68. Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2023.....	178
Tabel 69. Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2023.....	179
Tabel 70. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 Terhadap Target RPJMD.....	180
Tabel 71. Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2023.....	181
Tabel 72. Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2023.....	182
Tabel 73. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara.....	184
Tabel 74. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran terkait penyediaan air bersih Tahun 2023	186

Tabel 75. Daftar Proyek Strategis Tahun 2023	186
Tabel 76. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran terkait rumah layak huni Tahun 202	191
Tabel 77. Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RTLH) Tahun 2023.....	193
Tabel 78. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 Terhadap Target RPJMD.....	194
Tabel 79. Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2023.....	194
Tabel 80. Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2023.....	195
Tabel 81. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 Terhadap Target RPJMD.....	199
Tabel 82. Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2023.....	199
Tabel 83. Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2023.....	200
Tabel 84. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 Terhadap Target RPJMD.....	203
Tabel 85. Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2023.....	203
Tabel 86. Sungai yang nilai parameter <i>Fecal Coli</i> di atas Baku Mutu	205
Tabel 87. Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2023.....	205
Tabel 88. Indeks Resiko Bencana Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2022	207
Tabel 89. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 Terhadap Target RPJMD.....	207
Tabel 90. Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2023.....	208
Tabel 91. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022.....	209
Tabel 92. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023	211
Tabel 93. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa.....	213
Tabel 94. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	213
Tabel 95. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dibanding dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	216
Tabel 96. Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	221
Tabel 97. Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	224
Tabel 98. Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini.....	225
Tabel 99. Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini	225

Tabel 100. Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Dasar	226
Tabel 101. Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Dasar	226
Tabel 102. Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan ..	228
Tabel 103. Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan.....	228
Tabel 104. Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	229
Tabel 105. Jumlah Personil Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	233
Tabel 106. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	235
Tabel 107. Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan.....	245
Tabel 108. Capaian Penerima Layanan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.....	246
Tabel 109. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	247
Tabel 110. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	248
Tabel 111. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	248
Tabel 112. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ..	249
Tabel 113. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.....	249
Tabel 114. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Balita	250
Tabel 115. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Balita	250
Tabel 116. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	251
Tabel 117. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	252
Tabel 118. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.....	253
Tabel 119. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif...	253
Tabel 120. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	254
Tabel 121. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	255
Tabel 122. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi.....	256
Tabel 123. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi.....	256
Tabel 124. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus	257
Tabel 125. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus	257

Tabel 126. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.....	258
Tabel 127. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	258
Tabel 128. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis	259
Tabel 129. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis	260
Tabel 130. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV).....	261
Tabel 131. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV).....	261
Tabel 132. Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	262
Tabel 133. Jumlah Personil Pendukung Pencapaian SPM Urusan Kesehatan.....	264
Tabel 134. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	272
Tabel 135. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	275
Tabel 136. Capaian Penerima Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	276
Tabel 137. Capaian Mutu Layanan Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.....	276
Tabel 138. Capaian Penerima Pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	277
Tabel 139. Capaian Mutu Layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	277
Tabel 140. Alokasi Anggaran Penunjang Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	279
Tabel 141. Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	280
Tabel 142. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	282
Tabel 143. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	283
Tabel 144. Capaian Penerima Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.....	284
Tabel 145. Capaian Mutu Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	285

Tabel 146. Capaian Penerima Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	286
Tabel 147. Capaian Mutu Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	287
Tabel 148. Alokasi Penunjang Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	287
Tabel 149. Dukungan Personil Penunjang Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	288
Tabel 150. Target Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	291
Tabel 151. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	296
Tabel 152. Capaian Penerima Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	297
Tabel 153. Capaian Mutu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	298
Tabel 154. Capaian Penerima Pelayanan Informasi Rawan Bencana...	299
Tabel 155. Capaian Mutu Layanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.....	300
Tabel 156. Capaian Penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.....	301
Tabel 157. Capaian Mutu Penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.....	301
Tabel 158. Capaian Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	302
Tabel 159. Capaian Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	302
Tabel 160. Capaian Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	303
Tabel 161. Capaian Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	303
Tabel 162. Alokasi Anggaran Penunjang Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	305
Tabel 163. Personil Pendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum.....	309
Tabel 164. Personil Pendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah	309
Tabel 165. Jumlah Petugas Operasional telah Mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran dan Bencana	309

Tabel 166. Dukungan Personil Penunjang SPM Sub Urusan Kebakaran	310
Tabel 167. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial	316
Tabel 168. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial	321
Tabel 169. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	322
Tabel 170. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	323
Tabel 171. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	324
Tabel 172. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial.....	324
Tabel 173. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial.....	325
Tabel 174. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	326
Tabel 175. Capaian Penerima Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah	327
Tabel 176. Capaian Mutu Layanan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah	327
Tabel 177. Alokasi Anggaran Penunjang Urusan Sosial	328
Tabel 178. Dukungan Personil Penunjang SPM Urusan Sosial	330

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara	2
Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca UU IKN.....	4
Gambar 3. Jumlah Perangkat Daerah, Jumlah Layanan dan Total Responden SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.....	105
Gambar 4. Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.....	106
Gambar 5. Tabulasi Hasil SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.....	106
Gambar 6. Perangkat Daerah, Jumlah Layanan dan Total Responden SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	115
Gambar 7. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.....	115

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pertumbuhan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2023.....	31
Grafik 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2023	35
Grafik 3. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2023	35
Grafik 4. Predikat SAKIP	100
Grafik 6. IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023	107
Grafik 7. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten/ Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	107
Grafik 8. Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023.....	113
Grafik 9. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2023	125
Grafik 10. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2020 - 2023	126
Grafik 11. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2023.....	128
Grafik 12. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2023	129
Grafik 13. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2023.....	129
Grafik 14. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2023	130
Grafik 15. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, 2021	131
Grafik 16. Indeks Dimensi IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.....	141
Grafik 17. Pebandingan IPK Kabupaten Kutai Kartanegara dengan IPK Kalimantan Timur	142
Grafik 18. Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2023.....	146
Grafik 19. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2023	147
Grafik 20. Indeks Pembangunan Gender Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2022	150

Grafik 21. Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2023	153
Grafik 22. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023	155
Grafik 23. Perkembangan TPT Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kaltim, 2005-2023	164
Grafik 24. Perkembangan TPT Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim, 2021-2023.....	165
Grafik 25. PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2023	166
Grafik 26. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2023	169
Grafik 27. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2022	173
Grafik 28. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	177
Grafik 29. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022.....	180
Grafik 30. Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat	196
Grafik 31. Perbandingan Kondisi Jalan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2020-2023	198
Grafik 32. Panjang Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2023.....	198
Grafik 33. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 - 2023	202

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya bernama Kabupaten Kutai, dibentuk dan ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II Kutai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah serta potensi ekonomi guna menjamin perkembangan dan kemajuan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Kutai sebagian dimekarkan menjadi daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

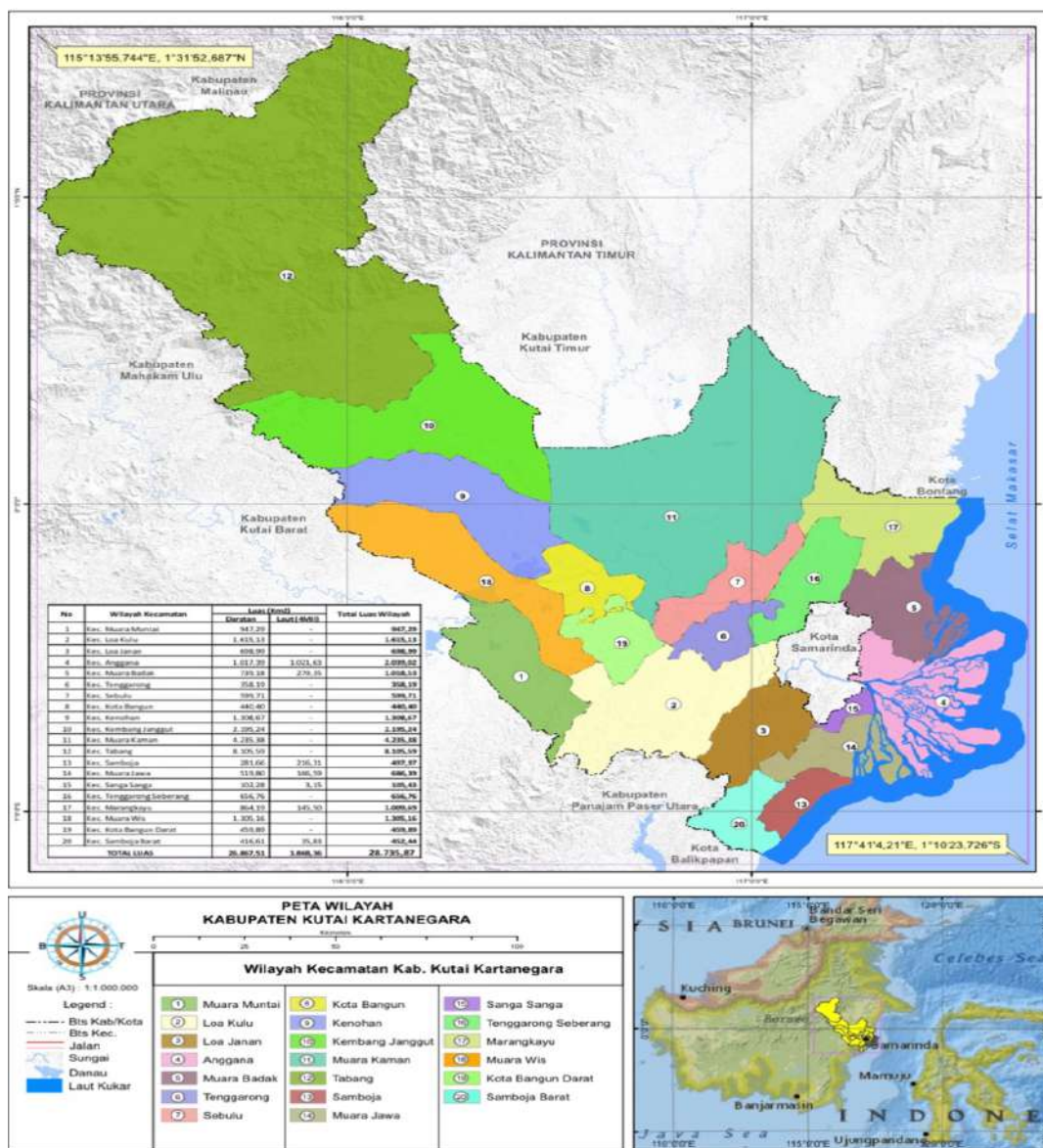
Untuk membedakan penyebutan Kabupaten-kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Kondisi Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115⁰ 13'55" Bujur Timur sampai dengan 117⁰ 41'4" Bujur Timur dan 1⁰ 31'52" Lintang Utara sampai dengan 1⁰ 10'23" Lintang Selatan. Berdasarkan validasi perhitungan dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 September 2021, luas wilayah daratan Kabupaten

Kutai Kartanegara ± 26.867,51 km² dan luas wilayah laut ± 1.868,356 km² dengan total luas wilayah ± 28.735,87 km²

Gambar 1. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kukar, 2023

Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Selat Makassar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat.

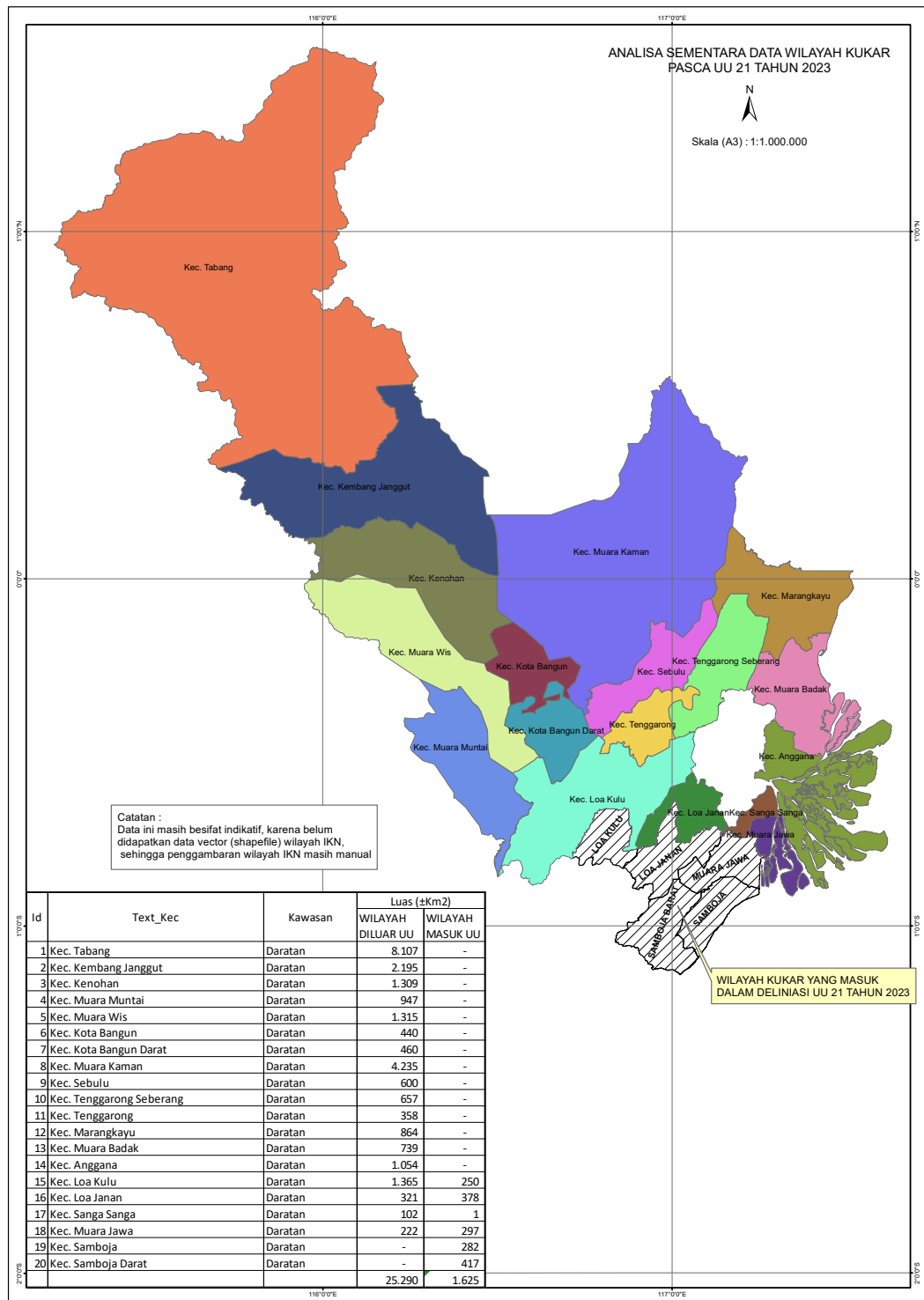
Ditetapkannya Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana dirubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara Nusantara memiliki wilayah daratan seluas ± 252.660 ha dan wilayah lautan ± 69.769 ha yang dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara.

Terdapat 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, secara rinci luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca UU IKN

No	Kecamatan	Kawasan	Luas ($\pm km^2$)	
			Wilayah Diluar UU	Wilayah Masuk UU IKN
1	Tabang	Daratan	8.107	
2	Kembang Janggut	Daratan	2.195	
3	Kenohan	Daratan	1.309	
4	Muara Muntai	Daratan	947	
5	Muara Wis	Daratan	1.315	
6	Kota Bangun	Daratan	440	
7	Kota Bangun Darat	Daratan	460	
8	Muara Kaman	Daratan	4.235	
9	Sebulu	Daratan	600	
10	Tenggarong Seberang	Daratan	657	
11	Tenggarong	Daratan	358	
12	Marang Kayu	Daratan	864	
13	Muara Badak	Daratan	739	
14	Anggana	Daratan	1.054	
15	Loa Kulu	Daratan	1.365	250
16	Loa Janan	Daratan	321	378
17	Sanga-Sanga	Daratan	102	1
18	Muara Jawa	Daratan	222	297
19	Samboja	Daratan	-	282
20	Samboja Darat	Daratan	-	417
			25.290	1.625

Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca UU IKN



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kukar, 2023

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumlah penduduk Kabupaten Kutai

Kartanegara Semester II Tahun 2023 sebesar 788.113 jiwa di 20 (dua puluh) wilayah kecamatan. Komposisi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Muara Muntai	11.080	10.154	21.234
2	Loa Kulu	29.729	27.319	57.048
3	Loa Janan	40.037	36.014	76.051
4	Anggana	20.217	18.457	38.674
5	Muara Badak	26.354	24.332	50.686
6	Tenggarong	58.332	55.707	114.039
7	Sebulu	22.828	20.501	43.329
8	Kota Bangun	12.193	11.646	23.839
9	Kenohan	6.548	5.798	12.346
10	Kembang Janggut	13.998	12.622	26.620
11	Muara Kaman	24.626	21.683	46.309
12	Tabang	7.029	6.248	13.277
13	Samboja	21.678	19.929	41.607
14	Muara Jawa	22.827	21.243	44.070
15	Sanga Sanga	10.806	10.163	20.969
16	Tenggarong Seberang	38.000	35.060	73.060
17	Marang Kayu	15.150	14.094	29.244
18	Muara Wis	5.190	4.540	9.730
19	Kota Bangun Darat	7.467	7.001	14.468
20	Samboja Barat	16.642	14.871	31.513
Jumlah Penduduk		410.731	377.382	788.113

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DKB SMT II 2023

D. Jumlah Kecamatan, Jumlah Perangkat Daerah dan Jumlah Pegawai Pemerintah

Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 Kecamatan dan 193 Desa dan 44 Kelurahan, berikut ini ditampilkan tabel pembagian luas wilayah per kecamatan dan jumlah desa/kelurahan.

Tabel 3. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa

No	Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (km ²)	Luas Wilayah Laut (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Muara Muntai	947,29	-	13	-
2	Loa Kulu	1.615,13	-	15	-
3	Loa Janan	698,99	-	8	-
4	Anggana	1.017,39	1.021,63	8	-
5	Muara Badak	739,18	279,35	13	-
6	Tenggarong	358,19	-	2	12
7	Sebulu	599,71	-	14	-
8	Kota Bangun	440,40	-	11	-
9	Kenohan	1.308,67	-	9	-
10	Kembang Janggut	2.195,24	-	11	-
11	Muara Kaman	4.235,38	-	20	-
12	Tabang	8.105,59	-	19	-
13	Samboja	281,66	216,31	3	10
14	Muara Jawa	519,80	166,59	-	8
15	Sanga-Sanga	102,28	3,15	-	5
16	Tenggarong Seberang	656,76	-	18	-
17	Marangkayu	864,19	145,50	11	-
18	Muara Wis	1.305,16	-	7	-
19	Kota Bangun Darat	459,89	-	10	-
20	Samboja Barat	416,61	-	1	9
Jumlah		26.968,51	1.868,36	193	44

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kukar, 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berjumlah sebanyak 59 dengan didukung PNS sebanyak 11.860 orang, P3K sebanyak 733 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan	334	202	536

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
2.	Sekretariat DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan	92	68	160
3.	Inspektorat	Penunjang	58	37	95
4.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penunjang	50	26	76
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemerintahan Umumn	37	29	66
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibum Sub Urusan Bencana	36	12	48
7.	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang	166	118	284
8.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Penunjang	54	23	77
9.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Penunjang	97	60	157
10.	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Penunjang	67	55	122
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan	45	44	89
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	64	35	99
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	54	28	82
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36	31	67
15.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	263	582	845
16.	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	26	24	50
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	50	24	74
18.	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	33	38	71
19.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	56	28	84
20.	Dinas Pariwisata	Pariwisata	89	45	134

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
21.	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	222	115	337
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	54	47	101
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14	28	42
24.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33	37	70
25.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	1971	3107	5078
26.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	25	27	52
27.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	92	34	126
28.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	68	46	114
29.	Dinas Perkebunan	Perkebunan	95	50	145
30.	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	Pertanahan Dan Penataan Ruang	38	29	67
31.	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Pertanian dan Peternakan	259	142	401
32.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Perumahan dan Pemukiman	105	91	196
33.	Dinas Sosial	Sosial	51	20	71
34.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Transmigrasi dan Tenaga Kerja	42	28	70
35.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Trantibum Sub Urusan Kebakaran	66	12	78
36.	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibum Sub Urusan Trantibumlinmas	124	9	133
37.	Kantor Kecamatan Anggana	Urusan Kewilayahan	17	15	32
38.	Kantor Kecamatan Kembang Janggut	Urusan Kewilayahan	28	6	34

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
39.	Kantor Kecamatan Kenohan	Urusan Kewilayahan	20	1	21
40.	Kantor Kecamatan Kota Bangun	Urusan Kewilayahan	26	5	31
41.	Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat	Urusan Kewilayahan	16	0	16
42.	Kantor Kecamatan Loa Janan	Urusan Kewilayahan	17	15	32
43.	Kantor Kecamatan Loa Kulu	Urusan Kewilayahan	39	18	57
44.	Kantor Kecamatan Marangkayu	Urusan Kewilayahan	15	10	25
45.	Kantor Kecamatan Muara Badak	Urusan Kewilayahan	14	12	26
46.	Kantor Kecamatan Muara Jawa	Urusan Kewilayahan	33	40	73
47.	Kantor Kecamatan Muara Kaman	Urusan Kewilayahan	50	11	61
48.	Kantor Kecamatan Muara Muntai	Urusan Kewilayahan	26	13	39
49.	Kantor Kecamatan Muara Wis	Urusan Kewilayahan	22	9	31
50.	Kantor Kecamatan Samboja	Urusan Kewilayahan	45	36	81
51.	Kantor Kecamatan Samboja Barat	Urusan Kewilayahan	50	23	73
52.	Kantor Kecamatan Sanga-Sanga	Urusan Kewilayahan	33	18	51
53.	Kantor Kecamatan Sebulu	Urusan Kewilayahan	30	8	38
54.	Kantor Kecamatan Tabang	Urusan Kewilayahan	35	9	44
55.	Kantor Kecamatan Tenggarong	Urusan Kewilayahan	183	154	337
56.	Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang	Urusan Kewilayahan	41	12	53
57	RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	129	170	299

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
58	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	34	54	88
59	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	10	11	21
Jumlah			5.879	5.981	11.860

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, 2023

Selain Pegawai Negeri Sipil, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga didukung oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah P3K Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	7	27	34
	Apoteker		3	3
	Dokter	2	4	6
	Dokter Gigi	1		1
	Epidemiolog Kesehatan		1	1
	Nutrisi		1	1
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	174	428	602
	Guru	174	428	602
3	Dinas Pertanian Dan Peternakan	19	8	27
	Penyuluh Pertanian	19	8	27
4	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dayaku Raja Kota Bangun	5	4	9
	Apoteker	1	1	2
	Perawat	4	3	7
5	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A.M.Parikesit Tenggarong	11	25	36
	Apoteker		3	3
	Asisten Penata Anestesi		1	1
	Dokter	1	1	2
	Perawat	10	20	30

No	Nama Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
6	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Batara Agung Dewa Sakti	6	19	25
	Apoteker	1	2	3
	Asisten Penata Anestesi	1		1
	Bidan		2	2
	Dokter	1		1
	Nutrisi		3	3
	Perawat	3	12	15
Jumlah		222	511	733

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, 2023

E. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp. 7.787.056.066.372,93 atau 85,68% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 9.088.863.537.034,00 secara rinci target dan realisasi pendapatan daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	690.436.231.591,00	655.764.404.370,84	94,98%
	Pajak Daerah	130.000.000.000,00	141.989.017.504,00	109,22%
	Retribusi Daerah	10.010.000.000,00	6.282.211.585,00	62,76%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	70.000.000.000,00	63.147.803.556,59	90,21%
	Lain-lain PAD yang Sah	480.426.231.591,00	444.345.371.725,25	92,49%
2	Pendapatan Transfer	8.388.389.577.043,00	7.123.560.933.602,09	84,92%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.513.909.520.968,00	6.258.065.057.225,09	83,29%
	Dana Perimbangan	7.327.005.087.968,00	6.038.157.870.225,09	82,41%
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	27.486.716.000,00	0,00%
	Dana Desa	186.904.433.000,00	192.420.471.000,00	102,95%

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	874.480.056.075,00	865.495.876.377,00	98,97%
	Pendapatan Bagi Hasil	836.360.056.075,00	827.375.876.377,00	98,93%
	Bantuan Keuangan	38.120.000.000,00	38.120.000.000,00	100,00%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.037.728.400,00	7.730.728.400,00	77,02%
	Pendapatan Hibah	5.874.000.000,00	3.567.000.000,00	60,73%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perpu	4.163.728.400,00	4.163.728.400,00	100,00%
Total		9.088.863.537.034,00	7.787.056.066.372,93	85,68%

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2023 Unaudited

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp. 10.191.450.801.108,90 atau 86,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 11.789.126.000.000,00 Secara rinci target dan realisasi belanja daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	6.575.819.904.019,00	5.796.772.567.219,72	88,15%
	Belanja Pegawai	1.918.078.141.093,00	1.684.529.154.471,75	87,82%
	Belanja Barang dan Jasa	4.287.299.088.914,00	3.795.475.174.146,97	88,53%
	Belanja Subsidi	307.947.000,00	64.400.000,00	20,91%
	Belanja Hibah	323.784.307.012,00	275.810.463.601,00	85,18%
	Belanja Bantuan Sosial	46.350.420.000,00	40.893.375.000,00	88,23%
2	Belanja Modal	4.313.313.820.198,00	3.513.607.650.991,16	81,46%
	Belanja Modal Tanah	72.611.437.524,00	48.525.311.811,00	66,83%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.450.734.766.845,00	1.186.122.189.231,00	81,76%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.064.305.084.902,00	884.289.334.911,00	83,09%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.674.059.321.660,00	1.351.028.784.039,16	80,70%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	48.883.651.994,00	42.977.977.499,00	87,92%

No	Uraian	Target (RP)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.719.557.273,00	664.053.500,00	24,42%
3	Belanja Tidak Terduga	21.326.871.826,00	-	0,00%
	Belanja Tidak Terduga	21.326.871.826,00	-	0,00%
4	Belanja Transfer	878.665.403.957,00	881.070.582.898,00	100,27%
	Belanja Bantuan Keuangan	878.665.403.957,00	881.070.582.898,00	100,27%
Total		11.789.126.000.000,00	10.191.450.801.108,90	86,45%

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2023 Unaudited

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp. 2.700.224.684.282,92 atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.2.700.262.462.966,00 Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal. Secara rinci target dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	2.806.136.462.966,00	2.806.098.684.282,92	100,00%
	- Sisa lebih perhitungan pembayaran tahun sebelumnya	2.806.136.462.966,00	2.806.098.684.282,92	100,00%
2	Pengeluaran Pembiayaan	105.874.000.000,00	105.874.000.000,00	100,00%
	- Penyertaan Modal Daerah	105.874.000.000,00	105.874.000.000,00	100,00%
Pembiayaan Netto		2.700.262.462.966,00	2.700.224.684.282,92	100,00%

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2023 Unaudited

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun, permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan.

Permasalahan yang dirumuskan harus mampu menggambarkan setiap detail kondisi Kutai Kartanegara sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni: *“Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara”*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat;
4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah;
5. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah;
6. Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021 –2026 adalah:

***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan Berbahagia”***

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Masyarakat yang Berbahagia. Adapun penjelasan dari masing-masing elemen visi diatas ada sebagai berikut:

Masyarakat yang Sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang Berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain Visi dan Misi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan tahun 2021-2026 yaitu **KUKAR IDAMAN**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan secara terminologi merupakan untuk akronim dari Inovatif, Daya saing dan Mandiri (Idaman). Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan

Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Keterkaitan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9. Keterkaitan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Awal	Target Tahun 2023
Memantapkan birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani			
Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,95)	B (63,00)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	B (65,89)	B (70,00)
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Presepsi Anti Korupsi	5,93	6,50
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Presepsi Kualitas Pelayanan Publik	8,50	8,90
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya			
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	73,59	75,85
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan	Indeks Pendidikan	0,685	0,697

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Awal	Target Tahun 2023
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	na	50,50
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,805	0,814
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	78,90	79,05
Meningkatkan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kebahagiaan	na	72,00
	Tingkat Kemiskinan	7,35	6,50
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	0,290	0,280
	Indeks Desa Membangun	0,685	0,725
Menurunnya pengangguran di masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,20	4,65
	PDRB per Kapita	188,64	191,44
Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	0,62	5,46
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,21	6,15
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	-0,99	2,51
Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	4,44	6,55
Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	1,69	1,73
Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah			
Meningkatkan Pemerataan Infrastuktur dan Penataan Wilayah	Indeks Kesulitan geografis	37,80	34,80
	Persentase Kawasan Kumuh	0,0058	0,0057
Meningkatnyakualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	87,60	90,74

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Awal	Target Tahun 2023
	Presentase rumah layak huni	89,80	90,62
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	83,17	85,18
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan			
Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Presentase penurunan Emisi GRK	5	5
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,82	73,47
Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	110,0	106,42

Sumber : Perda No 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai tindaklanjut dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan maka dilaksanakan melalui program prioritas yang mempunyai keterkaitan langsung dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada pembangunan tahun 2023, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kebijakan dan program prioritas yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 10. Program Pembangunan Tahun 2023

No	Sasaran Daerah	Prioritas	Program	Pagu (APBD)	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penataan Manajemen Organisasi Dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57,829,624,448	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4,621,629,800	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

No	Sasaran Daerah	Prioritas	Program	Pagu (APBD)	Perangkat Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.394.977.840	
			Program Kepegawaian Daerah	5.359.385.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penataan Manajemen Keuangan Dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	814.754.688.182	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.734.926.590	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	10.750.000.000	Inspektorat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3.750.000.000	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	19.534.555.670	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pendaftaran Penduduk	825.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	475.000.000	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	160.000.000	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	537.303.097.437	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kurikulum	450.000.000	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	250.000.000	
		Penguatan modal sosial	Program Pengembangan Kebudayaan	11.529.620.000	

No	Sasaran Daerah	Prioritas	Program	Pagu (APBD)	Perangkat Daerah
		budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Sosial	5.091.000.000	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	7.907.600.000	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	9.373.600.000	
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	54.371.198.203	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	247.814.848.840	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.737.027.000	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.492.000.080	
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Peningkatan daya saing tenaga kerja, keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.325.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	565.000.000	
			Program Perlindungan Khusus Anak	524.700.000	
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	14.369.751.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	26.196.035.828	
			Program Penataan Desa	747.052.000	
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.703.948.000	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	Peningkatan kapasitas dan	Program Pengembangan Kapasitas	9.340.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Sasaran Daerah	Prioritas	Program	Pagu (APBD)	Perangkat Daerah
		komptensi angkatan kerja serta perluasan kerja dan	Daya Saing Kepemudaan		
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.151.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	77.561.460.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.271.000.000	Dinas Perkebunan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	78.876.200.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.368.750.000	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.421.150.000	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.100.000.000	
			Program Penyuluhan Pertanian	19.688.500.000	
			Program Penyuluhan Pertanian	550.000.000	Dinas Perkebunan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	250.000.000	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	83.064.337.970	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	4.300.000.000	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.300.000.000	

No	Sasaran Daerah	Prioritas	Program	Pagu (APBD)	Perangkat Daerah
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	657.375.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.605.000.000	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	8.995.000.000	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	2.330.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Pengembangan UMKM	2.575.000.000	
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Peningkatan produktivitas pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	16.940.271.000	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	8.653.000.000	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	11.920.000.000	
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Peningkatan produktivitas industri kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	6.900.000.000	
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	950.000.000	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	1.000.000.000	
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Penyediaan infrastruktur jalan, listrik desa, penataan perumahan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Program Pengembangan Perumahan	7.276.384.560	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	2.113.615.440	
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	61.000.000.000	
			Program Peningkatan Prasarana,	55.975.000.000	

No	Sasaran Daerah	Prioritas	Program	Pagu (APBD)	Perangkat Daerah
			Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	213.065.287.752	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	26.200.000.000	
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	428.942.796.371	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Persampahan	12.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Penyiapan Rencana Tata Ruang sebagai acuan Pembangunan serta pembangunan sarana prasarana konektivitas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	175.145.043.240	
			Program Penyelenggaraan Jalan	541.264.984.667	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemulihan daya dukung lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.080.247.395	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.420.000.000	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	285.000.000	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	600.000.000	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	305.000.000	
16	Meningkatnya ketahanan bencana	Penguatan mitigasi dan	Program Penanganan Bencana	625.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran Daerah	Prioritas	Program	Pagu (APBD)	Perangkat Daerah
	daerah	ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	4.349.895.550	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.527.541.280	

Sumber: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 26 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Tahun 2023

D. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2023 diselenggarakan dengan tema ***“Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar, Konektifitas dan Pengembangan SDM”***.

Berdasarkan tema pembangunan yang telah dirumuskan, maka terlihat bahwa pada tahun 2023 pembangunan Kutai Kartanegara diarahkan pada pengembangan dan pemerataan infrastruktur pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia, sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya transformasi ekonomi yang inklusif di Kutai Kartanegara. Tiga fokus pembangunan telah ditetapkan, yakni: Fokus 1). Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang berkualitas. Fokus 2). Perwujudan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan SDM yang berdaya saing. Fokus 3). Penguatan nilai tambah potensi ekonomi terbarukan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dengan demikian, Kabupaten Kutai Kartanegara ingin meningkatkan pembangunan pada berbagai bidang pembangunan, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, pemerintahan, dan ekonomi yang berkelanjutan.

Arah Pengembangan kawasan dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah didasarkan pada penguatan aspek produksi, aksesibilitas, dan hilirisasi sektor basis yang sudah ada, yaitu pengembangan pada sektor pertanian dalam arti luas.

Penguatan pada aspek produksi bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dalam mendukung hilirisasi produk-produk unggulan daerah. Sedangkan pada aspek pembangunan infrastruktur mengarah pada peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan infrastruktur dasar.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2023, dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Sasaran		Prioritas RPJMD 2023	Fokus Pembangunan P-RKPD Tahun 2023	Priorotas Pembangunan P-RKPD Tahun 2023
1.	Meningktanya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perwujudan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan SDM yang berdaya saing, dan Fokus	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah			Penataan manajemen keuangan dan aset daerah
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu
				Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat			Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif
5.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan		Peningkatan daya saing tenaga kerja, keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	
6.	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Penguatan nilai tambah potensi ekonomi terbarukan dan	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan

Sasaran		Prioritas RPJMD 2023	Fokus Pembangunan P-RKPD Tahun 2023	Prioritas Pembangunan P-RKPD Tahun 2023
	masyarakat dan kualitas hidup masyarakat		peningkatan kualitas lingkungan hidup	pemberdayaan masyarakat
7.	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan
8.	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang berkualitas	Penyediaan infrastruktur jalan, listrik desa, penataan perumahan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
9.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Penguatan nilai tambah potensi ekonomi terbarukan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemulihan daya dukung lingkungan

Sumber: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 26 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Tahun 2023

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya peningkatan pelayanan publik melalui pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib dan menjadi pelayanan dasar ada 6 (enam) urusan, yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan pelayanan dasar dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan

Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan penyesuaian terhadap regulasi diantaranya: Menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan menetapkan kembali melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 169/SK-BUP/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2023-2026.

Secara umum pelaksanaan dan penerapan SPM telah tertuang dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, penitik beratan kebijakan umum terkait dengan upaya pemenuhan SPM dapat terlihat dalam pemahaman atas Visi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, program pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran prioritas khususnya dalam penerapan standar pelayanan minimal sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan.
- b. Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

melaksanakan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

- c. Bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
- d. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Program Program Pengembangan Perumahan.
- e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terbagi tiga (tiga) Sub Bidang

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sub Bidang Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Program Penanggulangan Bencana serta Program Pencegahan.

Sub Bidang Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan Program Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- f. Bidang Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana.

BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan. Adapun Capaian Kinerja Makro menggunakan Indikator Kinerja Makro sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,31	75,95	0,850%
2	Angka Kemiskinan	7,96	7,61	-4,397%
3	Angka Pengangguran	4,14	4,05	-2,174%
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,7	5,13	38,649%
5	Pendapatan Perkapita	322,08	270,72	-15,946%
6	Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)	0,269	0,284	5,576%

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (BPS, 2022) yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil

pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

- a. Umur Panjang dan Hidup Sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir.
- b. Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat dienyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas.
- c. Standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP).

Tabel 13. Indikator Pembentuk IPM Tahun 2019-2023

Tahun	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Perkapita
2019	72,21	13,58	9,1	Rp.11.152,00
2020	72,34	13,59	9,22	Rp.10.720,00
2021	72,64	13,60	9,23	Rp.11.048,00
2022	72,65	13,63	9,24	Rp.11.677,00
2023	72,75	13,63	9,26	Rp.12.323,00

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun, selama kurun waktu 2019 hingga 2023 Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat 0,54 tahun dari tahun 2019 sebesar 72,21 menjadi 72,75 di tahun 2023.

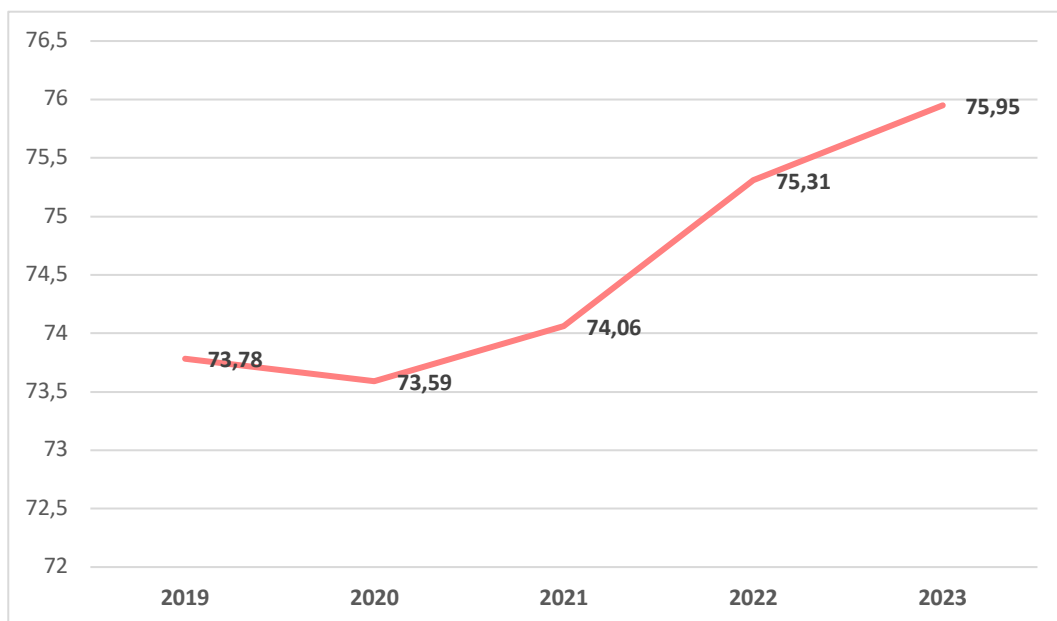
Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan, harapan semakin banyak penduduk yang melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi, pada tahun 2023 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 13,63 tahun. Rata-rata Lama Sekolah juga terus mengalami peningkatan

setiap tahunnya, hingga tahun 2023 Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,26 tahun.

Dimensi ketiga yaitu pendapatan perkapita, selama periode 2019 hingga 2023 pendapatan perkapita meningkat sebesar 1.171 rupiah dari tahun 2019 sebesar 11.152,00 rupiah menjadi 12.323 rupiah di tahun 2023.

Adapun perkembangan capaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 s.d 2023 sebagai berikut:

Grafik 1. Pertumbuhan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2023



Capaian IPM Tahun 2023 adalah 75,95 meningkat 0,64 poin dari tahun sebelumnya yaitu 75,31 yang didukung oleh beberapa 3 (tiga) dimensi dasar yang mengalami peningkatan.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Penjabaran angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 menggunakan data jumlah penduduk miskin yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Tahun 2023 Jumlah Penduduk miskin 60,86 (ribu jiwa) mengalami penurunan -2,01 poin dari jumlah penduduk miskin Tahun 2022 yaitu 62,87.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 tercatat 7,61% mengalami penurunan 0,35 poin dari Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 yaitu 7,96%.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi isu global saat ini dan dihadapi oleh banyak negara di dunia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Secara umum tingkat kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara baik dari sisi Jumlah maupun persentase terus menurun, Isu kemiskinan menjadi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, hal tersebut diindikasikan dari beragam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diharapkan mendukung memecahkan permasalahan-permasalahan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang memerlukan tambahan modal khususnya diprioritaskan kepada masyarakat yang bergerak di usaha mikro, pedagang kaki lima dan wirausaha baru.

2.1.3. Angka Penangguran

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi

mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, serta besarnya persentase angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023 tercatat 4,05 mengalami penurunan 0,09 poin dari Tahun 2022 yang tercatat sebesar 4,14. Menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang termanfaatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Kutai Kartanegara	5,70	5,66	4,14	4,05
2	Provinsi Kalimantan Timur	6,87	6,83	5,71	5,31
3	Kabupaten Paser	4.52	5.70	4.88	6,61
4	Kabupaten Kutai Barat	4.97	5.14	4.62	6,16
5	Kabupaten Kutai Timur	5.45	5.35	6.48	5,93
6	Kabupaten Berau	5.08	5.82	5.02	4,95
7	Kabupaten Penajam Paser Utara	6.22	2.95	2.12	2,07
8	Kabupaten Mahakam Ulu	3.49	3.14	2.44	2,09
9	Balikpapan	9.00	8.94	6.90	6,09
10	Samarinda	8.26	8.16	6.78	5,92
11	Kota Bontang	9.46	9.92	7.81	7,74

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu adalah data Produk Domesti Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Dari nilai PDRB ADHB dapat dihitung kontribusi

ekonomi menurut sektor perekonomian, sedangkan nilai PDRB ADHK akan dapat didapatkan penghitungan untuk pertumbuhan ekonomi.

Tabel 15. PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 2021-2023

No	Lapangan Usaha	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	33.712.203,84	34.552.821,97
2	Pertambangan dan penggalian	235.975.247,27	248.204.037,48
3	Industri pengolahan	99.643.369,95	104.339.854,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas Electricity & Gas	337.249,73	391.372,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	278.099,11	299.358,75
6	Konstruksi	39.881.289,77	46.190.192,33
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30.131.630,11	32.195.960,85
8	Transportasi dan Pergudangan	15.273.774,89	16.738.530,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.572.467,72	4.924.086,50
10	Informasi dan Komunikasi	9.682.239,35	10.348.222,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.012.390,88	8.951.755,94
12	Real Estat	4.397.865,09	4.590.817,08
13	Jasa Perusahaan	960.337,93	1.024.139,28
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.727.045,19	9.427.892,16
15	Jasa Pendidikan	7.679.667,32	8.051.038,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.042.804,05	4.321.486,23
17	Jasa lainnya	2.851.225,11	3.078.440,00
Produk Domestik Regional Bruto ADHK		506.158.907,31	537.630.006,81

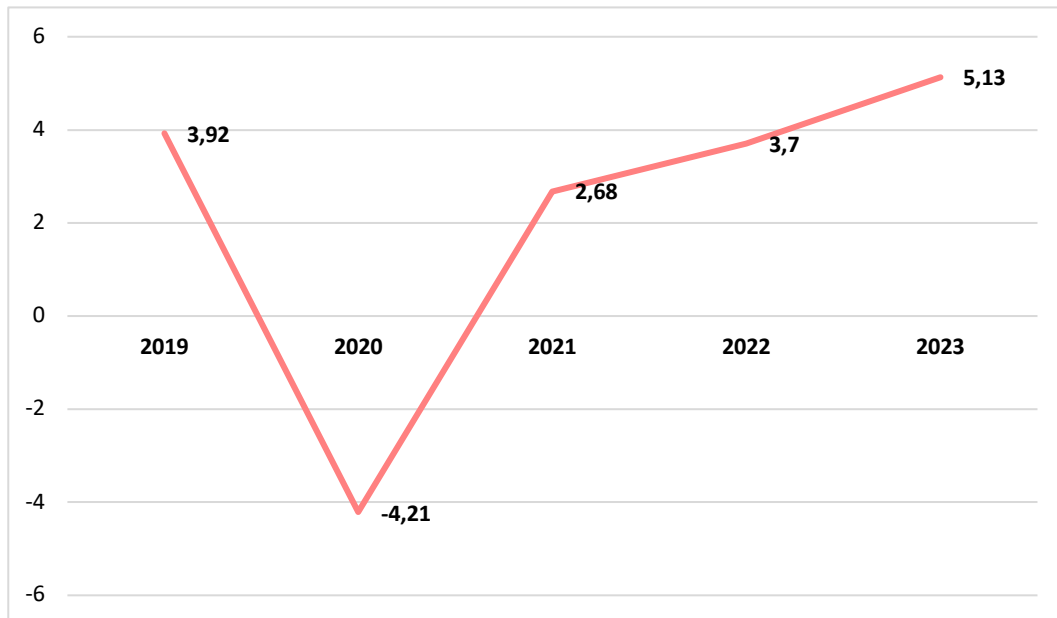
Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2023

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa PDRB ADHK yang dihasilkan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 mencapai 537.630.006,81 juta rupiah, nilai ini naik 31.471.009,50 juta rupiah dari tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 meningkat sampai dengan 5,13%. Peningkatan pertumbuhan pada tahun 2023 ini tidak terlepas dari adanya program prioritas Pemerintah Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2023

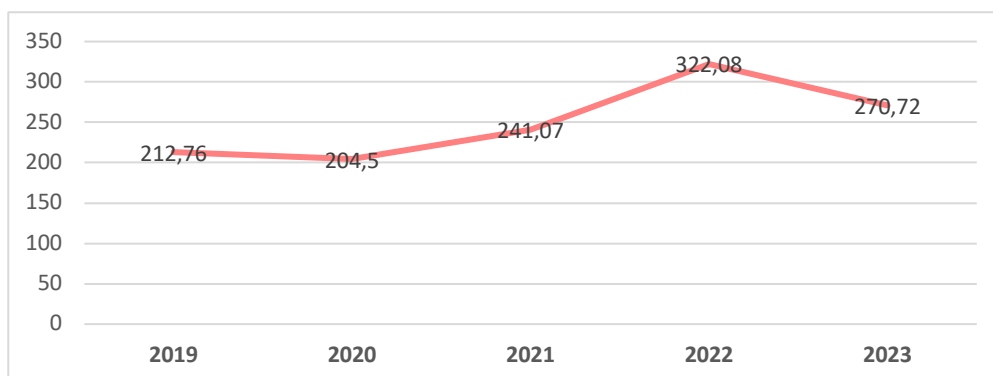


Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2023

2.1.5. Pendapatan Perkapita

Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dan 2023 pada dokumen ini merupakan PDRB atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara (2024).

Grafik 3. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2023



2.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) merupakan salah satu indikator untuk melihat ketimpangan/kesenjangan distribusi pendapatan penduduk di suatu wilayah. Pergerakan Ketimpangan Pendapatan merupakan salah satu indikator perubahan distribusi pendapatan penduduk.

Jika Ketimpangan Pendapatan mengalami penurunan mengindikasikan bahwa kualitas distribusi pendapatan penduduk mengalami perbaikan, sekaligus menandakan berkurangnya kesenjangan sosial.

Tabel 16. Angka Ketimpangan Pendapatan Tahun 2023

No	Wilayah	2020	2021	2022	2024
1	Kabupaten Kutai Kartanegara	0.294	0.283	0.269	0,284
2	Kabupaten Paser	0.290	0.288	0.282	0,292
3	Kabupaten Kutai Barat	0.338	0.317	0.300	0,277
4	Kabupaten Kutai Timur	0.325	0.328	0.304	0,336
5	Kabupaten Berau	0.300	0.377	0.352	0,327
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	0.292	0.263	0.274	0,299
7	Kabupaten Mahakam Ulu	0.259	0.270	0.288	0,330
8	Balikpapan	0.311	0.325	0.334	0,323
9	Samarinda	0.324	0.322	0.346	0,323
10	Kota Bontang	0.405	0.340	0.324	0,299

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2023

Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 tercatat 0,284 mengalami kenaikan 0,016 poin, namun jika dilihat dari 9 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara berada dibawah Kutai Barat yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih baik.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Pada Indikator Kinerja Kunci Keluaran yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar,

18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Urusan Pilihan. Adapun rincian Capaian Indikator Kunci Keluaran pada tabel berikut:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	519	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	15.339	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.714	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	117	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	5. Jumlah pendidik pada PAUD	2.094	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1.861	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.1	Pendidikan	7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	596	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	615	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2000 siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1236 siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.a.2	Pendiidikan	6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	6327	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1992	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5526	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1868	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	954	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	304	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1188	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	503	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5146	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	152	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	5529	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	155	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	480	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	480	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.a.4	Pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	11`	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9 orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	244	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	277	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	72	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.b.1	Kesehatan	7. Jumlah RS Rujukan kab/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3	Dinas Kesehatan	
1.b.2	Kesehatan	7. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	Dinas Kesehatan	
1.b.3	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8	Dinas Kesehatan	
1.b.3	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	3	Dinas Kesehatan	
1.b.4	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan	
1.b.4	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	3	Dinas Kesehatan	
1.b.5	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6	Dinas Kesehatan	
1.b.5	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	3	Dinas Kesehatan	
1.b.6	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17	Dinas Kesehatan	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.b.6	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	6	Dinas Kesehatan	
1.b.7	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	Dinas Kesehatan	
1.b.7	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	7	Dinas Kesehatan	
1.b.8	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11	Dinas Kesehatan	
1.b.8	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6	Dinas Kesehatan	
1.b.9	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan	
1.b.9	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6	Dinas Kesehatan	
1.b.10	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan	
1.b.10	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5	Dinas Kesehatan	
1.b.12	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	Dinas Kesehatan	
1.b.12	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3	Dinas Kesehatan	
1.b.13	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7	Dinas Kesehatan	
1.b.13	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6	Dinas Kesehatan	
1.b.14	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	Dinas Kesehatan	
1.b.14	Kesehatan	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6	Dinas Kesehatan	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	21811.83 ha	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	793170 m	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS	1724.58 ha	Dinas Pekerjaan Umum	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kewenangan kabupaten/kota (HA)			
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	20378.07 ha	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Nihil	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Nihil	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	37%	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	66%	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Nihil	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	5163	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	466	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan	5629	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T			
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	414	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	414	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	209	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	8.02%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0.42%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	2.64%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	50%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	66.67%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0.42%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0.21%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	50.68	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	163 PBG	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Nihil	Dinas Pekerjaan Umum	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Nihil	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	99 Unit	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	99 Unit	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	2193.02 KM	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Panjang jalan yang dibangun	3.43 KM	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Panjang jembatan yang dibangun	101.75 Meter	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	184,84 KM	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0 Meter	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	57.997 KM	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	1.929,10 Meter	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8. Panjang jalan yang dipelihara	8,63 KM	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9. Panjang jembatan yang dipelihara	0 Meter	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	3.92 Persen	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	887 Orang	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	75 Orang	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1 Aplikasi	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah	Nihil	Dinas Pekerjaan Umum	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota			
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	47 Perusahaan	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Nihil	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	602 Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	58 Data & Profil	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	968 Orang	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	885 Orang	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	885 Orang	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	54 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Nihil	Dinas Pekerjaan Umum	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1 Informasi	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	31 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Nihil	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	31 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	54 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Nihil	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1 Informasi	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.d.1	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	369	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	6	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	3 RT, 6 KK, 25 Jiwa	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	6	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	143 Unit dan 46 lokasi	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	3 RT, 6 KK, 25 Jiwa	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.1	Perumahan Rakyat	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	15.2 ha dan 7 lokasi	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	30	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
1.d.2	Perumahan Rakyat	6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	07.44	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	Perumahan Rakyat	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	15.5 ha	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	Perumahan Rakyat	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	11 Unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	Perumahan Rakyat	3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	7.11 ha	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah di kab/kota	185433	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	2. Jumlah unit PK RTLH	6409	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	3. Jumlah rumah tidak layak huni	12063	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Nihil	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	5. Rasio rumah dan KK	01.37	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	6. Jumlah rumah pembangunan baru	303	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	8	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	3390	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	3390	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	3390	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	1970	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	1890	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	6	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	8. Jumlah pengembang yang terregistrasi	4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.d.5	Perumahan Rakyat	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1504	Satpol PP	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2990	Satpol PP	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	45	Satpol PP	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	Satpol PP	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	5	Satpol PP	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	552	Satpol PP	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	679100 Jiwa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	10 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	395 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perlindungan Masyarakat				
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	1 SK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	1332 Unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Tidak ada Kejadian KLB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	737	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	5	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	1	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	30	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perlindungan Masyarakat				
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	120	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	48	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	70	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
1.f.1	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	7	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	15188	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	15188	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	14992	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	102	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	282	Dinas Sosial	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.f.1	Sosial	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	2	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	4	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	64	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	163	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	138	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	138	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	18	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1002	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	49	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	49	Dinas Sosial	
1.f.1	Sosial	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	17	Dinas Sosial	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.f.2	Sosial	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	1553	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1553	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	18	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	1553	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	163	Dinas Sosial	
2.a.1	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1 dokumen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.1	Tenaga Kerja	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.1	Tenaga Kerja	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	56,59 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	5,60 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	4. Persentase LPK yang terakreditasi	12,90 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	100 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	6. Jumlah penganggur yang dilatih	554	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	8. Persentase penyerapan lulusan	42,78 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	554	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.a.3	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.3	Tenaga Kerja	2. Data tingkat produktivitas total	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	80,13 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	27 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	85,2 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	15,28 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	7. Jumlah mogok kerja	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	8. Jumlah penutupan perusahaan	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	9. Jumlah perselisihan kepentingan	4 kasus	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	1 kasus	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	11. Jumlah perselisihan PHK	70 kasus	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	428 tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	3 kasus	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 LKS/Keputusan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.4	Tenaga Kerja	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang	100 persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			
2.a.5	Tenaga Kerja	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	2656 lowongan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	2922 pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	36 BKK	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3 JFT	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	1 dokumen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	12 CPMI	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	tidak ada/surat keterangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	184	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	24	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perlindungan Anak	perangkat daerah yang sudah dievaluasi			
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.h.1	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada, 13 Lumbung Pangan yang terdiri 5 Lumbung dan 8 Lantai Jemur	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ada, tersalurk an di 18 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	tidak ada regulasi, dibuktikan dengan Surat Pernyataan	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada, 20 Kelompok	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ada, 1 Peta Kerentanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	6. Tertanganinya kerawanan pangan	ada	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	ada, 44 Desa	Dinas Ketahanan Pangan	
2.h.1	Pangan	8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	ada, terlaksana di 17 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan	
2.i.1	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	
2.i.1	Pertanahan	2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan	100	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek			
2.i.1	Pertanahan	3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	100	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	
2.i.1	Pertanahan	4. Dokumen Izin membuka tanah	100	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	
2.i.1	Pertanahan	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	
2.j.1	Lingkungan Hidup	a. Indeks Kualitas Air	50,53	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.1	Lingkungan Hidup	b. Indeks Kualitas Udara	91,53	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.1	Lingkungan Hidup	c. Indeks Tutupan Hutan	74,62	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.2	Lingkungan Hidup	7. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	0,137	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	-	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	-	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	-	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.	-	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	173	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan	2. Penerbitan akta perceraian	0	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pencatatan Sipil				
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3. Penerbitan akta kematian	11.867	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4. Penyajian data kependudukan	788.133	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	32 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	19 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	5570 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1057 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ADA	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	98,74%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	21 Kelahiran	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	67,22%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang	29 MOU	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	93,02%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	66,91%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	40 SK	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	122,06%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	23,91%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.n.1	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	4	Dinas Perhubungan	
2.n.1	Perhubungan	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	5532	Dinas Perhubungan	
2.n.1	Perhubungan	3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	13	Dinas Perhubungan	
2.n.1	Perhubungan	4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	0,44	Dinas Perhubungan	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	96.61	Dinas Komunikasi Dan Informatika	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	YA (23)	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	7. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	95.24.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	03.03	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	22.03	Dinas Komunikasi Dan Informatika	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	62.12.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	86.44.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	44.44.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase Komunitas Masyarakat/mitra Strategis Pemerintah Daerah Kab./Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah Kab / Kota	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kab./Kota sesuai denha Strategi Komunikasi (STRAKOM)	138.02.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	7. Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (Starkom) dan SOP yang telah ditetapkan	138.02.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	64.29%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30.08%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	14.49%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah	2.26%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.26%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.00%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	13.83%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3.46%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2.11%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6.92%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	22.26%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0.92%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	3.45%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.13%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1.11%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1.05%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1.22%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan kelembagaan dan usaha	0.46%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
2.q	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 Kegiatan	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	5. Kegiatan pameran penanaman modal	3	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	417 konsultasi	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	12796	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	9. Laporan realisasi penanaman modal	1 laporan	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	39	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	283	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	
2.q	Penanaman Modal	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	9	Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.r.1	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	1007	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	
2.r.1	Kepemudaan dan Olah Raga	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	28	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	
2.r.2	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaeskelawanan dan kepeloporan pemuda	3320	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	
2.r.2	Kepemudaan dan Olah Raga	2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	25	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	
2.r.3	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	247	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	
2.r.3	Kepemudaan dan Olah Raga	2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	32	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	
2.s.1	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.s.1	Statistik	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	51	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.s.1	Statistik	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.s.1	Statistik	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	139	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.s.1	Statistik	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.s.1	Statistik	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.s.1	Statistik	7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.t	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.t	Persandian	2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	75.71	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.t	Persandian	3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	17.14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.t	Persandian	4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.u	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	19	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	19	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	15 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	9 objek CB Penetapan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	5 Objek Cagar Budaya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	7. Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	12 objek CB	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	472 Koleksi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	1 dokumen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.u	Kebudayaan	12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	2 Dokumen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	9 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota	2 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	9 Objek CB	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.u	Kebudayaan	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2.v.1	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	158	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.1	Perpustakaan	2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	10,54	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.1	Perpustakaan	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,12	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.1	Perpustakaan	4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6,37	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.1	Perpustakaan	5. Jumlah pelayan perpustakaan yang membaca di masyarakat	150	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.2	Perpustakaan	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.2	Perpustakaan	2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	1	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.v.2	Perpustakaan	3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	1725	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.w.1	Kearsipan	4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0.00112	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	40.879	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	1400	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	7. pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	1400	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	1.106.541.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.b.1	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	-	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas	-	Dinas Pariwisata	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		umum, dan fasilitas pariwisata			
3.b.1	Pariwisata	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	-	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1530 orang	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	64 Event	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	tidak ada	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	65 Industri Pariwisata	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	-	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	-	Dinas Pariwisata	
3.b.1	Pariwisata	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	16 Lokasi	Dinas Pariwisata	
3.c.1	Pertanian	1. Sarana pertanian yang diberikan	1471,65	Dinas Pertanian Dan Kesehatan Hewan	
3.c.1	Pertanian	2. Prasarana pertanian yang digunakan	220	Dinas Pertanian Dan Kesehatan Hewan	
3.c.1	Pertanian	3. Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian Dan Kesehatan Hewan	
3.c.1	Pertanian	4. Persentase prasarana yang digunakan	100	Dinas Pertanian Dan Kesehatan Hewan	
3.c.1	Pertanian	5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0	Dinas Pertanian Dan Kesehatan Hewan	
3.c.2	Pertanian	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	Dinas Pertanian Dan Kesehatan Hewan	
3.d	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
3.d	Kehutanan	2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
3.d	Kehutanan	3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.d	Kehutanan	4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	7. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	-	Energi Dan Sumber Daya Mineral (DIHAPUS)	
3.f.1	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Swalayan	91	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	2. Persentase penerbitan TDG	100	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	11	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.1	Perdagangan	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,54	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.2	Perdagangan	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	82.24.00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.3	Perdagangan	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	34,4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.f.3	Perdagangan	2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.g.1	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.g.2	Perindustrian	1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.g.3	Perindustrian	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	245	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	

No IKK	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.g.3	Perindustrian	2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.g.6	Perindustrian	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	5,29	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.h	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1 kawasan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
3.h	Transmigrasi	2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
3.h	Transmigrasi	3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Pada Indikator Kinerja Kunci Hasil yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Urusan Pilihan. Adapun rincian Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil pada tabel berikut:

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD $= \frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$ $= \frac{23.858}{29.148} \times 100\%$ $= 81,85$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar $= \frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$= \frac{92.889}{94.013} \times 100\%$ $= 98,80$		
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama $\text{-----} \times 100 \%$ Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan $= \frac{39.369}{46.711} \times 100\%$ $= 84,28$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan $\text{-----} \times 100 \%$ Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan $= \frac{7.645}{9.625} \times 100\%$ $= 79,42$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan $\text{-----} \times 100 \%$ Jumlah Penduduk di kabupaten/kota $= \frac{835}{788.113} \times 100\%$ $= 1,05$	Dinas Kesehatan	
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi $\text{-----} \times 100 \%$ Jumlah RS di kabupaten/kota $= \frac{3}{3} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kesehatan	
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan $\text{-----} \times 100 \%$ Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota $= \frac{12.737}{13.942} \times 100\%$ $= 91,35$	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{12.220}{12.801} \times 100\%$ $= 95,45$	Dinas Kesehatan	
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{11.803}{12.674} \times 100\%$ $= 93,12$	Dinas Kesehatan	
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah balita di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{54.452}{62.114} \times 100\%$ $= 87,66$	Dinas Kesehatan	
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{139.625}{141.015} \times 100\%$ $= 99,01$	Dinas Kesehatan	
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{477.454}{506.653} \times 100\%$ $= 94,23$	Dinas Kesehatan	
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah orang warga negara}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			usia 60 tahun di kabupaten/kota $= \frac{48.721}{53.988} \times 100\%$ $= 90,24$		
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\text{-----} \times 100 \%$ Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota $= \frac{56.849}{56.849} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\text{-----} \times 100 \%$ Jumlah penderita DM di kabupaten/kota $= \frac{16.315}{16.315} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kesehatan	
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\text{-----} \times 100 \%$ Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota $= \frac{856}{856} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kesehatan	
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\text{-----} \times 100 \%$ Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota $= \frac{9.851}{9.851} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kesehatan	
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar $\text{-----} \times 100 \%$ Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota $= \frac{17.294}{17.294} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 100		
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) $= \frac{0}{1} \times 100\%$ = 0	Dinas Pekerjaan Umum	Berdasarkan PermenPUP R No.04/PRT/M/2015 Kab. Kutai Kartanegara Tidak mempunyai kewenangan WS
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) $= \frac{0}{1} \times 100\%$ = 0	Dinas Pekerjaan Umum	Berdasarkan PermenPUP R No.04/PRT/M/2015 Kab. Kutai Kartanegara Tidak mempunyai kewenangan WS
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100 % luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota $= \frac{8.606,88}{13.429,43} \times 100\%$ = 64,08	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. ----- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. $= \frac{161.911}{197.028} \times 100\%$ = 82,17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD $\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten A}} \times 100 \%$ $= \frac{164.488}{197.028} \times 100\%$ $= 83,48$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya $\frac{\text{Jumlah IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$ $= \frac{1.541}{1.541} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap $\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{1.436,37}{2.193,02} \times 100\%$ $= 65,49$	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$ $= \frac{887}{22.615} \times 100\%$ $= 3,92$	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi $\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100 \%$ $= \frac{601}{602} \times 100\%$ $= 99,83$	Dinas Pekerjaan Umum	
1.d.1	Perumahan Rakyat	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah total unit rumah korban bencana}} \times 100 \%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak adanya bencana yang terjadi

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		korban bencana kabupaten/kota	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n $= \frac{0}{1} \times 100\%$ =n/a		yang penetapan status bencananya ditetapkan oleh kepala daerah.
1.d.2	Perumahan Rakyat	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan $= \frac{30}{30} \times 100\%$ = 100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha $= \frac{7,11}{15,5} \times 100\%$ = 45,87	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota $= \frac{5.370}{185.433} \times 100\%$ = 2,89	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota $= \frac{36}{36} \times 100\%$ = 100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk $= \frac{20}{29} \times 100\% = 68,96$	Satpol PP	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan $\frac{\text{Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$ $= \frac{45}{60} \times 100\%$ $= 75$	Satpol PP	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana $= \frac{415.738}{545.117} \times 100\%$ $= 76,26$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana $= \frac{509}{545.117} \times 100\%$ $= 0,09$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana $\frac{\text{Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$ $= \frac{3.802}{3.802} \times 100\%$ $= 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah $\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $= \frac{86}{94} \times 100\%$ $= 92,48$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti $\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100 \%$ $= \frac{15.188}{15.188} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran $\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100 \%$ $= \frac{1.553}{1.553} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Sosial	
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD $\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $= \frac{8}{18} \times 100\%$ $= 44,44$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$ $= \frac{7.647}{356.298} \times 100\%$ $= 2,14$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) $\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$= \frac{204.876.160.000.000}{356.298} \times 100\%$ $= 57.501.349.993,54$		
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$ $= \frac{246}{458} \times 100\%$ $= 53,711$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$ $= \frac{1.333}{2.922} \times 100\%$ $= 45,61$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$ $= \frac{355.280.027.37}{7.297.994.049.26} \times 100\%$ $= 4,86$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$ $= \frac{65}{65} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$ $= \frac{27}{374.923} \times 100\%$ $= 7,20$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$ $= \frac{268,59}{250} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 107,43		
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR) ----- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan ikegiatan pemanfaatan ruang (KPPR) = $\frac{131.423.367,8}{131.423.367,8} \times 100\%$ = 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = $\frac{50.012,85}{50.012,85} \times 100\%$ = 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan = $\frac{131.423.367,8}{131.423.367,8} \times 100\%$ = 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform = $\frac{65}{65} \times 100\%$ = 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = $\frac{48.598.256,09}{48.598.256,09} \times 100\%$ = 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$= \frac{29}{29} \times 100\%$ $= 100$		
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	72,41	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Jumlah seluruhTotal vol timbunan sampah tahun berjalankabupaten/kota $= \frac{102.768,12}{117.121,17} \times 100\%$ $= 87,74$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota ----- x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan $= \frac{67}{111} \times 100\%$ $= 60,36$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman ----- x 100% Jumlah penduduk wajib KTP-el $= \frac{541.117}{545.340} \times 100\%$ $= 99,22$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun $= \frac{135.094}{243.053} \times 100\%$ $= 55,58$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun $= \frac{251.830}{254.904} \times 100\%$ $= 98,79$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan PKS $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $= \frac{34}{59} \times 100\%$ $= 57,62$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100\%$ $= \frac{7}{7} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Sudah Tidak ada lagi Desa Tertinggal di Kab. Kutai Kartanegara
2.l.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100\%$ $= \frac{26}{74} \times 100\%$ $=$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ $= \frac{74.505}{111.358} \times 100\%$ $= 66,90$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ $= \frac{14.238}{111.358} \times 100\%$ $= 12,78$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,904	Dinas Perhubungan	
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,55	Dinas Perhubungan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $= \frac{57}{59} \times 100\%$ $= 87,5$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$ $= \frac{7}{8} \times 100\%$ $= 87,5$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ $= \frac{541.386}{788.113} \times 100\%$ $= 68,69$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$ $= \frac{280}{553} \times 100\%$ $= 50,63$	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$ $= \frac{43.643}{59.120} \times 100\%$ $= 73,82$	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.q	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten / Kota	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $= \frac{5.026.422.479.209}{9.782.835.525.026} \times 100\%$ $= 51,38$	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.r.1	Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota $= \frac{2.728}{195.187} \times 100\%$ $= 1,39$	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.r.2	Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota ----- x 100% jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota $= \frac{23.087}{195.187} \times 100\%$ $= 11,82$	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.r.3	Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan prestasi olahraga	36	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.s.1	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD $= \frac{56}{56} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.s.2	Statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD $= \frac{59}{59} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian $= \frac{354}{645} \times 100\%$ $= 54,88$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$= \frac{9}{9} \times 100\%$ $= 100$		
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	62,52	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	56,94	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	75	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota ----- x 100% Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan $= \frac{281.844}{252.241} \times 100\%$ $= 111,73$	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1 $= \frac{898}{632} \times 100\%$ $= 142,08$	Dinas Pariwisata	
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1 $= \frac{489.190}{1.041.254} \times 100\%$ $= 46,98$	Dinas Pariwisata	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{57.921}{91.954} \times 100\%$ $= 62,98$	Dinas Pariwisata	
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{650.769.840.000}{204.876.164.540.000} \times 100\%$ $= 0,31$	Dinas Pariwisata	
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Total realisasi PAD dari sektor pariwisata}}{\text{Total realisasi PAD}} \times 100\%$ $= \frac{50.834.473.961,6}{655.764.404.371,84} \times 100\%$ $= 7,75$	Dinas Pariwisata	
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{luas panen}} \times 100\%$ $= \frac{130.766}{30.181} \times 100\%$ $= 433,27$	Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$ $= \frac{19}{24} \times 100\%$ $= 79,16$	Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3.d	Kehutanan	n/a		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0$	Energi dan Sumber Daya Mineral	Potensi Masih Rendah, belum ada yang memanfaatkan

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}} \times 100\%$ $= \frac{108}{118} \times 100\%$ $= 91,52$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi $\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$ $= \frac{4.414,95}{8.587,08} \times 100\%$ $= 51,4138683$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan $\frac{\text{jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $= \frac{2.179}{6.334} \times 100\%$ $= 34,40$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) $\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n} - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}} \times 100\%$ $= \frac{65}{2.730} \times 100\%$ $= 2,38$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP $= 91,27\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $= \frac{90}{245} \times 100\%$ $= 36,73$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Dinas Perindustrian	Belum ada Permohonan yang masuk IUKi dan IPKI,

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= n/a$	dan Perdagangan	sehingga belum pernah dilakukan pemantauan dan pengawasan
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= n/a$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belum ada Permohonan yang masuk IUKI dan IPKI, sehingga belum pernah dilakukan pemantauan dan pengawasan
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.h	Transmigrasi	n/a		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawaiid luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan $\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$ $= \frac{670.685.816.385}{10.191.450.801.109} \times 100\%$ $= 6,58$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD $\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah APBD non migas}} \times 100\%$ $= \frac{655.764.404.370,84}{7.787.056.066.372,9} \times 100\%$ $= 8,42$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures $\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$= \frac{5.480.004.328.618,6}{10.191.450.801.109} \times 100\%$ $= 53,77$		
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan 10 Tahun Terakhir	9 Tahun Terakhir dg Opini WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n $\text{-----} \times 100\%$ jumlah kontrak keseluruhan tahun n $= \frac{0}{34.073} \times 100\% = 0$	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif $= \frac{22.527}{34.073} \times 100\%$ $= 66,11$	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan $\text{-----} \times 100\%$ total belanja langsung $= \frac{7.122.855.257.025,7}{7.625.851.063.739,1} \times 100\%$ $= 93,40$	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) ----- $\times 100\%$ Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) $= \frac{2.974.827.454.275,4}{2.090.776.696.971} \times 100\%$ $= 142,28$	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		tenaga kesehatan)	$= \frac{3.271}{6.453} \times 100\%$ $= 50,68$		
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) $\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional}}{\text{seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$ $= \frac{648}{6.453} \times 100\%$ $= 10,04$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi $\frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional bersertifikat}}{\text{seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$ $= \frac{313}{648} \times 100\%$ $= 48,30$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi $\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD dikurangi satu}} \times 100\%$ $= \frac{10.191.450.801.108,80}{7.780.045.306.259,00} \times 100\%$ $= 30,99$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi $\frac{\text{Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi}}{\text{dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times 100\%$ $= \frac{7.787.056.066.372,93}{7.285.919.306.259,00} \times 100\%$ $= 6,88$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.d.4	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA $\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$= \frac{295.829.946.546,97}{6.553.205.838.057} \times 100\%$ $= 4,51$		
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- X 100% Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda $= \frac{7.087.371.750}{7.699.078.132} \times 100\%$ $= 92,05$	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- X 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci $= \frac{12}{12} \times 100\%$ $= 100$	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Berikuti disajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023:

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perubahannya Tahun 2023, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang ditandatangani Bupati Kutai Kartanegara. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RJMD 2023
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	70,00
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,50
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,90
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,697
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	50,50
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,814
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,05
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,280
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,725

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RJMD 2023
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,65
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	191,44
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,15 %
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,51%
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,55%
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	30,470
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	90,740

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Kutai Kartanegara dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia.

Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

a. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \left(1 + \left(\frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)\right) \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Skala Ordinal Pengukuran Sasaran

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	%
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	70,00	67,86	96,943
Rata-rata Capaian							96,943
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,50	8,66	133,231
Rata-rata Capaian							133,231
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,90	8,41	94,494
Rata-rata Capaian							94,494
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,697	0,679	97,418
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	50,50	53,23	105,406

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	%
Rata-rata Capaian							101,412
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,814	0,812	99,754
Rata-rata Capaian							99,754
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,05	79,80)*	100,949
Rata-rata Capaian							100,949
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,280	0,284	98,571
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,725	0,776	107,034
Rata-rata Capaian							102, 803
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,65	4,05	112,903
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	191,44	270,72	141,412
Rata-rata Capaian							127,158
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,15	2,91	47,317
Rata-rata Capaian							47,317
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,51	3,74)*	149,004
Rata-rata Capaian							149,004
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,55	6,96)*	106,260
Rata-rata Capaian							106,260
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	30,470	51,380	168,62
Rata-rata Capaian							168,62
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	90,74	82,18	90,566
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	90,62	93,49	103,167

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	%
Rata-rata Capaian							96,867
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	85,18	77,19	90,620
Rata-rata Capaian							90,620
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,47	72,41	98,557
Rata-rata Capaian							98,557
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	106,42	114,30	92,595
Rata-rata Capaian							92,595

)* menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2022), karena capaian kinerja tahun 2023 belum tersedia.

Adapun pengkategorian hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 22. Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	96,94				Sangat Berhasil
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1	133,231				Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	94,494			Berhasil	
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	2	101,41				Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1	99,75				Sangat Berhasil
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1	100,95				Sangat Berhasil
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	2	102,803				Sangat Berhasil
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	2	127,16				Sangat Berhasil
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	1	47,32	Kurang Berhasil			

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	1	149,004				Sangat Berhasil
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	106,260				Sangat Berhasil
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1	168,62				Sangat Berhasil
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	2	96,87				Sangat Berhasil
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1	90,62			Berhasil	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	98,56				Sangat Berhasil
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	1	92,60			Berhasil	

Berdasarkan kedua tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori "sangat berhasil" sebanyak 12 sasaran, atau 75%;
- Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori "berhasil" sebanyak 3 sasaran, atau 18,75%;
- Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori "cukup berhasil" sebanyak 0 sasaran, atau 0%; dan
- Capaian kinerja 0 s/d < 50% kategori "kurang berhasil" sebanyak 1 sasaran, atau 6,25%.

Pencapaian kinerja 16 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 23. Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1	Sangat Berhasil	12	75%
2	Berhasil	3	18,75%
3	Cukup Berhasil	0	0%
4	Kurang Berhasil	1	6,25%
Jumlah		16	100%

Selanjutnya hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 24. Rekapitulasi Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD 2023	Capaian 2023	% Capaian
1	Nilai SAKIP	Nilai	70,00	67,860	96,943
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,50	8,66	133,231
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,90	8,41	94,494
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,697	0,679	97,418
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	50,50	53,230	105,406
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,814	0,812	99,754
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,05	79,80)*	100,949
8	Indeks Gini	Nilai	0,280	0,284	98,571
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,725	0,776	107,034
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,65	4,05	112,903
11	PDRB Per Kapita	Nilai	191,44	270,72	141,412
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,15	2,91	47,317
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,51	3,74)*	149,004
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,55	6,96)*	106,260
16	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	30,470	51,380	168,62
17	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	90,74	82,18	90,57
18	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	90,62	93,49	103,17
19	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	85,18	77,19	90,620
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,47	72,41	98,557
21	Indeks Risiko Bencana	Nilai	106,42	114,30	92,595

)* menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2022), karena angka kinerja tahun 2023 belum tersedia.

1. Analisis Kinerja Sasaran 1: "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator Nilai SAKIP

mencapai 96,94 dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 25. Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2023

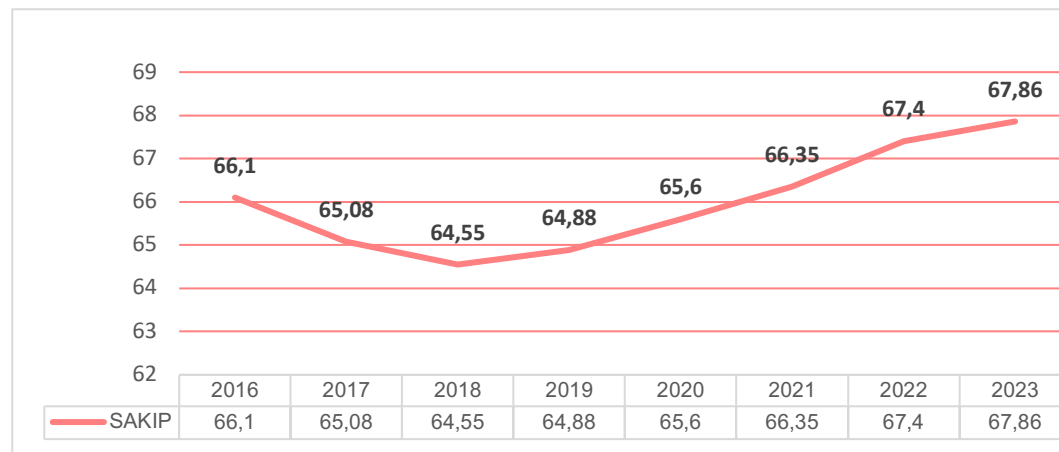
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	Nilai	70	67,86	96,94

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2023

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan metode desk evaluasi, dengan hasil capaian sebesar 67,86 Predikat B. Capaian ini meningkat 0,46 dari capaian Tahun 2022, namun capaian ini lebih rendah 2,14 dari target kinerja RPJMD 2023 yaitu sebesar 70. Adapun Capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja dalam 8 tahun terakhir ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik 4. Predikat SAKIP



Sumber: Kementerian PANRB Tahun 2016-2023

Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 26. Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60	21,67
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,43	19,57
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,97	11,11
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,40	15,51
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,40	67,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Sumber: Kementerian PANRB Tahun 2023

Capaian ini lebih tinggi rata-rata nilai SAKIP Kabupaten/ Kota Tahun 2023, yaitu sebesar 63,36.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 27. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	Nilai SAKIP	Nilai	66,35	67,4	67,86	73	77	80,01

Sumber: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 28. Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	129.211.504.601,00	186.370.101.479,00	179.249.947.624,00	96,18
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.621.629.800,00	5.539.229.200,00	4.562.065.600,00	82,36
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.109.249.440,00	6.517.721.840,00	5.503.713.582,00	84,44
4	Program Kepegawaian Daerah	5.359.385.000,00	7.433.872.500,00	5.992.915.483,00	80,62
Total		142.301.768.841,00	205.860.925.019,00	195.308.642.289,00	94,87

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 195.308.642.289,00 dari anggaran sebesar Rp. 205.860.925.019,00 atau 94,87%. Realisasi keuangan sebesar 94,87%, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,94%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Adapun rekomendasi dari evaluasi SAKIP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan untuk melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis dan keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pada logical framework yang telah disusun sampai ke level individu;
2. Melakukan reviu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja level pusat dan unit kerja, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran;
3. Memastikan kembali penjenjangan kinerja yang telah dimiliki mengacu pedoman penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis atau logical framework dan mengutamakan critical success factor (CSF) sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja;
4. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan secara aktif dan update menyampaikan pengukuran capaian kinerja, dan pimpinan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk kontrol terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;

5. Menjadikan hasil dari pengukuran kinerja masing-masing PD dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment, termasuk dalam pemberian tunjangan kinerja atau TPP;
6. Memperbaiki kualitas dokumen laporan akuntabilitas kinerja level pusat dan unit kerja, diantaranya dengan menyajikan perbandingan data realisasi kinerja terhadap data realisasi tahun lalu, target kinerja akhir periode RPJMD, dan rata-rata capaian regional maupun nasional. Selanjutnya, menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi 4 penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/rinci, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja di tahun selanjutnya;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;
8. Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan temuan dan rekomendasi agar semakin konkrit dan sesuai dengan akar permasalahan, dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap unit kerja. Selain itu, meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
9. Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala rekomendasi yang diberikan kepada PD melalui LHE internal guna memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan dalam menjawab rekomendasi tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan oleh evaluator internal;

10. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian reward and punishment kepada PD, sehingga PD dapat lebih semangat dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP kedepannya.

Beberapa rekomendasi dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, suda mulai ditindak lanjuti, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan reviu dokumen perencanaan, dalam hal perubahan target kinerja indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi;
2. Mulai Tahun 2024, hasil dari pengukuran kinerja masing-masing Perangkat Daerah dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment, termasuk dalam pemberian tunjangan kinerja atau TPP;
3. Untuk rekomendasi yang lainnya, akan dilaksanakan secara bertahap dengan pihat-pihak terkait.

2. Analis Kinerja Sasaran 2: “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi mencapai 133,231% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 29. Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,5	8,66	133,231

Sumber data: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Penilaian terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi berdasarkan IPAK yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam Dokumen

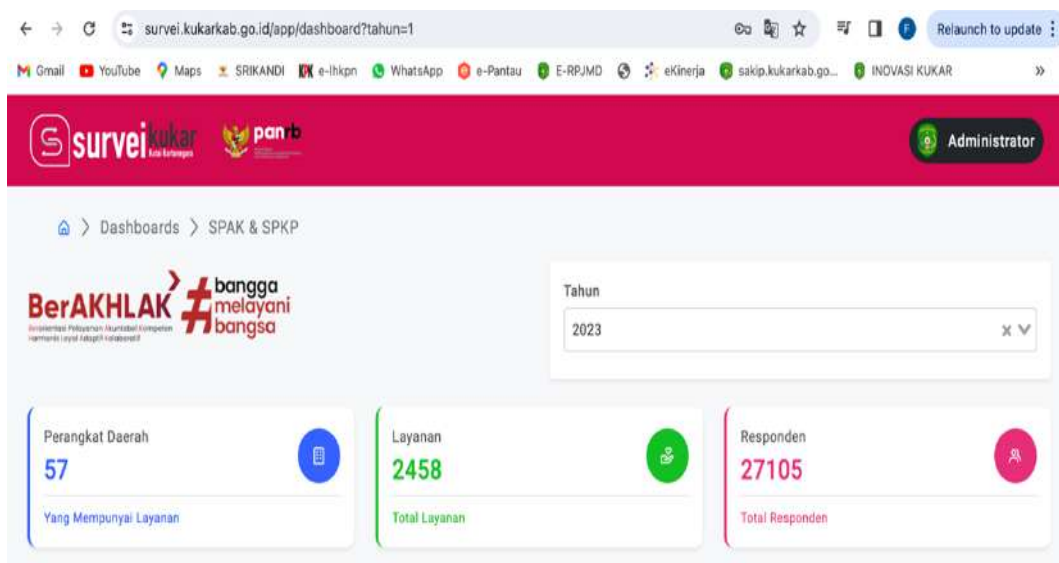
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Namun dalam LHE RB Tahun 2023 tidak mencantumkan nilai IPAK lagi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, dimana ruang lingkup surat edaran tersebut salah satunya terkait menyelenggarakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang hasilnya dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Berdasarkan surat edaran tersebut diatas, maka Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 melaksanakan SPAK melalui Aplikasi Survei Kukar dengan link akses <https://survei.kukarkab.go.id>, pelaksanaan survey di 57 (lima puluh tujuh) perangkat daerah, terhadap 2458 layanan, dengan jumlah responden 27.105 orang.

Adapun hasil penarikan data IPAK melalui Aplikasi Survei Kukar adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Jumlah Perangkat Daerah, Jumlah Layanan dan Total Responden SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023



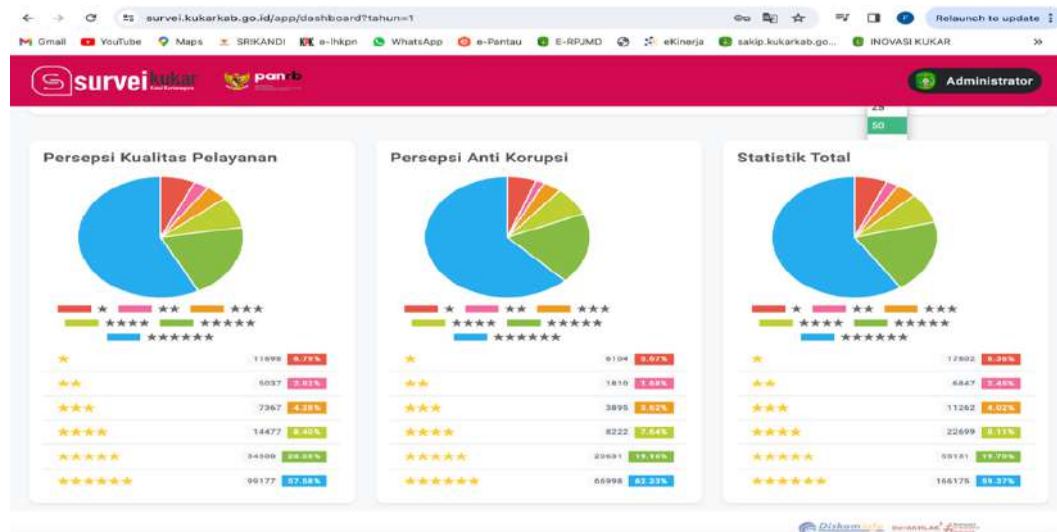
Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023

Gambar 4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023

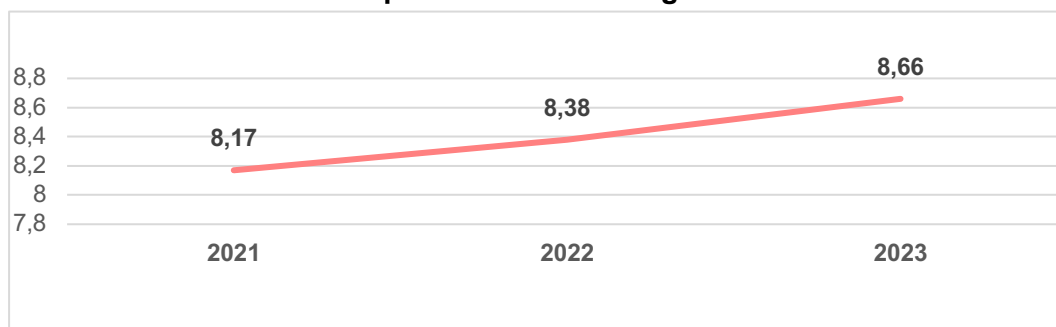
Gambar 5. Tabulasi Hasil SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023

Untuk Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, yang dilakukan melalui survey mandiri, mengalami peningkatan sebesar 0,28 jika dibandingkan dengan IPAK Tahun 2022 yang memperoleh nilai sebesar 8,38. Perkembangan IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

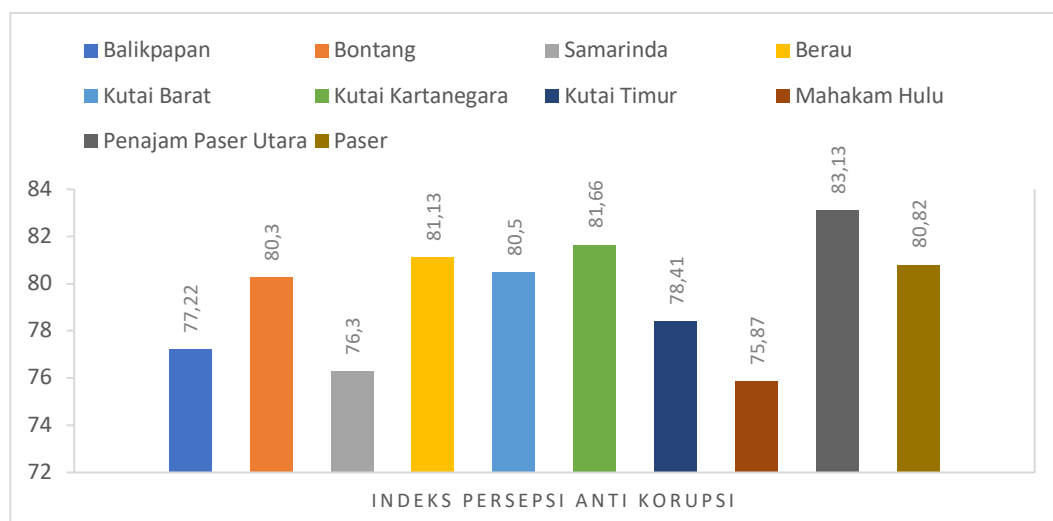
Grafik 5. IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023



Sumber: LHE RB Tahun 2021-2022 dan Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023

Karena SPAK dilaksanakan secara mandiri, sehingga tidak tersedia data IPAK Kabupaten/ Kota lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, maka dalam laporan ini hanya menyajikan perbandingan IPAK Tahun 2021. IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, menempati urutan tertinggi ke-2 se Provinsi Kalimantan Timur, capaian ini lebih rendah 1,47 poin dari Penajam Paser Utara. Berikut ini disajikan grafik Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten/ Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021:

Grafik 6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten/ Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021



Sumber data: Kementerian PANRB

Di Tahun 2023 juga dilaksanakan Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK). Dalam Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, hanya menyematkan hasil dari Survey Penilaian Integritas (SPI), sehingga data capaian diambil dari hasil survey tersebut.

Tabel 30. Hasil Survey Penilaian Integritas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

Pemda	Rata-Rata SPI			Perebandingan Tahun 2023 dengan 2022	Keterangan
	2021	2022	2023		
Bontang	62,56	74,02	74,99	0,97	Meningkat
Balikpapan	70,12	73,51	73,83	0,32	Meningkat
Samarinda	62,8	70,03	72,32	2,29	Meningkat
Paser	67,55	70,17	71,51	1,34	Meningkat
Kutai Timur	59,94	65	70,99	5,99	Meningkat
Berau	68,99	71,63	69,68	-1,95	Menurun
Mahakam Hulu	71,25	66,98	69,14	2,16	Meningkat
Kutai Kartanegara	72,06	67,22	67,69	0,47	Meningkat
Kutai Barat	71,73	73,03	64,65	-8,38	Menurun
Penajam Paser Utara	66,18	68,85	64,11	-4,74	Menurun
Provinsi Kalimantan Timur	66,35	73,04	72,71	-0,33	Menurun
Nasional	72,4	71,94	70,97	-0,97	Menurun

Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI), pada laman resmi KPK di <https://www.kpk.go.id/id/>, ada penurunan hasil SPI Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 4,84 poin di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021, dan ditahun 2023 hasil SPI Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat 0,47 point jika dibandingkan dengan hasil SPI Tahun 2022.

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 31. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	81,66	8,38	8,66	6,75	6,8	7

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2022 dan Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 32. Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	814.754.688.182,00	912.158.168.965,00	697.196.859.542,00	76,43%

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.734.926.590,00	11.614.926.590,00	10.166.466.555,00	87,53%
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	5.716.816.403,00	53,18%
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	2.306.264.672,00	61,50%
Total		835.989.614.772,00	938.273.095.555,00	715.386.407.172,00	76,25%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.715.386.407.172,00 dari anggaran sebesar Rp.938.273.095.555,00 atau 76,25%. Realisasi keuangan sebesar 76,25% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,15%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dengan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, ada beberapa rekomendasi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas, antara lain:

1. Rekomendasi 1: Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.
2. Rekomendasi 2: Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi dengan memastikan hal-hal berikut:
 - a. Menyusun kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi.
 - b. Menegakkan aturan terkait larangan dan sanksi penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten.

- c. Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi.
 - d. Membangun sistem pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.
3. Rekomendasi 3: Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif seperti audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, markup anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.;
4. Rekomendasi 4: Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut:
- a. Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Membangun mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 - d. Memastikan dan memperkuat vendor management system.
 - e. Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
 - f. Implementasi proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

5. Rekomendasi 5: Perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.;
6. Rekomendasi 6: Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut:
 - a. Memasukkan larangan dan sanksi terkait pelaksanaan tugas dalam kode etik di instansi dan/atau regulasi internal lainnya.
 - b. Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan di instansi untuk menciptakan perilaku baru dalam melaksanakan tugas.
 - c. Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi.
 - d. Menyusun program/kegiatan bagi calon pimpinan/pejabat di instansi untuk meningkatkan integritas dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat.
 - e. Membangun mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.
7. Rekomendasi 7: Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.;
8. Rekomendasi 8: Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan.;

9. Rekomendasi 9: Perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam upaya meningkatkan prosedur layanan dengan memastikan berbagai hal berikut:

- a. Penyederhanaan proses bisnis yang tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
- b. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan.
- c. Melakukan evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan."

Langkah langkah dan Upaya yang Dilakukan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi:

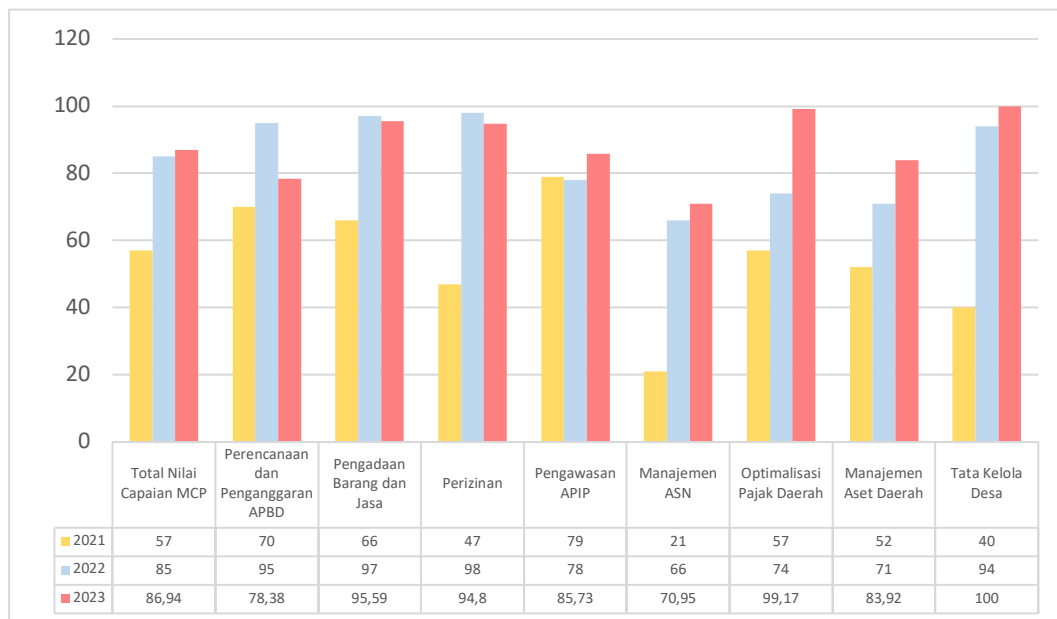
Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya.

Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, melalui 8 area intervensi yaitu (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Perizinan; (4) APIP; (5) Manajemen ASN; (6) Optimalisasi Pajak Daerah; (7) Manajemen Aset Daerah; (8) Tata Kelola Dana Desa.

Grafik 7. Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023



Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023

Hasil monitoring progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 8 area intervensi, secara keseluruhan Hasil MCP KPK Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat dari Tahun 2022 sebesar 1,94%, namun dari 8 area intervensi, ada 3 area yang mengalami penurunan nilai, yaitu area Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perizinan. Peningkatan signifikan pada area Tata Kelola Desa dari 94% di tahun 2022 menjadi 100% di Tahun 2023.

3. Analisis Kinerja Sasaran 3: "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" dengan indikator Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik mencapai 94,494% dan termasuk predikat "Berhasil" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 33. Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,9	8,41	94,494

Sumber data: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

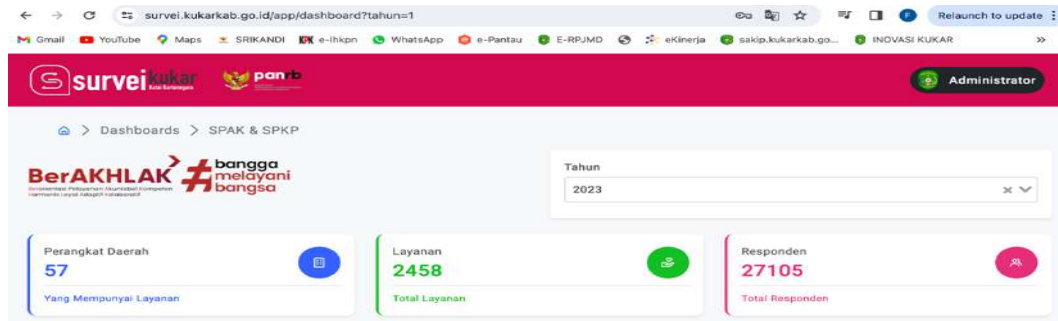
Rumus perhitungan atau Penilaian terhadap Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) berdasarkan IPKP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, dimana ruang lingkup surat edaran tersebut salah satunya terkait menyelenggarakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) yang hasilnya dalam bentuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP).

Berdasarkan surat edaran tersebut diatas, maka Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 melaksanakan SPKP melalui Aplikasi Survei Kukar dengan link akses <https://survei.kukarkab.go.id>, pelaksanaan survey di 57 (lima puluh tujuh) perangkat daerah, terhadap 2458 layanan, dengan jumlah responden 27.105 orang.

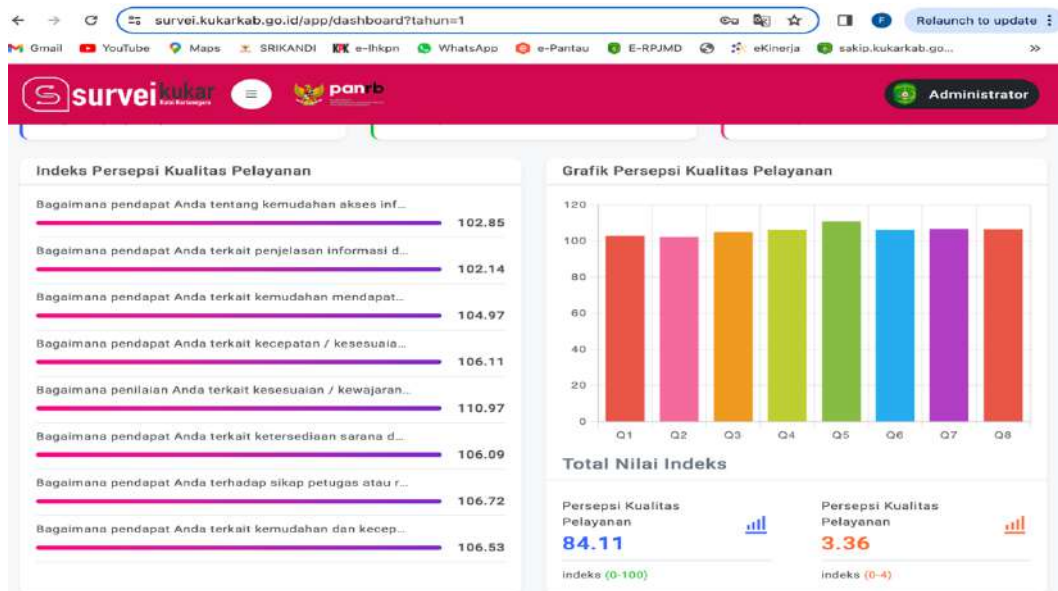
Adapun hasil penarikan data IPKP melalui Aplikasi Survei Kukar adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Perangkat Daerah, Jumlah Layanan dan Total Responden SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023

Gambar 7. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023

Capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara, sebesar 84,11 atau dikonversi dalam skala 1-10, maka capaian kinerja sebesar 8,41. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2022, IPKP oleh KemenPANRB mencapai 9,81, atau menurun sebesar 1,4 point, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD yaitu 8,90 maka capaian IPKP kabupaten sebesar 94,494%.

Dalam dokumen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, juga tersedia Capaian Indeks Pelayanan Publik dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Di Tahun 2023 Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, yang hasilnya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023.

Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, dilakukan terhadap 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Anggana, Dinas Sosial dan RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti. Berikut hasil penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2023 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 34. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

No	Kab/Kota	Rata-Rata	Kategori	Kecamatan	Dinas Sosial	RSUD
1.	Kutai Kartanegara	4,24	A-	4,18	4,3	4,24
2.	Samarinda	4,02	A-	4,37	3,23	4,47
3.	Balikpapan	4,51	A	4,55	4,48	4,49
4.	Bontang	4,11	A-	3,7	4,2	4,44
5.	Kutai Barat	3,53	B	3,07	3,58	3,94
6.	Berau	1,09	E	1,09	NA	NA
7.	Penajam Paser Utara	3,45	B-	3,72	3,28	3,34
8.	Kabupaten Kutai Timur	1,45	E	1,46	NA	1,44
9.	Kabupaten Paser	3,91	B	3,38	3,92	4,43
10.	Kabupaten Mahakam Ulu	1,82	D	2,09	1,33	2,03

Sumber: Kementerian PANRB

Di Tahun 2023 Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada 25 Kementerian, 15 Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah yang terdiri 548 Pemerintah

Daerah, dan 2 Kementerian Lembaga Vertikal (Kantor Pertanahan dan Kepolisian Resort). Untuk lokus evaluasi tingkat provinsi dilaksanakan pada 5 dinas dan 1 RSUD, sedangkan pada tingkat kabupaten/ kota evaluasi dilaksanakan pada 3 dinas, 2 puskesmas. Penilaian dilakukan tidak hanya atas pemenuhan standar pelayanan publik, namun termasuk juga penilaian persepsi maladministrasi kepada masyarakat pengguna layanan, pengukuran kompetensi penyelenggara layanan, pemenuhan sarana dan prasarana layanan, serta pengelolaan pengaduan yang ada di instansi tersebut. Seluruh penilaian tersebut akan menjadi komponen dari Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang nantinya akan menghasilkan Opini Pengawasan Pelayanan Publik.

Untuk level pemerintah daerah, dimensi penilaian mencakup:

1. Dimensi Input terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan
 - a. Pada variabel kompetensi, diukur pengetahuan pejabat dan petugas layanan mengenai komponen standar pelayanan, tugas dan kewenangan jabatan, bentuk-bentuk maladministrasi dan pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan;
 - b. Pada variabel sarana prasarana, diukur pemenuhan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan, frekuensi pengawasan internal, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta sarana prasarana dan fasilitas bagi pengguna layanan dan pengguna dengan perlakuan khusus
2. Dimensi Proses terdiri dari variabel standar pelayanan publik, yang mana pada variabel standar pelayanan diukur pemenuhan informasi standar pelayanan seperti persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, maklumat pelayanan, visi misi pelayanan, moto pelayanan, atribut dan pelayanan terpadu;

3. Dimensi Output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi, yang mana pada variabel penilaian persepsi maladministrasi diukur persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi mengenai transparansi standar pelayanan di instansi tersebut setelah selesai mengakses suatu layanan; dan
4. Dimensi Pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan, yang mana pada variabel pengelolaan pengaduan, diukur kewajiban pengelolaan pengaduan, pemenuhan sarana pengaduan, pembinaan terhadap pengelola pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan dan informasi jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Puskesmas Loa Ipuh, Puskesmas Loa Kulu. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara, yang menjadi objek penilaian terdiri dari 4 (empat) Dinas dan 2 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan rincian:

1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Substansi Perizinan dan Administrasi Kesehatan);
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Substansi Administrasi Kependudukan);
3. Dinas Sosial (Substansi Sosial);
4. Puskesmas Loa Ipuh (Substansi Jasa Kesehatan); dan
5. Puskesmas Loa Kulu (Substansi Jasa Kesehatan).

Hasil Penilaian merupakan penggabungan atas penilaian kompetensi penyelenggara, Standar Pelayanan dan Sarana Prasarana, Presepsi Maladministrasi, dan Pengelolaan Pengaduan. Penggabungan penilaian tersebut menghasilkan angka persentase akhir untuk masing-masing

penyelenggara pelayanan dengan hasil kategorisasi penilaian akhir sebagai berikut:

Tabel 35. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

Interval Nilai	Kategori	Zonasi	Opini
88.00 – 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia

Adapun nilai akhir untuk Pemkab Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebesar 94,46 (Zona Hijau) dengan kategori A (Kualitas Tertinggi), hasil tersebut meningkat 11,62 dari hasil Tahun 2022 dengan nilai 82,84 dengan kategori B (Kualitas Tinggi) dan mendapatkan Zona Hijau (detail rapor penilaian terlampir):

Tabel 36. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

No	Unit Layanan	Dimensi Pelayanan				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1.	Puskesmas Loa Ipuh	20,76	29,06	21,33	20,43	91,59
2.	Puskesmas Loa Kulu	20,74	29,06	21,33	21,54	92,67
3..	Dinas Sosial	21,41	31,03	21,33	21,01	94,78
4.	Disdukcapil	23,01	31,03	20,92	21,54	96,50
5.	DPMPTSP	21,87	32,37	20,97	21,54	96,75
Nilai Akhir						94,46
Zona						Hijau
Kategori						A
Opini						Kualitas Tertinggi

Sumber: Ombudsman, 2023

Dari 5 (lima) Unit Layanan yang dievaluasi pada Tahun 2023, ada 3 (tiga) unit layanan yang merupakan unit layanan yang menjadi sampling pada evaluasi Tahun 2022, berikut perbandingan hasil evaluasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022.

Tabel 37. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

No	Unit Layanan	Dinas Sosial		Disdukcapil		DMPTSP	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Input	12,50	21,41	17,04	23,01	18,26	21,87
2.	Proses	11,70	31,03	30,28	31,03	31,11	32,37
3.	Output	20,14	21,33	20,74	20,92	21,41	20,97
4.	Pengaduan	13,49	21,01	19,34	21,54	21,07	21,54
Nilai		57,83	94,78	87,40	96,50	91,86	96,75

Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, adapun hasil penetapan capaian adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Pemerintah Daerah	Urutan Nasional	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1	Kalimantan Timur	9	91,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2	Samarinda	19	93,11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3	Balikpapan	39	90,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4	Bontang	48	88,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5	Kutai Kartanegara	37	94,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6	Kutai barat	135	87,56	Hijau	B	Kualitas Tinggi
7	Penajam Paser Utara	155	86,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
8	Paser	234	81,22	Hijau	B	Kualitas Tinggi
9	Berau	257	79,57	Hijau	B	Kualitas Tinggi
10	Kutai Timur	322	70,85	Kuning	C	Kualitas Sedang
11	Mahakam Ulu	348	62,27	Kuning	C	Kualitas Sedang

Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, mulai Tahun 2023, melalui Aplikasi Survei Kukar, juga dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan survey di 57 (lima puluh tujuh) perangkat daerah, terhadap 2458 layanan, dengan jumlah responden 27.105 orang, dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah 88,368 dengan Predikat Sangat Baik. Adapun nilai IKM perunsur terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 39. Hasil IKM Per Unsur Pelayanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Rata-Rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,493
U2	Prosedur Pelayanan	3,455
U3	Kecepatan Pelayanan	3,373
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,903
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,402
U6	Kompetensi Petugas	3,447
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,5
U8	Penanganan Pengaduan	3,799
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,441

Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023

Dari hasil survey diatas, diketahui 3 (tiga) unsur pelayanan terendah yang harus menjadi perhatian dan untuk segera dibenahi, yang pertama unsur kecepatan pelayanan dengan nilai rata-rata 3,373, dapat diartikan pelayanan yang diberikan petugas masih dinilai lambat oleh masyarakat, unsur terendah ke dua adalah unsur kesesuaian pelayanan dengan nilai 3,402 dan unsur terendah ke tiga adalah unsur kualitas sarana dan prasarana pelayanan dengan nilai rata-rata 3,441. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023, hendaknya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Menyusun Langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 40. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	9,81	8,41	8,95	9	9,05

Sumber data: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 41. Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	19.534.555.670,00	34.407.595.670,00	33.310.902.001,00	96,81
2	Program Pendaftaran Penduduk	825.000.000,00	1.081.800.000,00	781.548.442,00	72,25
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	475.000.000,00	475.000.000,00	192.539.458,00	40,53
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	160.000.000,00	160.000.000,00	98.704.826,00	61,69
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	700.000.000,00	6.030.445.366,00	5.521.091.860,00	91,55
Total		21.694.555.670,00	42.154.841.036,00	39.904.786.587,00	94,66

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.39.904.786.587,00 dari anggaran sebesar Rp. 42.154.841.036,00 atau 94,66%. Realisasi keuangan sebesar 94,66% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94,494%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih tinggi dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Adanya komitmen dan atensi dari kepala daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan meluncurkan program prioritas yaitu Program Disapa (Program Digitalisasi Pelayanan).
2. Masih terbatasnya pengetahuan dari perangkat daerah tentang bagaimana bentuk, cara membuat dan menyusun serta menerapkan standar pelayanan.
3. Kebiasaan perangkat daerah yang sudah terbentuk lama terkadang tidak sesuai dengan standar pelayanan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan.

4. Kompetensi petugas pelayanan belum merata dimiliki seluruh ASN yang memberikan pelayanan sehingga belum maksimal dalam memberika pelayanan yang lebih baik dan cepat, serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih memiliki standar yang berbeda-beda antara perangkat daerah.

Bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Sejak 2021 sampai saat ini, setiap kepala perangkat daerah diwajibkan membuat inovasi minimal 1 inovasi setiap tahunnya, dan diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.
2. Simultan dengan kewajiban kepala perangkat daerah dalam berinovasi, sejak 2021 telah dilaksanakan Pekan Inovasi setiap tahunnya. Pada Pekan Inovasi Tahun 2022 sebanyak 127 inovasi, yang terbagi dalam 8 kategori inovasi, yaitu Kategori perangkat daerah, kategori kecamatan, kategori kelurahan dan desa, kategori pendidikan, kategori kelompok perempuan, kategori penyandang disabilitas, kategori puskesmas. Bentuk reward bagi pemenang inovasi berupa penambahan anggaran perangkat daerah, pemberian hadiah uang tunai dan beasiswa Pendidikan bagi penyandang disabilitas.
3. Di Tahun 2023 juga telah dibangun Aplikasi "DISAPA IDAMAN", yaitu sebuah aplikasi online khusus pelayanan di kecamatan dan kelurahan, serta menjadi pintu akses kepada seluruh pelayanan online yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Aplikasi ini dibangun untuk mengatasi kondisi geografis, memberikan pelayanan jauh lebih mudah, cepat dan murah kepada masyarakat. Penekanan pelayanan yang murah lebih dititik beratkan pada murahnya cost yang harus dikeluarkan masyarakat dalam menerima pelayanan, karena tidak perlu mendatangi kantor/ unit pelayanan, dan di Tahun 2024 telah dibuat pengembangan Aplikasi Disapa Idaman V2, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara online di Kutai Kartanegara.

4. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui bimtek pelayanan publik bagi seluruh perangkat daerah.

4. Analisis Kinerja Sasaran 4 : "Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan" dengan indikator Indeks Pendidikan & Indeks Pembangunan Kebudayaan mencapai 101,41% dan termasuk predikat "Sangat Berhasil" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,697	0,679	97,418
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	50,5	53,23	105,406
Rata-Rata Capaian					101,412

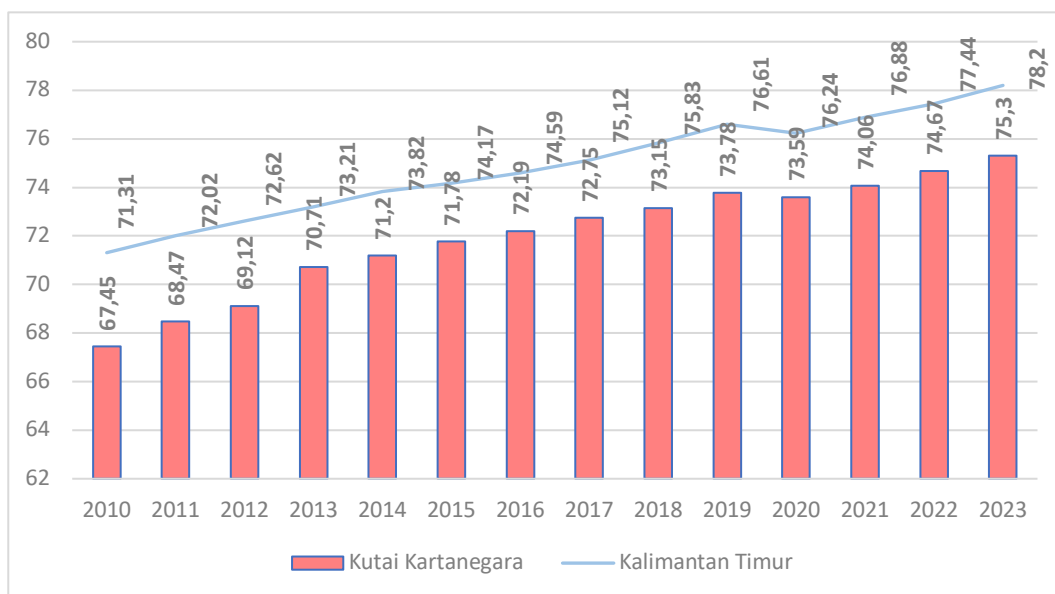
Salah satu indeks komposit yang digunakan sebagai indikator kinerja pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat di suatu wilayah. Menurut UNDP, pembangunan manusia hanya dapat direalisasikan bila penduduk dalam suatu wilayah tertentu setidaknya memiliki peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan keterampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif sehingga memiliki daya beli. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indeks tersendiri. Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator umur harapan hidup (*expectancy of life at birth*)

yang menghasilkan indeks kesehatan. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan indikator harapan lama sekolah dari penduduk usia 7 tahun ke atas yang menghasilkan indeks pengetahuan. Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan yang menghasilkan indeks pendapatan.

Perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2010-2023 terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat di Gambar 20. Dengan menggunakan metode baru, pada tahun 2010 IPM Kutai Kartanegara hanya mencapai 67,45, sementara IPM Provinsi Kalimantan Timur mencapai angka yang lebih tinggi 71,31. Pada tahun 2023 IPM Kutai Kartanegara meningkat 7,85 point menjadi 75,3. Selama periode 2010-2022 IPM Kutai Kartanegara selalu lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Timur. Kendati demikian, jika dilihat dari pertumbuhannya, IPM Kutai Kartanegara tumbuh sedikit lebih cepat dibandingkan IPM Kaltim. Selama periode 2010-2023, IPM Kutai Kartanegara tumbuh 11,16 persen sementara IPM Kaltim hanya tumbuh di kisaran 10,96 persen.

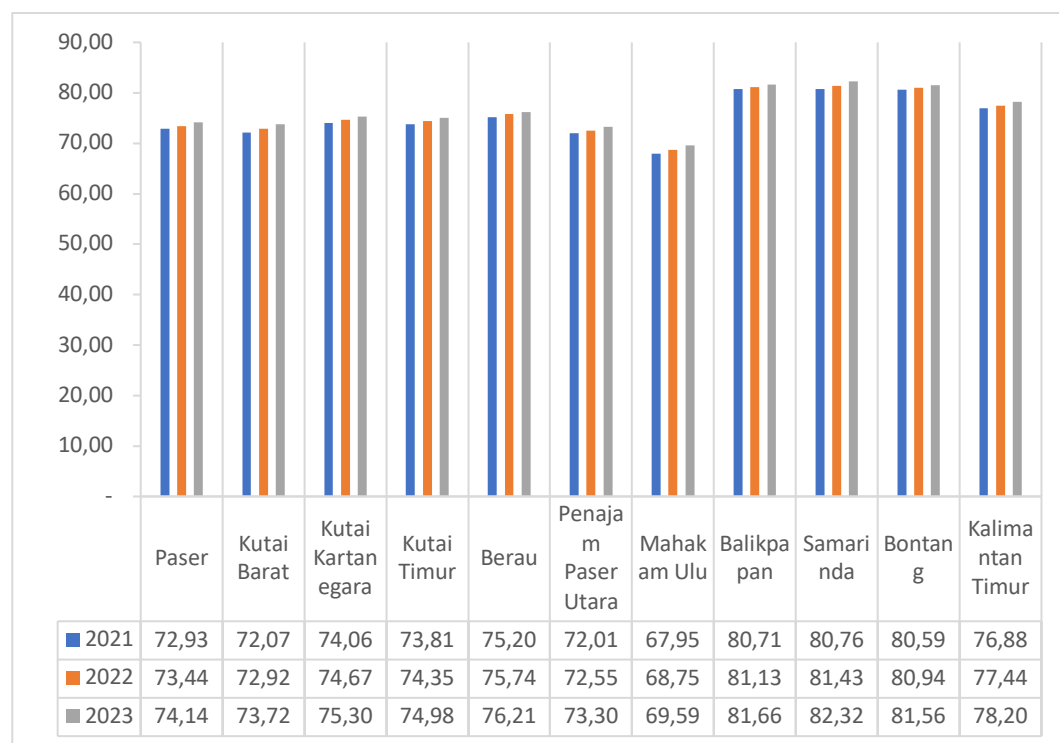
Grafik 8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2023



Sumber: BPS Kutai Kartanegara

Posisi relatif pencapaian IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara dibandingkan dengan Kabupaten Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur selama 3 tahun terakhir ditunjukkan oleh Grafik 2.3.6. Terlihat bahwa posisi pencapaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mengalami pergeseran, berada pada peringkat yang sama, tertinggi ke-5. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan upaya peningkatan angka IPM sebagaimana Kabupaten Kutai Kartanegara. Pergeseran peringkat IPM justru terlihat di wilayah dengan angka IPM yang lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 9. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2020 - 2023



Sumber: BPS Kutai Kartanegara

Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara mengambil Indikator Indeks Pendidikan dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan. Adapun penjelasan capaian indikator kinerja sasaran tersebut sebagai berikut:

1. Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah, namun perubahan terjadi pada indikator pembentuk indeks pengetahuan, yaitu penggunaan indikator harapan lama sekolah sebagai pengganti indikator melek huruf. Angka melek huruf mayoritas wilayah sudah berada pada capaian yang tinggi sehingga sudah tidak sensitif dan tidak relevan lagi dalam mengukur kualitas pendidikan.

Pada Tahun 2010 dalam komponen pengukuran Indeks Pembangunan Manusia, Indeks terendah dicapai oleh indeks pengetahuan, yang hanya mencapai angka 57,79. Pada tahun 2022 indeks pengetahuan meningkat 10,87 poin menjadi 68,66. Kendati memiliki nilai terendah, tetapi pertumbuhan indeks pengetahuan merupakan pertumbuhan tercepat dibanding indeks yang lain. Selama 12 tahun, indeks pengetahuan mampu tumbuh 10,87 persen.

Indeks Pendidikan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan

$I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

I_{RLS} = Indeks Rata – rata Lama Sekolah

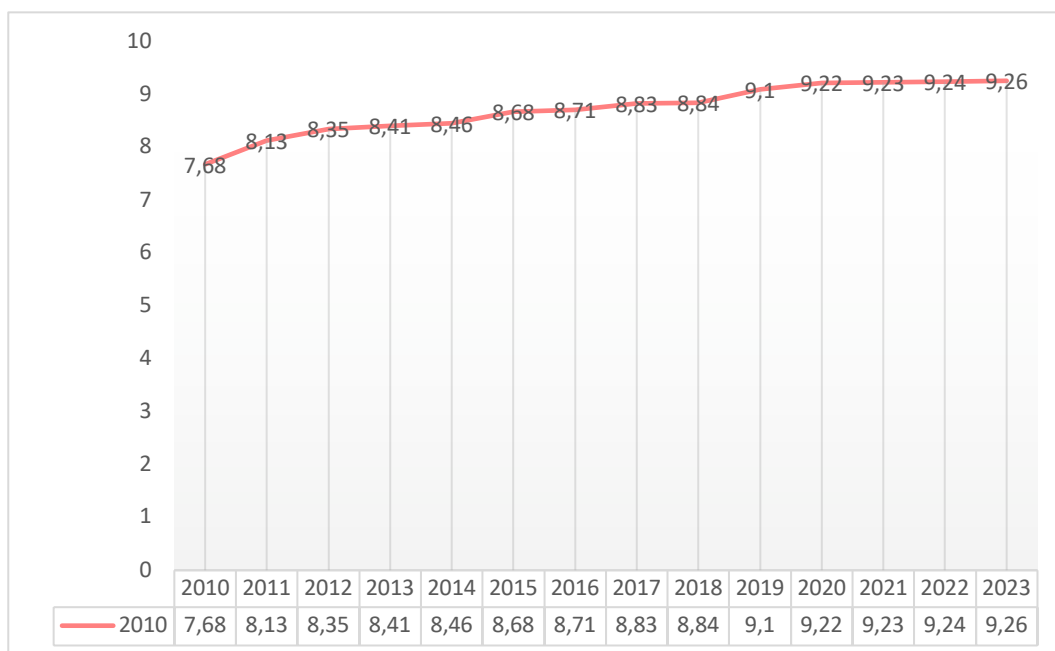
$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Komponen dimensi pengetahuan dalam pembangunan manusia dihitung dengan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah tiap jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Cakupan penghitungan angka HLS adalah penduduk umur 7 tahun ke atas. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Grafik 10. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2023

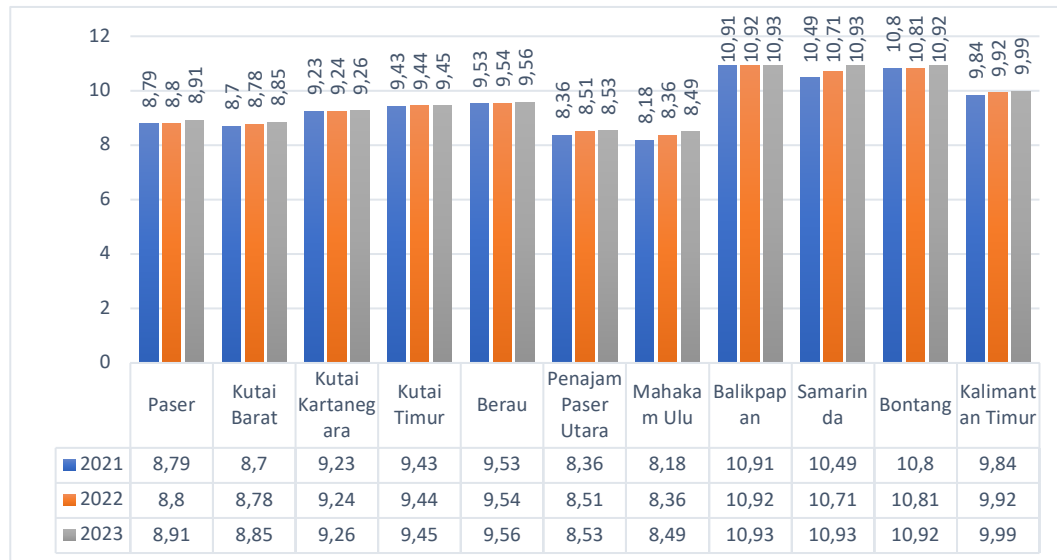


Sumber: BPS Kutai Kartanegara

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Selama periode 2010-2022 angka RLS mampu tumbuh 20,31 persen. Pada tahun 2010 penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata menjalani Pendidikan formal selama 7,68 tahun atau setara hingga kelas 1 SMP.

Angka ini terus meningkat hingga 9,26 tahun di Tahun 2023 atau setara hingga 3 SMP. Capaian Tahun 2023 meningkat 0,02 dari 9,24 tahun di Tahun 2022. Angka RLS meningkat rata-rata 0,13 poin per tahun atau tumbuh sekitar 1,57 persen per tahun.

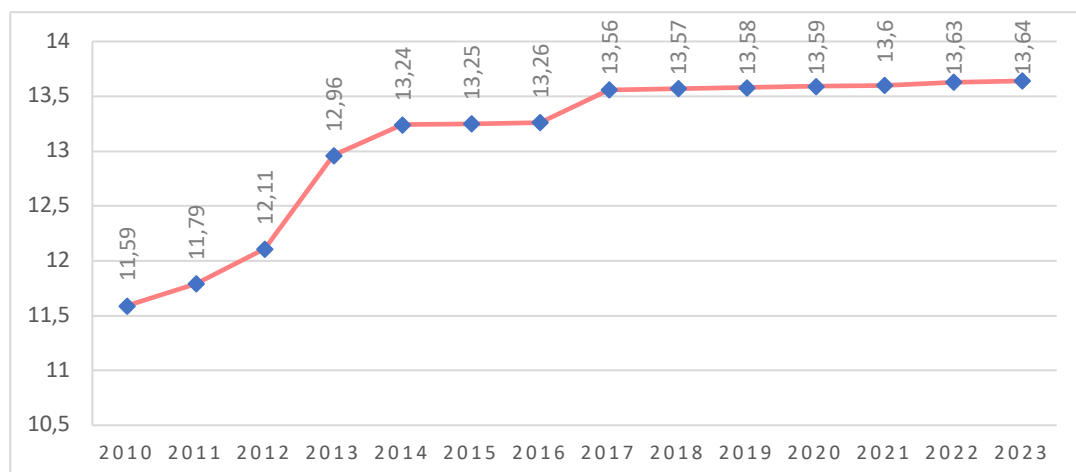
Grafik 11. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2023



Sumber: BPS Kutai Kartanegara

Indikator harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah. Meskipun HLS terus meningkat namun terlihat pola peningkatan yang sedikit berbeda dengan peningkatan RLS. Angka HLS meningkat cukup signifikan pada periode 2010-2014, namun setelah periode tersebut HLS terlihat mengalami pertumbuhan yang pelan, bahkan di periode 2017-2023 cenderung stagnan.

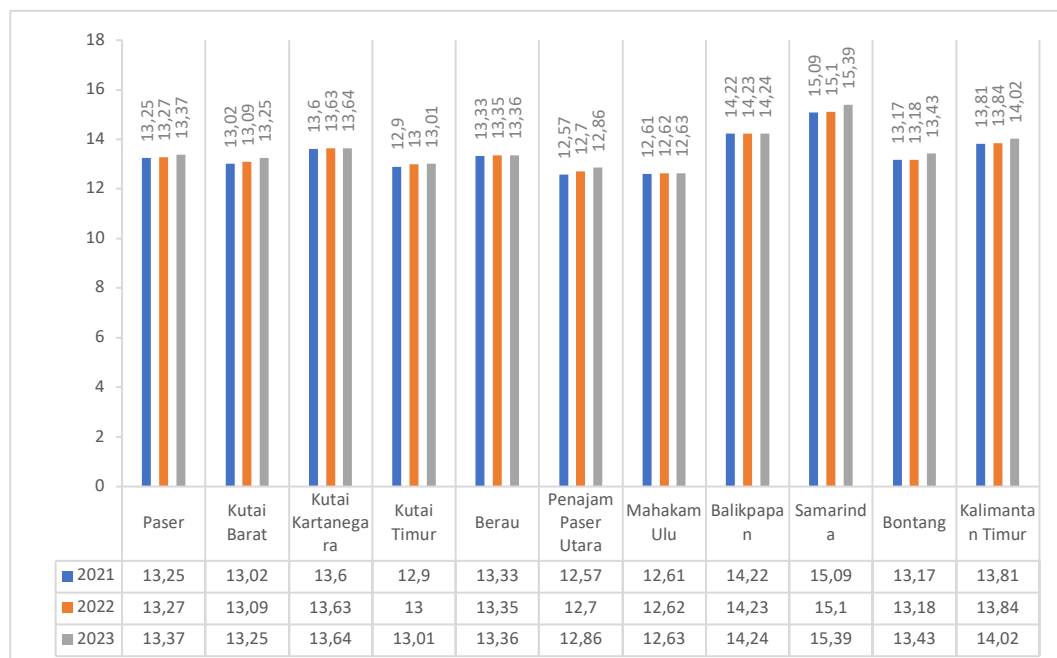
Grafik 12. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2023



Sumber: BPS Kutai Kartanegara

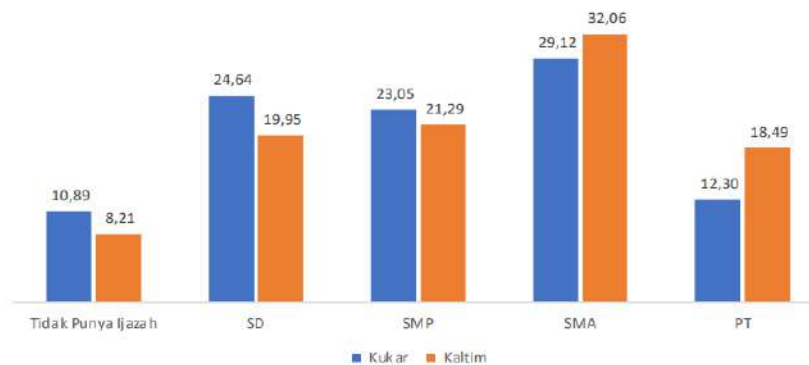
Keberhasilan pencapaian Pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut ijazah tertinggi yang dimiliki. Terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah dari tingkat pendidikan rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tingkat pendidikan yang rendah (SMP ke bawah) persentase penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara (58,58 persen) lebih banyak daripada persentase penduduk di Provinsi Kalimantan Timur (49,45 persen). Sebaliknya, persentase penduduk yang memiliki ijazah SMA dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara justru lebih sedikit dibanding Provinsi Kalimantan Timur. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara berturut-turut sebesar 29,12 persen dan 12,30 persen. Sementara di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 32,06 persen (SMA) dan 18,49 persen (Perguruan Tinggi).

Grafik 13. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2023



Sumber: BPS Kutai Kartanegara

Grafik 14. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, 2021



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan penjelasan diatas maka Indeks Pendidikan/ Indeks Pengetahuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, diperoleh dengan perhitungan:

$$I_{pendidikan} = 0,679$$

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Adapun capaian Dimensi penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Ekonomi Budaya

Terdapat 34% penduduk usia 15 tahun ke atas yang sumber penghasilannya berasal dari keterlibatan mereka sebagai pelaku pertunjukan seni. Adanya peningkatan persentase



cukup menggambarkan bagaimana kesenian di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pelaku/pendukung seni. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, adanya insentif dan beasiswa pelatihan sejak tahun 2023 perlahan mendorong kemandirian pelaku kesenian untuk berdaya dan mengembangkan taraf ekonominya. Berdasarkan persentase tersebut, sejumlah pelaku kesenian di Kutai Kartanegara mulai menjadikan seni sebagai penghasilan utama. Meski demikian, pendukungan dalam hal manajemen pertunjukan, sponsorship, publikasi, hingga promosi perlu ditingkatkan

b. Dimensi Pendidikan

Indeks dimensi pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun ini berada di bawah capaian pada tahun 2022. Terdapat enam (6) indikator penyusun dimensi ini dengan nilai tertinggi pada “persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun. dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah” yaitu 93,75 dan indikator terendah adalah “persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah” yaitu 50.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Kartanegara per tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan pada

angka 9,24 tahun (61,60%) atau lulus SMP kelas 9 dan putus sekolah saat masih di kelas 10 SMA. Perlu usaha yang cukup keras agar dapat memenuhi target 15 tahun atau sampai lulus kuliah Diploma III.

Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Kartanegara masih stagnan per tahun 2023 yaitu di angka 13,6 tahun atau 75,56 %. Pentingnya peranan dari pemerintah daerah untuk mendorong agar penduduknya dapat bersekolah hingga target 18 tahun atau setara Strata 1.

Angka kesiapan sekolah menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD, terhadap seluruh siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD. Capaian Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 79,50 %. Angka penurunan yang cukup signifikan ini kemungkinan disebabkan oleh pertumbuhan negatif ekonomi rumah tangga pada masyarakat berpenghasilan rendah, faktor lingkungan, dan sebagainya.

Terdapat 34,39 persen satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki guru yang mengajar mata pelajaran muatan lokal dan kesenian. Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan muatan lokal bahasa daerah ke sekolah dasar dan menengah pertama. Adapun guru-guru yang telah memperoleh pelatihan sejak tahun 2022, mulai mengampu mata pelajaran tersebut pada tahun ajaran 2023/2024. Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk memasukkan mata pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Kutai ke Sekolah Menengah Atas.

Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah mengalami penurunan di angka 50%. Data ini diperoleh dari hasil Survei Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2022, sehingga penurunan angka tersebut disebabkan oleh adanya siswa penyandang disabilitas yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya per tahun ini.

Capaian pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah (termiskin) adalah 93,75, sedikit meningkat dari perhitungan tahun sebelumnya. Pemerintah telah cukup baik melakukan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk seluruh lapisan ekonomi penduduk dengan pemberian beasiswa di sekolah-sekolah negeri dan kemudahan fasilitas lainnya.

c. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Kerukunan antar umat beragama dan antar suku serta rendahnya angka kriminalitas jalanan merupakan modal sosial-kultural yang berperan penting dalam menjaga stabilitas pembangunan dan menunjang pembangunan kebudayaan daerah.

Pada dimensi ketahanan sosial budaya yang terdiri atas delapan dimensi ini, indikator persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal menyumbang angka terbesar (94.33 persen).

Keempat nilai indikator mencerminkan adanya kerukunan dalam kehidupan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara walau berbeda agama dan suku, tidak ada halangan dalam melakukan kegiatan dan bersahabat dengan suku dan agama lain. Menurut hasil wawancara dengan Bagian Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, suku yang mendiami wilayah ini cukup beragam yang terdiri dari Kutai, Jawa, Sasak, Toraja, Bali, Padang, Batak, Dayak, Madura, Banjar, Bakumpai, Bugis, Makassar, NTT, Manado, Bima, Maluku, Buton, Sunda, Tionghoa, dll. Beragam suku tersebut hidup berdampingan secara rukun di Kutai Kartanegara, tanpa pernah menimbulkan konflik yang eskalatif.

Demikian pula dengan kerukunan umat beragama antara penganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, kepercayaan lokal, dan lain sebagainya hidup berdampingan dengan rukun. Hal ini tidak lepas dari usaha pemerintah daerah untuk selalu menyuarakan pembinaan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, pengembangan moderasi beragama, serta pembangunan akhlak bangsa.

Sebanyak 90,67 persen penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang berumur 10 tahun ke atas mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir, misalnya pengajian-pengajian, bakti sosial, peringatan hari besar, dan lain-lain. Nilai indikator ini jauh lebih baik dari capaian tahun sebelumnya, di mana menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan ruang yang cukup luas bagi masyarakat melakukan kegiatan sosial.

Capaian Kabupaten Kutai Kartanegara pada indikator ini meningkat ketimbang tahun sebelumnya yaitu pada angka 68,23 % penduduk yang masih melakukan gotong royong di lingkungannya. Perlu meningkatkan kohesi sosial agar masyarakat makin berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Budaya ini perlu ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan sosial budaya di tengah kemajemukan masyarakat.

Masih terdapat 39,38 persen rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari. Meski lebih baik ketimbang tahun sebelumnya, pemerintah dan pihak keamanan perlu meningkatkan keamanan agar nilai ini dapat diturunkan.

Hanya 59,61 persen masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga, sehingga jika harus bepergian harus ada anggota keluarga lain yang tetap berada di rumah.

Pemerintah perlu melakukan upaya pengamanan agar nilai indikator ini dapat ditingkatkan.

d. Dimensi Warisan Budaya

Sejarah dan peradaban panjang di Kutai Kartanegara meninggalkan banyak warisan budaya yang patut dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Dimensi keempat



ini terdiri dari enam indikator penyusun, di mana “persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni terbesar” (98,31). Enam indikator tersebut dipaparkan sebagai berikut:

Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebagai Cagar Budaya yaitu 12,12%. Pada tahun 2023, terdapat 12 dari total 99 objek arkeologis teregistrasi yang kini berstatus Cagar Budaya di kabupaten yang berjuluk Banua Etam.

Pada akhir tahun 2022, terdapat tiga karya budaya dari Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Total WBTB Kutai Kartanegara per tahun 2023 adalah 19. Adanya penurunan persentase disebabkan oleh bertambahnya jumlah karya budaya sebanyak 60 yang telah diregistrasi. Perhatian pemerintah perlu ditingkatkan dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan untuk pemajuan kebudayaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Hanya 38,26 persen penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang menggunakan bahasa daerah baik di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari. Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat banyak suku

yang mendiami seluruh kecamatan dan terjadi akulturasi bahasa dan kebiasaan dikarenakan perkawinan, sehingga Bahasa yang digunakan pun menjadi bahasa Indonesia. Hanya perkawinan antar suku dan komunitas dengan suku yang sama yang menggunakan bahasa daerah sukunya. Adanya upaya pemerintah memasukkan muatan lokal bahasa daerah ke institusi pendidikan tingkat dasar dan menengah perlu diapresiasi. Harapannya, pada tahun mendatang, penggunaan bahasa daerah makin meningkat di tengah kehidupan masyarakat.

Antusiasme penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara usia 10 tahun ke atas ditunjukkan dengan capaian 68,82 persen yang menonton pertunjukan seni bahkan hampir mencapai target 70 persen. Festival-festival tahunan rutin dilaksanakan dari level kabupaten sampai kecamatan, antara lain TIFAF, Festival Kota Raja, Erau, Peringatan Peristiwa Merah Putih, festival tingkat kecamatan, dan masih banyak lainnya sebanyak kurang lebih 100 event di tahun 2023.

Peningkatan kunjungan peninggalan sejarah pada tahun 2023 sangat drastis, di mana terdapat 29,23 persen dari target 30 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Museum Mulawarman menyumbang angka pengunjung terbanyak. Perlu menarik makin banyak kunjungan dari wisatawan luar Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur melalui berbagai event sejarah dan budaya, sehingga dapat memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, sekaligus memperkuat dimensi warisan budaya.

Capaian indikator rumah tangga yang menggunakan produk tradisional di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 83,04 persen. Hal ini menunjukkan masih banyak rumah tangga yang kesehariannya menggunakan peralatan rumah tangga tradisional, membuat masakan dan jajanan khas daerah, hingga menggunakan pakaian tradisional di tempat kerja. Pemerintah perlu memberikan stimulan agar dapat mencapai target 95 persen.

e. Dimensi Ekspresi Budaya

Kebebasan berekspresi dan berpendapat termasuk dalam bidang kebudayaan merupakan hak dasar manusia. Pada dimensi kelima mengenai ekspresi budaya memuat kebebasan manusia untuk mengekspresikan budaya di ruang publik, terdapat empat indikator penyusun sebagai berikut:



Penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat (65,67 persen) menjadi indikator penyumbang terbesar pada dimensi ini. Hal ini menandakan diterapkannya demokrasi secara menyeluruh di forum-forum publik yang diadakan oleh pemerintah daerah Kutai Kartanegara hingga ke level RT/RW dan forum-forum warga lainnya. Proses tukar pendapat antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berasas pada keadilan. Sebab, musyawarah mufakat merupakan budaya masyarakat Indonesia yang termuat dalam sila keempat Pancasila.

Capaian pada tahun 2023 meningkat cukup tipis ketimbang tahun sebelumnya. Perlu upaya cukup keras dari pemerintah agar penduduk usia 10 tahun ke atas aktif mengikuti kegiatan organisasi baik di sekolah dan di masyarakat.

Hanya 18,14 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni. Pemerintah perlu upaya ekstra untuk membuat pertunjukan seni yang lebih menarik agar menambah jumlah penduduk yang berkecimpung di dalamnya.

Hanya 21,13 persen rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan upacara adat. Upacara yang masih dilakukan adalah upacara pernikahan, tujuh bulanan, dan pemberian nama

(tasmiyah). Hal ini membutuhkan perhatian pemerintah untuk mencapai target 45 persen.

f. Dimensi Budaya Literasi

Aktivitas literasi dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat termuat dalam dimensi budaya literasi. Dimensi ini didukung oleh tiga indikator, yaitu:

Hanya 18,54 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir pada tahun 2023. Meski angka ini meningkat ketimbang tahun sebelumnya, perlu upaya keras pemerintah untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Dari tiga indikator pembentuk dimensi ini, penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet 76,43 persen menjadi indikator tertinggi. Penetrasi internet memang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tidak terkecuali di Kutai Kartanegara. Internet dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer masyarakat saat ini yang mempermudah akses informasi dan pengetahuan, sarana komunikasi, kemudahan bisnis, hingga hiburan. Internet juga membuat masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara terhubung dengan komunitas lain di Indonesia bahkan dunia.

Namun yang perlu diperhatikan dari dimensi ini adalah rendahnya penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat hanya 8,64 persen. Menurut data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kutai Kartanegara, jumlah kunjungan Perpustakaan Daerah memang mencapai ribuan setiap tahun, tetapi perpustakaan di tingkat desa/kelurahan sangat sedikit didatangi pembaca.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya referensi buku bacaan yang tersedia, minimnya jumlah pustakawan, dan belum masifnya sosialisasi kepada masyarakat.

g. Dimensi Kesetaraan Gender

Dimensi gender menjadi dimensi terakhir dalam penyusunan IPK. Dimensi ini mengakomodir persamaan hak, tanggung jawab, serta peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki di ruang publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Ketiga indikator penyusun dimensi ini membandingkan keterlibatan perempuan terhadap laki-laki pada beberapa bidang yaitu pekerjaan, pendidikan, dan politik yang diuraikan sebagai berikut:

Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 51 orang perempuan dari 100 orang laki-laki yang bekerja pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan, tetapi pemerintah perlu berupaya meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan untuk meningkatkan rasio agar setara dengan jumlah laki-laki yang bekerja.

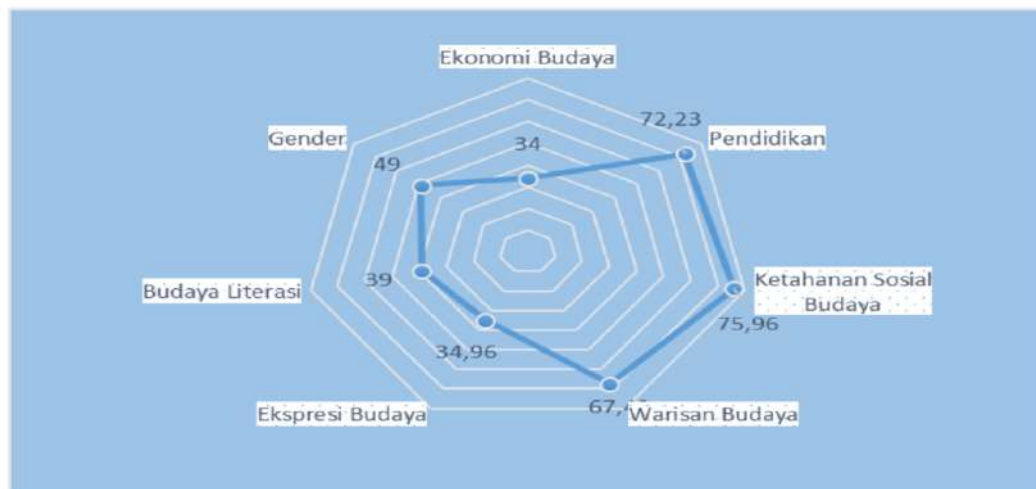
Indikator rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat (78 persen) memberikan sumbangan terbesar dalam membentuk dimensi ini. Angka yang cukup tinggi pada indikator ini menunjukkan adanya kemudahan akses bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterbukaan ruang bagi perempuan untuk berdaya saing dengan laki-laki di bidang pendidikan sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan di tengah budaya patriarki yang masih mengakar di sebagian komunitas masyarakat.

Ada sekitar 18 orang perempuan dari 100 orang laki-laki yang menjadi anggota legislatif di Kutai Kartanegara. Rasio ini masih sama dengan tahun sebelumnya, namun perlu inisiatif baik bagi partai politik untuk mendorong keterlibatan perempuan lebih jauh demi memajukan demokrasi.

Berdasarkan ulasan per-indikator, terdapat 6 (enam) dimensi yang memiliki nilai indeks lebih tinggi dibanding tahun 2022, yaitu Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Sedangkan dimensi pendidikan berada di bawah

angka tahun 2022. Nilai indeks Ekonomi Budaya dan Warisan Budaya mengalami peningkatan signifikan ketimbang tahun sebelumnya.

Grafik 15. Indeks Dimensi IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023



Sumber: Laporan IPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

Apabila menilik nilai dimensi pada gambar di atas, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara dimensi yang satu dengan lainnya. Dimensi dengan hasil tertinggi adalah Ketahanan Sosial Budaya (75,96) dan Pendidikan (72,23). Tingginya nilai Ketahanan Sosial Budaya menggambarkan kemajemukan masyarakat di Kutai Kartanegara dapat dikelola dengan baik, sehingga kohesi sosial antar masyarakat yang berbeda agama, suku, dan ras cukup kuat. Sedangkan, tingginya nilai indeks dimensi pendidikan menunjukkan cukup mapannya sarana prasarana dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai aspek yang menunjang pembangunan dan transformasi kebudayaan. Sedangkan nilai dimensi Ekonomi Budaya menghasilkan nilai indeks terendah (34,00) yang menunjukkan bahwa masih terbukanya peluang untuk mengembangkan aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Adapun per tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan insentif dan beasiswa pelatihan bagi pelaku seni untuk mendorong kemandirian agar mampu berdaya saing dan meningkatkan taraf ekonomi.

Grafik 16. Pebandingan IPK Kabupaten Kutai Kartanegara dengan IPK Kalimantan Timur



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara

Gambar di atas menunjukkan enam (6) dimensi yang memiliki nilai indeks di atas angka provinsi yaitu Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Sementara satu (1) dimensi lainnya yakni pendidikan menghasilkan nilai yang berada di bawah angka tahun 2022. Berdasarkan capaian tersebut, masih terbuka peluang untuk meningkatkan nilai beberapa indikator dan dimensi untuk mendorong lahirnya kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 42. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,687	0,679	0,7	0,704	0,706
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n.a	47,42	53,23	51	51,5	53

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 43. Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	537.303.097.437,00	1.143.789.702.902,00	764.984.024.561,00	66,88%
2	Program Pengembangan Kurikulum	450.000.000,00	2.828.012.000,00	999.195.625,00	35,33%
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	250.000.000,00	250.000.000,00	96.507.640,00	38,60%
4	Program Pengembangan Kebudayaan	11.529.620.000,00	22.714.620.000,00	18.173.034.582,00	80,01%
5	Program Pemberdayaan Sosial	5.091.000.000,00	7.137.879.500,00	5.992.262.500,00	83,95%
6	Program Rehabilitasi Sosial	7.907.600.000,00	6.877.600.000,00	5.960.872.171,00	86,67%
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.373.600.000,00	12.640.941.000,00	8.870.476.080,00	70,17%
8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	57.102.070.467,00	110.746.551.891,00	104.423.984.854,00	94,29%
Total		629.006.987.904,00	1.306.985.307.293,00	909.500.358.013,00	69,59%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.909.500.358.013,00 dari anggaran sebesar Rp.1.306.985.307.293,00 atau 69,59%. Realisasi keuangan sebesar 69,59% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,41%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Sudah tersedianya lembaga pendidikan jenjang pada setiap desa
2. Adanya pembebasan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah dan adanya beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kutai Kartanegara dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia

3. Kondisi geografis sebagian wilayah Kutai Kartanegara yang sulit dijangkau, juga mempengaruhi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
4. Masih rendahnya kesadaran penduduk di wilayah tertentu terutama pada wilayah perkebunan dan kampung nelayan untuk bersekolah/ kuliah, masyarakat lebih mementingkan bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
5. Terkait pembangunan kebudayaan adanya prioritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki banyak warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan secara nasional.
6. Situasi kerukunan umat beragama, suku, ras, dan golongan di wilayah ini juga sangat baik, bahkan belum pernah terjadi konflik yang eskalatif.
7. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mendorong lahirnya pelaku seni yang menjadikan kesenian sebagai sumber penghasilan utama dengan memberi pelatihan, sponsorship, publikasi, hingga promosi.
8. Peningkatan minat baca dengan menyediakan beragam buku bacaan, pustakawan, dan sarana prasarana penunjang di tiap perpustakaan kecamatan, kelurahan, dan desa.

Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan indeks Pendidikan salah satunya menjadikan Program Beasiswa Idaman dan Program 1000 guru sarjana, menjadi program dedikasi/ prioritas. Beasiswa 1000 Guru Sarjana dibagi dalam 3 kategori yaitu beasiswa guru non PNS/ Tenaga Pendidik, Beasiswa Calon Guru dan Beasiswa Pasca Sarjana (S2 dan S3), sedangkan Beasiswa Kukar Idaman dibagi dalam 7 kategori yaitu Beasiswa Berkebutuhan Khusus, Beasiswa Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan/ Madrasah, Beasiswa Santri Pondok

Pasantren, Beasiswa Stimulan (S1), Beasiswa Khusus (Yatim Piatu terdampak covid-19) Beasiswa Santri Lanjut Perguruan Tinggi dan Beasiswa Tematik.

Di Tahun 2023 melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara telah merealisasikan beasiswa dengan rincian:

Tabel 44. Realisasi Program Beasiswa Tahun 2023

No	Jenis Beasiswa	Satuan	Jumlah Realisasi
1.	Jumlah Guru Penerima Beasiswa Non ASN	Orang	200
2.	Jumlah Penerima Beasiswa santri lanjut perguruan tinggi	Orang	20
3.	Jumlah Penerima Beasiswa bantuan stimulan Mahasiswa	Orang	800
4.	Jumlah Penerima Beasiswa Non ASN skema tematik	Orang	200
5.	Jumlah penerima beasiswa santri pondok pesantren	Orang	200
Jumlah Total Penerima			1.420

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

5. Analisis Kinerja Sasaran 5: "Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat" dengan indikator Indeks Kesehatan mencapai 99,75% dan termasuk predikat "Sangat Berhasil" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 45. Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,814	0,812	99,754

Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator umur harapan hidup (expectancy of life at birth) yang menghasilkan indeks kesehatan, merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Manusia.

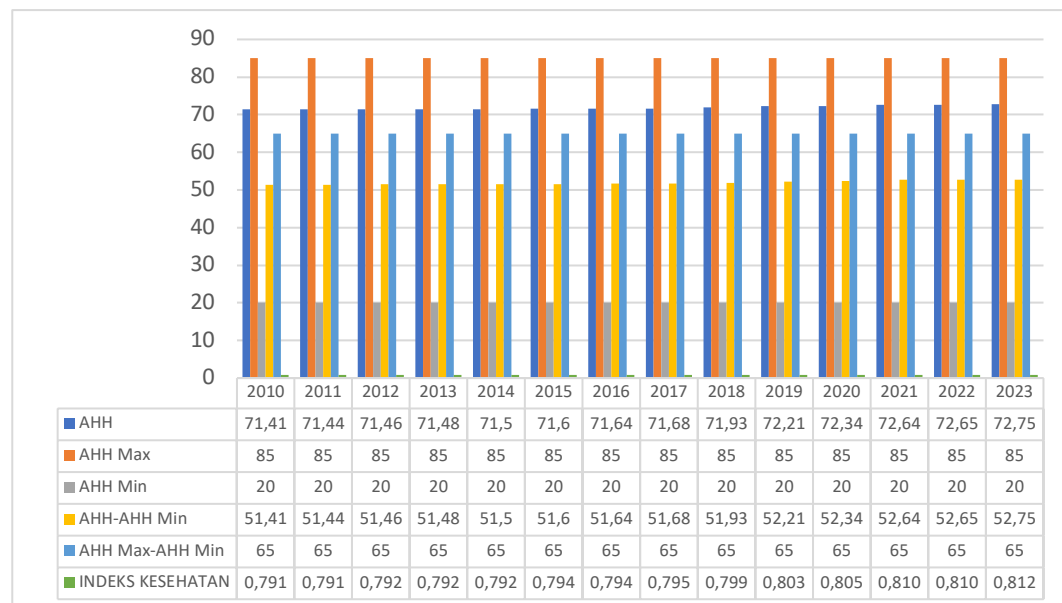
Untuk mengukur capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

menggunakan indikator Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Pada Tahun 2023 Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 0,812, capaian ini meningkat 0,002 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 angka indeks kesehatan bisa mencapai 0,810. Setiap tahunnya indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat. Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2023, ditampilkan pada grafik dibawah ini:

Grafik 17. Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara

Angka Harapan Hidup

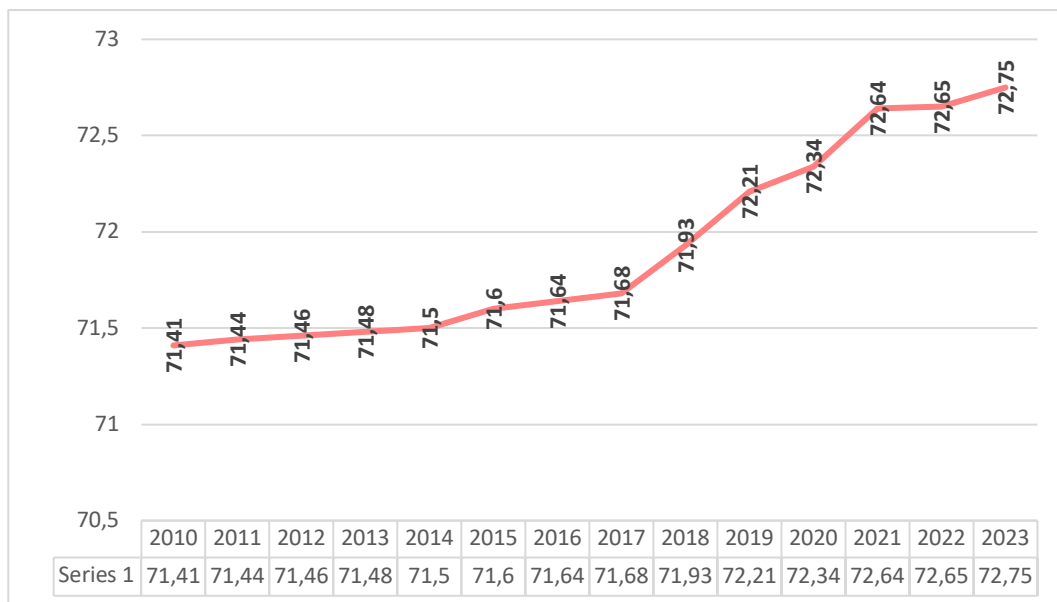
Komponen umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (expectation of life at birth). Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator

angka harapan hidup (AHH) maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.

Pada tahun 2010 perkiraan rata-rata umur yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 71,41 tahun. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 72,65 tahun pada tahun 2022, dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 mencapai 72,75.



Grafik 18. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara

Tabel 46. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,81	0,812	0,817	0,821	0,824

Sumber: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 47. Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	247.814.848.840,00	331.685.526.047,00	293.045.218.246,00	88,35
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.737.027.000,00	4.098.685.000,00	2.871.669.117,00	70,06
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.492.000.080,00	2.177.551.160,00	1.862.003.664,00	85,51
Total		255.043.875.920,00	337.961.762.207,00	297.778.891.027,00	88,11

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.297.778.891.027,00 dari anggaran sebesar Rp.337.961.762.207,00 atau 88,11%. Realisasi keuangan sebesar 88,11% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,75%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, dan walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat susah untuk diakses secara merata di seluruh wilayah.
2. Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan maupun SDM Kesehatan di seluruh unit-unit layanan Kesehatan masyarakat

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memecahkan permasalahan ini antara lain:

1. Penyediaan fasilitas sarana prasarana Kesehatan sesuai standar yang dilakukan secara bertahap, dengan membangun dan memperbaiki kondisi Bangunan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Penyediaan SDM Kesehatan secara bertahap, salah satunya melalui pengangkatan PPPK, yang akan bertugas di RSUD dan Puskesmas.
3. Terus meningkatkan penyediaan pelayanan Kesehatan sesuai terandar kepada masyarakat.
4. Terhadap kesenjangan SDM Kesehatan, maka dijadwalkan secara rutin kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas-puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, mengoptimalkan pelaksanaan program upaya Kesehatan masyarakat dan perorangan, serta mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah, menjadi sasaran tambahan dalam perjanjian kinerja seluruh kepala perangkat daerah.

6. Analisis Kinerja Sasaran 6: "Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan" dengan indikator Indeks Pembangunan Gender mencapai 100,949% dan termasuk predikat "Sangat Berhasil" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 48. Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
6	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,05	79,8)*	100,949

)* data capaian tahun 2022

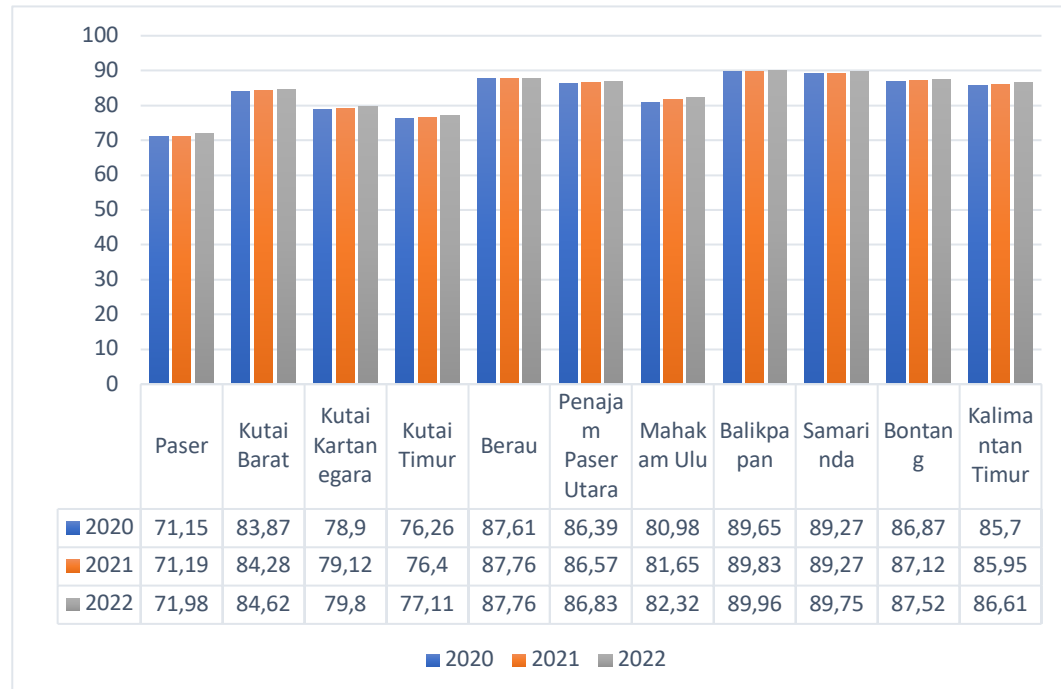
Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode

baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

$$\text{Rumusan: } \text{IPG} = \text{IPM perempuan} / \text{IPM laki-laki}$$

Grafik 19. Indeks Pembangunan Gender Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2022



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi pencapaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar

jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 49. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,80	79,80)*	79,1	79,15	79,2

)* menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2022), karena angka kinerja tahun 2023 belum tersedia

Sumber: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 50. Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.325.000.000,00	4.672.780.083,00	3.178.406.278,00	68,02
2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	565.000.000,00	865.000.000,00	739.557.871,00	85,50
3	Program Perlindungan Khusus Anak	524.700.000,00	789.700.000,00	631.727.227,00	80,00
Total		2.414.700.000,00	6.327.480.083,00	4.549.691.376,00	71,90

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.4.549.691.376,00 dari anggaran sebesar Rp. 6.327.480.083,00 atau 71,90%. Realisasi keuangan sebesar 71,90% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,949%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang

berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai.

Kutai Kartanegara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, adanya perda ini bertujuan memberikan acuan dalam Menyusun strategi pengintegrasian gender atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, mewujudkan perencanaan berprespektif gender, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender, meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran dan tanggung jawab, memperkuat pemberdayaan perempuan, meningkatkan dan mendorong peran aktif Lembaga non pemerintahan dan masyarakat yang menangani pembangunan gender di daerah.

7. Analisis Kinerja Sasaran 7: "Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat" dengan indikator Indeks Gini dan Indeks Desa Membangun mencapai 102,803% dan termasuk predikat "Sangat Berhasil" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 51. Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
8	Indeks Gini	Nilai	0,28	0,284	98,571
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,725	0,776	107,034
Rata-rata Capaian					102,803

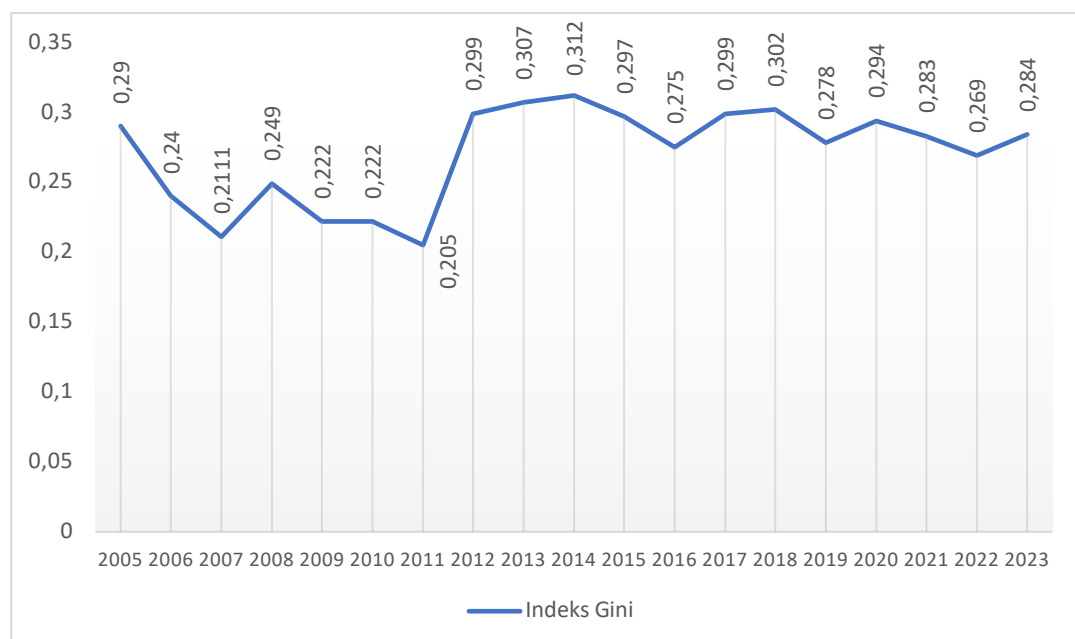
Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara

Indeks Gini

Angka realisasi 2023 Indeks Gini atau Gini Ratio terealisasi sebesar 0,284, angka ini meningkat sebesar 0,015 point dari Tahun 2022 sebesar 0,269. Target tahun 2023 sebesar 0,28 sehingga capaiannya adalah sebesar 98,571 %. Angka tersebut lebih kecil apabila dibandingkan angka Indeks Gini nasional sebesar 0,388 (pada Maret 2023), dan juga lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,322 (data BPS Kalimantan Timur per Maret 2023).

Indeks Gini merupakan tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah; $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Nilai Indeks Gini berkisar 0 hingga 1. Jika mendekati 1 maka ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar. Jika mendekati 0, maka distribusi pendapatan makin merata. Realisasi Indeks Gini tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kriteria ketimpangan rendah.

Grafik 20. Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2023



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara

Perkembangan gini ratio di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kondisi yang berfluktuatif. Pada awal periode tahun 2005 gini ratio di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,290. Menurut Oshima (1976), angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

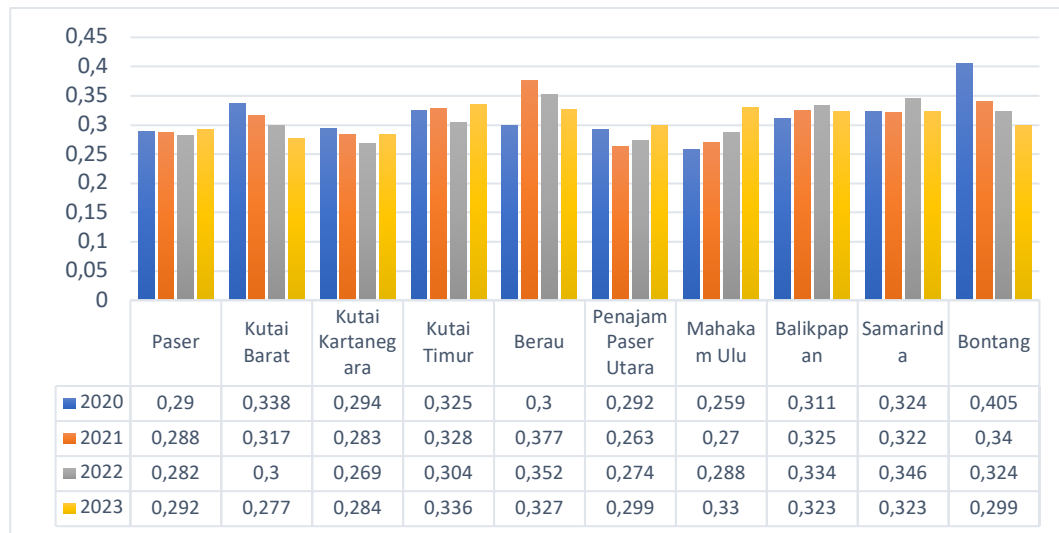
Gini ratio terus menurun meskipun berfluktuatif hingga mencapai nilai terendah pada tahun 2011 sebesar 0,205. Pada tahun 2012 gini ratio meningkat tajam menjadi 0,299 dan terus meningkat hingga mencapai 0,312 pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara penduduk semakin melebar dibanding kondisi periode 2005-2011.

Pada periode berikutnya, 2015 hingga 2016, angka gini ratio sempat turun hingga mencapai 0,275 namun kembali meningkat di tahun 2017 dan 2018. Meskipun sempat turun di tahun 2019 namun karena pandemi Covid-19 angka gini ratio kembali meningkat di tahun 2020.

Pada periode 2012 hingga 2021 dapat dikatakan gini ratio cenderung turun melambat meskipun berfluktuatif. Gini ratio tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai angka 0,269 yang menunjukkan kondisi pemerataan yang lebih baik dibanding awal periode tahun 2021, karena mengalami penurunan 0,014, namun meningkat Kembali di Tahun 2023.

Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2023, jika dibandingkan dengan Indeks Gini kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 21. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023



Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya rasio gini, Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya rasio gini, pertama yakni kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Hal itu telah menciptakan kemiskinan yang menurun. Kedua, pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, sedangkan pekerja formal memiliki gaji 'selangit'. Ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata.



Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menekan tingkat kesenjangan, salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui inovasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK: <https://rbpk.kukarkab.go.id/>) Kutai Kartanegara, agar meningkatkan *Colaboratif Working* antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah desa dan keterlibatan non pemerintah. Beberapa program antara lain Program Sanitasi Aman, Program Yok Baiki Rumah, Program Air Bersih, Program Pondok Pangan Etam. Program Nyaman Be'jukut, Program Pendidikan Keaksaraan Dasar, Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Program Pendidikan Kesetaraan Paket A s/d C, Program Bantuan Alat Bantu Aksesibilitas, Program Bantuan Pangan. Melalui program-program ini nantinya diharapkan bisa mencapai Kemiskinan 0% pada tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dibutuhkan kolaborasi semua stakeholder serta meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam pengentasan kemiskinan.

Selain itu program jaring pengaman sosial, juga akan sangat mempengaruhi penurunan gini ratio. Melalui Program Rehabilitasi Sosial Pemda Kutai Kartanegara telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan



gelandangan pengemis yang terpenuhi di luar panti, sebanyak 5.188 atau tercapai 100% dari yang ditargetkan sebesar 5.188 di Tahun 2023. Melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan dengan kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar: pemberian pangan, sandang, kesehatan (Penerima Bantuan Iuran / BPJS) bagi masyarakat miskin non potensial kepada 17.330 orang atau 98,72%% dari target 2023 sebesar 96% dari 17.555 orang yang melaporkan dan terdata dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia sampai dengan bulan Desember 2023.

Pertama yakni kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Hal itu telah menciptakan kemiskinan yang menurun. Kedua, pasar tenaga kerja yang tidak seimbang,

yakni pekerja informal bergaji sangat minim, sedangkan pekerja formal memiliki gaji '*selangit*'. Ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata.

Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menekan tingkat kesenjangan, salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui inovasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK: <https://rbpk.kukarkab.go.id/>) Kutai Kartanegara, agar meningkatkan Colaboratif Working antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah desa dan keterlibatan non pemerintah. Beberapa program antara lain Program Sanitasi Aman, Program Yok Baiki Rumah, Program Air Bersih, Program Pondok Pangan Etam. Program Nyaman Be'jukut, Program Pendidikan Keaksaraan Dasar, Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Program Pendidikan Kesetaraan Paket A s/d C, Program Bantuan Alat Bantu Aksesibilitas, Program Bantuan Pangan. Melalui program-program ini nantinya diharapkan bisa mencapai Kemiskinan 0% pada tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dibutuhkan kolaborasi semua stakeholder serta meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam pengentasan kemiskinan.

Selain itu program jaring pengaman sosial, juga akan sangat mempengaruhi penurunan gini ratio. Melalui Program Rehabilitasi Sosial Pemda Kutai Kartanegara telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi di luar panti, sebanyak 5.188 atau tercapai 100% dari yang ditargetkan sebesar 5.188 di Tahun 2023. Melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan dengan kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar: pemberian pangan, sandang, kesehatan (Penerima Bantuan Iuran / BPJS) bagi masyarakat miskin non potensial kepada 17.330 orang atau 98,72%% dari target 2023 sebesar 96% dari 17.555 orang yang dilaporkan dan terdata dalam aplikasi Sistem

Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia sampai dengan bulan Desember 2023.

Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :

- a. **Indeks Ketahanan Sosial**, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman
- b. **Indeks Ketahanan Ekonomi**, meliputi Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah
- c. **Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan**, meliputi Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi

Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Adapun Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 52. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Status					2023				
			Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	IKS	IKE	IKL	IDM	Status
1	Muara Muntai	13	0	0	1	3	9	0,826	0,765	0,892	0,828	Mandiri
2	Loa Kulu	15	0	0	1	3	11	0,889	0,758	0,876	0,841	Mandiri
3	Loa Janan	8	0	0	0	4	4	0,881	0,746	0,800	0,809	Maju
4	Anggana	8	0	0	2	3	3	0,801	0,606	0,908	0,772	Maju
5	Muara Badak	13	0	0	2	5	6	0,870	0,714	0,800	0,795	Maju
6	Tenggarong	2	0	0	0	2	0	0,857	0,567	0,833	0,752	Maju
7	Sebulu	14	0	0	3	4	7	0,867	0,768	0,757	0,797	Maju
8	Kota Bangun	11	0	0	6	4	1	0,793	0,717	0,667	0,726	Maju
9	Kenohan	9	0	0	5	3	1	0,802	0,654	0,696	0,717	Maju
10	Kembang Janggut	11	0	0	0	4	7	0,849	0,827	0,842	0,840	Mandiri
11	Muara Kaman	20	0	0	7	5	8	0,791	0,683	0,803	0,759	Maju
12	Tabang	19	0	0	10	9	0	0,780	0,640	0,670	0,697	Berkembang
13	Samboja	3	0	0	0	3	0	0,798	0,711	0,733	0,748	Maju
14	Tenggarong Seberang	18	0	0	0	4	14	0,876	0,774	0,830	0,827	Mandiri
15	Marang Kayu	11	0	0	4	6	1	0,857	0,676	0,697	0,743	Maju
16	Muara Wis	7	0	0	3	1	3	0,806	0,602	0,867	0,758	Maju
17	Kota Bangun Darat	10	0	0	4	5	1	0,827	0,645	0,707	0,726	Maju
18	Samboja Barat	1	0	0	0	1	0	0,777	0,600	0,933	0,770	Maju
Total		193	0	0	48	69	76	0,834	0,709	0,785	0,776	Maju

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 53. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
8	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,269	0,284	0,27	0,27	0,27
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,747	0,776	0,745	0,765	0,785

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 54. Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	14.369.751.400,00	30.716.903.680,00	29.589.545.644,00	96,33
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	26.196.035.828,00	26.741.035.828,00	25.484.353.507,00	95,30
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.300.000.000,00	8.650.000.000,00	8.093.339.806,00	93,56
4	Program Penataan Desa	747.052.000,00	1.312.052.000,00	964.914.577,00	73,54
5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.703.948.000,00	1.608.948.000,00	1.318.971.977,00	81,98
Total		45.316.787.228,00	69.028.939.508,00	65.451.125.511,00	94,82

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.65.451.125.511,00 dari anggaran sebesar Rp. 69.028.939.508,00 atau 94,82%. Realisasi keuangan sebesar 94,82% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,803%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Tersedianya pendamping desa baik dari Kementerian Desa dan Kabupaten, dapat membantu memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah dan pembangunan di desa. meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan di desa, meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

2. Adanya kesadaran pemerintah desa terkait prestasi kinerja pemerintah desa dalam pencapaian status desa. Adanya reward yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi Desa yang berhasil menjadi Desa Mandiri juga memberi pengaruh yang cukup positif bagi desa serta ketersediaan anggaran yang memadai mendampingi faktor pendukung tercapainya sasaran ini.
3. Namun dibalik semua faktor yang mendukung keberhasilan, masih ditemukan adanya sebagian kecil kepala desa yang enggan meningkat/berubah status desanya dikarenakan ada ketakutan pengurangan anggaran desa.
4. Kondisi geografik Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas juga mempengaruhi pemerataan pembangunan seperti masih minimnya akses internet, layanan Kesehatan bagi desa-desa tertinggal.
5. Kurangnya pemahaman Kepala Desa tentang Teknis Pengisian Form Kuisioner penilaian indeks desa membangun terutama terkait dengan kondisi sarana prasarana yang dimiliki desa.

8. Analisis Kinerja Sasaran 8: "Menurunnya Pengangguran di Masyarakat"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya Pengangguran di Masyarakat” dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB per Kapita mencapai 127,158% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 55. Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,65	4,050	112,903
9	PDRB Per Kapita	Nilai	191,44	270,72	141,412
Rata-Rata Capaian					127,158

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara

Tingkat Pengangguran Terbuka

Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah di bidang ketenagakerjaan adalah meningkatnya pengangguran. Pengangguran terjadi ketika jumlah angkatan kerja yang ada, belum atau tidak terserap sepenuhnya oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Seseorang dikatakan bekerja apabila melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Sementara pengangguran mencakup empat kriteria, yaitu mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat besarnya tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT diperoleh dengan membagi antara jumlah pengangguran (penduduk yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan) dengan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran). Ukuran ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap di dalam pasar kerja.

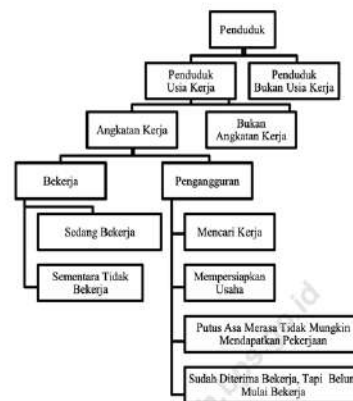
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara pengangguran terhadap angkatan kerja, sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Kedua hal tersebut akan selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang, dan sebaliknya jika kesempatan kerja besar berarti TPT akan semakin kecil.

Tabel 56. Jumlah dan Perubahan Pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2023

Tahun	Pengangguran	
	Jumlah (orang)	Perubahan (orang)
2010	33980	
2011	23530	-10450
2012	23977	447
2013	22215	-1762
2014	24381	2166
2015	31397	7016
2017	19473	-11924
2018	21361	1888
2019	22607	1246
2020	20497	-2110
2021	21544	1047
2022	15412	-6132
2023	14731	-681

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara

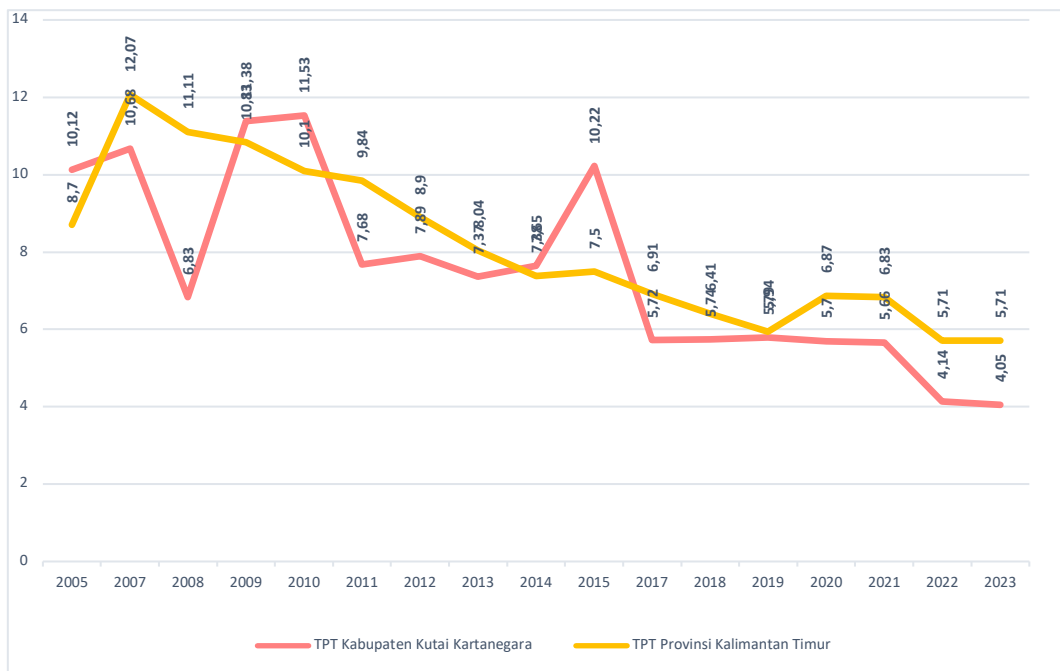
Selama 1 dekade terakhir, jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara berfluktuasi dengan kecenderungan menurun (lihat tabel 2.3.39). Jumlah pengangguran tercatat berkisar antara 20-35 ribu, dimana jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2010 yang mencapai 33.980 orang, dan di Tahun 2023 merupakan capaian terendah tercatat pada sebanyak 14.731 orang.



Penduduk yang terkategori sebagai pengangguran adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (*future*

starters). Jumlah penganggur yang juga tercatat cukup tinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 31.397 orang. Perubahan jumlah pengangguran setiap tahunnya. Pada tahun 2011, jumlah pengangguran tercatat berkurang sebanyak 10.450 orang dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Kemudian pada tahun 2013 berkurang sebanyak 1,762 orang, tahun 2017 berkurang sebanyak 11.924 orang, dan tahun 2020 juga berkurang sebanyak 2.110 orang. Namun demikian, pada beberapa tahun juga terjadi penambahan jumlah pengangguran meskipun secara angka tidak terlalu besar. Penambahan jumlah pengangguran ini terjadi pada tahun 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, dan 2021. Penambahan pengangguran ini banyak terjadi pada tahun dimana ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kondisi yang kurang baik. Dengan melihat data diatas, maka secara rata-rata, jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara berkurang sebanyak 1.131 orang setiap tahunnya.

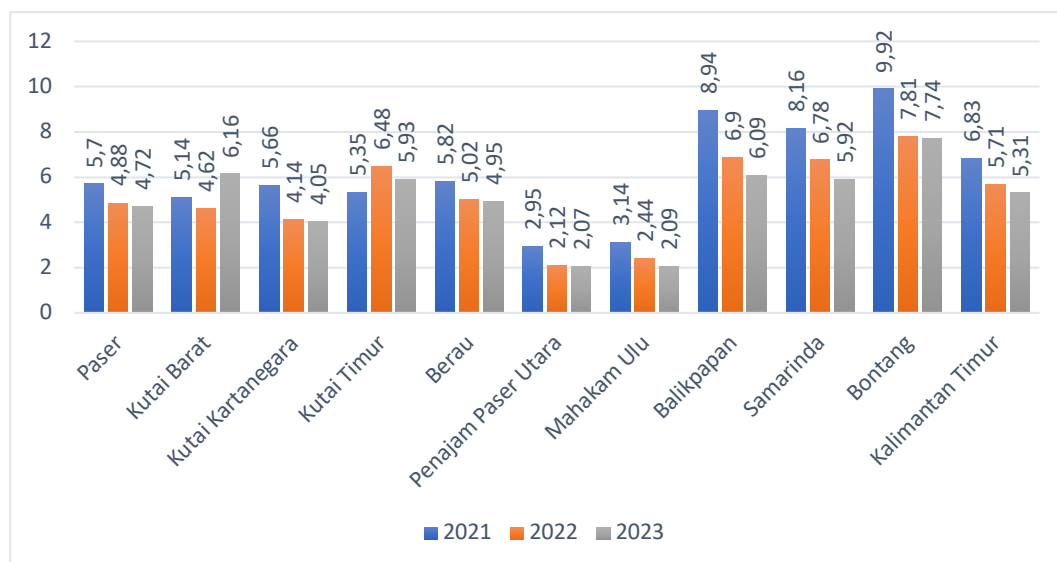
Grafik 22. Perkembangan TPT Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kaltim, 2005-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara 2023

Sejalan dengan jumlah pengangguran, perkembangan tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara juga berfluktuasi dengan kecenderungan angka yang relatif rendah, terutama pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2005, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 10,12 persen, lebih tinggi daripada TPT Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar 8,70 persen. Satu tahun kemudian, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 10,68 persen, lebih rendah dari TPT Provinsi Kalimantan Timur yang melonjak menjadi 12,07 persen. Pada tahun 2008, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara kembali turun cukup drastis mencapai angka 6,83 persen, jauh lebih rendah dari TPT Kalimantan Timur yang sebesar 11,11 persen. Namun pada tahun 2009-2010 dan kemudian tahun 2015, TPT Kutai Kartanegara meningkat cukup tajam, melebihi TPT Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya angka TPT ini tidak terlepas dari fakta bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal sebagai magnet bagi para pekerja pendatang dari luar wilayah. Akibatnya jumlah pencari kerja di Kutai Kartanegara bertambah banyak dan tingkat pengangguran juga meningkat. Beruntungnya, pada periode 2017-2023, rata-rata TPT Kutai Kartanegara tercatat sebesar 5,2 persen dan selalu lebih rendah dari TPT provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 23. Perkembangan TPT Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim, 2021-2023



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara

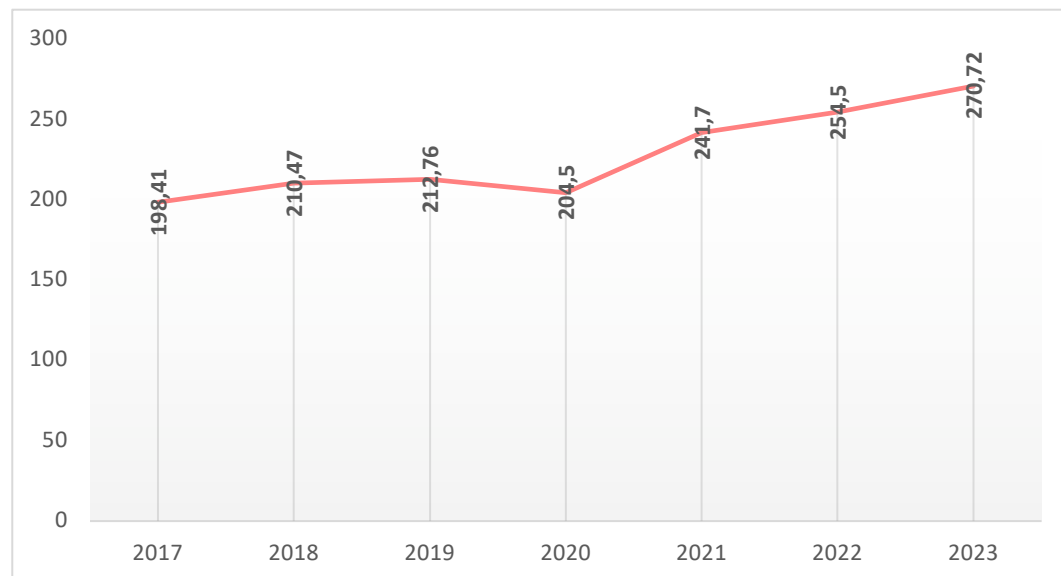
PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dilihat dari PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDB atas dasar harga konstan (ADHK).

PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Berikut ini disajikan data capaian kinerja PDRB Per Kapita:

Grafik 24. PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2023



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara

PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kenaikan pada Tahun 2023 dari 245,5 juta rupiah di tahun 2022 menjadi 270,72 juta di tahun 2023 atau meningkat 16,22 dari Tahun 2022. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mampu menciptakan PDRB (atau nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama 20 tahun terakhir telah meningkatkan PDRB perkapita penduduk, dari Rp. 113,64 juta rupiah pada Tahun 2005 menjadi Rp. 241,70 juta rupiah pada Tahun 2021 dan meningkat menjadi 270,72 juta rupiah di Tahun 2023. Kendati demikian, masih terdapat gap yang cukup besar antara PDRB perkapita dengan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Hal ini disebabkan salah satunya karena peranan komponen konsumsi rumah tangga di PDRB yang tercatat relatif kecil dengan kontribusi rata-rata kurang dari 10 persen dalam 10 tahun terakhir.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 57. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	5,66	4,14	4,05	4,4	4,25	4,1
11	PDRB per Kapita	Nilai	241,7	254,5	270,72	197,62	202,16	204,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 58. Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	9.340.000.000,00	20.535.000.000,00	19.027.890.444,00	92,66
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.151.000.000,00	12.833.400.000,00	12.014.647.880,00	93,62
Total		15.491.000.000,00	33.368.400.000,00	31.042.538.324,00	93,03

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.31.042.538.324,00 dari anggaran sebesar Rp. 33.368.400.000,00 atau 93,03%. Realisasi keuangan sebesar 93,03% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 127,158%, maka terjadi efisiensi

penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor pendukung tercapainya Target Tingkat Pengangguran Terbuka:

1. Peningkatan tingkat pendidikan dan pelatihan bersertifikat kompetensi meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja di pasar tenaga kerja.
2. Mendorong wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
3. Kebijakan yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja, melindungi hak pekerja, dan mendorong penciptaan lapangan kerja dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran

Faktor Penghambat tercapainya Target:

1. Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dapat menjadi penghambat. Peningkatan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan industri dapat meninggalkan beberapa pekerja dengan keterampilan yang tidak sesuai.
2. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan di pasar tenaga kerja.

9. Analisis Kinerja Sasaran 9: "Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah" dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 47,317% dan termasuk predikat "Kurang Berhasil" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 59. Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,15	2,91	47,317

Sumber data: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2023

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Dalam meningkatnya produktifitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dengan target RPJMD 2023 sebesar 6,15%, realisasi target Pertumbuhan Sektor Pertanian Tahun 20223 sebesar 2,91%. PDRB sektor pertanian (Pertumbuhan Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan) 2023 mengalami peningkatan sebesar 1% dari Tahun 2022 yang mencapai 1,91%. Berdasarkan hal tersebut jika dibandingkan target Tahun 2023, maka capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 47,317%.

Grafik 25. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2023



Sumber data: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2023

Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah, dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, capaian setiap tahunnya selalu dibawah target dengan predikat “Kurang Berhasil”, walaupun potensi pertanian di Kutai Kartanegara relatif besar, namun belum banyak menarik minat masyarakat, sektor migas dan batubara masih menjadi sektor unggulan.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 60. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,02	1,91	2,91	6,6	7,05	7,5

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 61. Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	77.561.460.000,00	153.813.486.000,00	130.291.864.552,00	84,71
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.271.000.000,00	16.445.775.720,00	15.282.487.269,00	92,93
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	78.876.200.000,00	86.527.472.340,00	81.591.737.304,00	94,30
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.368.750.000,00	9.518.149.980,00	6.253.462.340,00	65,70
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	1.421.150.000,00	1.421.150.000,00	1.246.761.030,00	87,73

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	Masyarakat Veteriner				
6	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	864.526.500,00	78,59
7	Program Penyuluhan Pertanian	19.688.500.000,00	21.548.500.000,00	17.919.572.478,00	83,16
8	Program Penyuluhan Pertanian	550.000.000,00	550.000.000,00	546.324.992,00	99,33
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	92.000.000,00	162.000.000,00	159.960.000,00	98,74
10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	83.064.337.970,00	215.581.597.970,00	206.639.610.903,00	95,85
11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	110.147.754.000,00	249.627.022.360,00	231.154.003.239,00	92,60
12	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4.300.000.000,00	5.800.000.000,00	5.512.242.912,00	95,04
13	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.300.000.000,00	6.157.500.000,00	5.653.596.775,00	91,82
14	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	657.375.000,00	657.375.000,00	585.418.510,00	89,05
15	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.605.000.000,00	7.205.000.000,00	6.240.228.551,00	86,61
16	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	8.995.000.000,00	9.442.035.000,00	6.588.944.914,00	69,78
17	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.330.000.000,00	3.055.000.000,00	2.099.483.857,00	68,72
18	Program Pengembangan UMKM	2.575.000.000,00	8.201.162.000,00	7.216.071.732,00	87,99
Total		142.301.768.841,00	205.860.925.019,00	195.308.642.289,00	94,87

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.725.846.297.858,00 dari anggaran sebesar Rp. 796.813.226.370,00 atau 91,09%. Realisasi keuangan sebesar 91,09% dibandingkan dengan

capaian kinerja sasaran sebesar 47,317%, maka terjadi ketidak efisienan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih tinggi dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Produksi Sebagian besar komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur, namun belum mampu meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pertanian, karena potensi sektor pertambangan yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara, masih merupakan magnet terbesar jika dibandingkan dengan sektor pertanian.
2. Adanya alih fungsi lahan pertanian terutama di wilayah perkotaan juga mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian, serta masih besarnya lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan.
3. Regenerasi pelaku usaha bidang pertanian yang rendah, karena pelaku usaha pertanian masih di dominasi generasi tua dan masih rendahnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian.

10. Analisis Kinerja Sasaran 10: “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah” dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata mencapai 149,00% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 62. Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2023

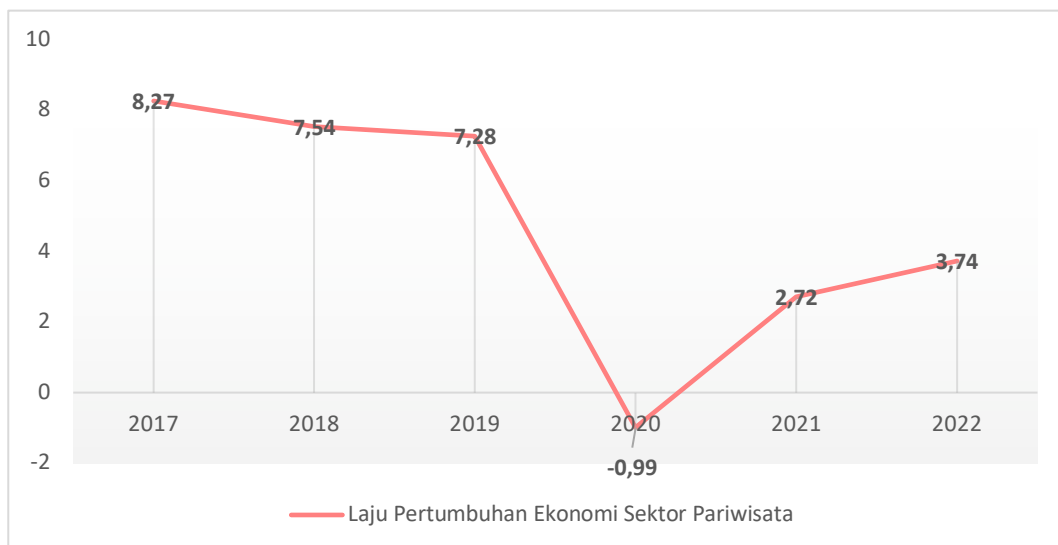
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,51	3,74)*	149,00

)* menggunakan data capaian Tahun sebelumnya (2022)

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong sektor pariwisata sebagai trigger dalam proses transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memiliki potensi yang berdampak pada percepatan perekonomian daerah.

Grafik 26. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara 2017-2022

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Tahun 2023 tercatat 1.530.444 orang, jumlah ini meningkat jika dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan di Tahun 2022 sebesar 1.041.254 atau mengalami peningkatan 489.190 orang wisatawan nusantara.

Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Laju Pertumbuhan Ekonomi pariwisata tahun 2021 sebesar 2.72 persen seiring penanganan

dan pemulihan ekonomi wilayah terwujud. Kondisi ini meningkat dibanding tahun 2020 sebesar - 0.99 persen. Namun pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata semakin meningkat menjadi 3,74 persen. Diharapkan sektor pariwisata akan terus berkembang dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian daerah, salah satu kekuatan pariwisata yang terus didorong adalah dengan memperkuat ekonomi kreatif daerah sebagai titik point krusial dalam proses pembangunan pariwisata daerah. Sampai laporan ini disusun data Laju Pertumbuhan Ekonomi pariwisata tahun 2023 belum ada, sehingga masih menggunakan data capaian Tahun 2022.

Di Tahun 2023 sebagian besar objek wisata tidak melakukan pencatatan terhadap jumlah kunjungan wisatawan, sehingga data kunjungan wisatawan selama 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya bisa menyajikan yang melakukan pencatatan saja, yaitu sebagai berikut:

Tabel 63. Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2023

No	Nama Daya Tarik Wisata	Jumlah		
		Wisnus	Wisman	Jumlah
1	Bukit Bangkirai Samboja	14581	543	15124
2	Museum Mulawarman Tenggarong	59548	340	59888
3	Ladaya (Ladang Budaya) Tenggarong	76534		76534
4	Lamin Etam Ambors Samboja	100150		100150
5	Pulau Kumala Tenggarong	37215		37215
6	Waduk Panji Sukarame Tenggarong	4419		4419
7	Pantai Tanah Merah Samboja	90928		90928
8	Pantai Pangempang Muara Badak	129570		129570
9	Museum Kayu Tenggarong	4382	79	4461
10	Situs Makam Raja-raja Kutai Tenggarong	117498	218	117716
11	Situs Makam Sinopati Aw.Long Tenggarong	476		476

No	Nama Daya Tarik Wisata	Jumlah		
		Wisnus	Wisman	Jumlah
12	Situs Makan Raja Aji Mahkota dan Aji dilanggar Anggana	50888		50888
13	Situs Makam Syeh Tunggang Parangan Anggana	37974		37974
14	Situs Makam Pangeran Mangkunegoro Tenggarong	1382		1382
15	Tugu Equator Marang Kayu	1263	6	1269
16	Wisata Sungai Mahakam	15	15	30
17	Desa Wisata Kedang Ipil Kota Bangun	2870		2870
18	Desa Wisata Kersik Marang Kayu	11876		11876
19	Desa Wisata Sumber Sari	1522		1522
20	Event Budaya	399079		399079
Jumlah		1.142.170	1201	1.143.371

Sumber: Dinas Pariwisata Tahun 2023

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 64. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	3,74	3,74)*	3,42	4	4,23

)* menggunakan data capaian tahun sebelumnya (2022)

Sumber: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 65. Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	16.940.271.000,00	27.836.271.000,00	26.882.477.352,00	96,57

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
2	Program Pemasaran Pariwisata	8.653.000.000,00	26.285.800.000,00	26.099.266.403,00	99,29
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11.920.000.000,00	14.712.500.000,00	14.300.028.669,00	97,20
Total		37.513.271.000,00	68.834.571.000,00	67.281.772.424,00	97,74

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.67.281.772.424,00 dari anggaran sebesar Rp. 68.834.571.000,00 atau 97,74%. Realisasi keuangan sebesar 97,74% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 149,004%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

Semakin tingginya kesadaran kelompok masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi lingkungannya menjadi objek wisata, juga mampu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terus meningkat. Tumbuhnya Pokdarwis juga mengindikasikan bahwa masyarakat Kutai Kartanegara semakin siap untuk mengelola pariwisata dan siap menerima kunjungan wisatawan.

11. Analisis Kinerja Sasaran 11: “Berkembangnya Ekosistem Kreatif”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Berkembangnya Ekosistem Kreatif” dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif mencapai 106,26% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 66. Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2023

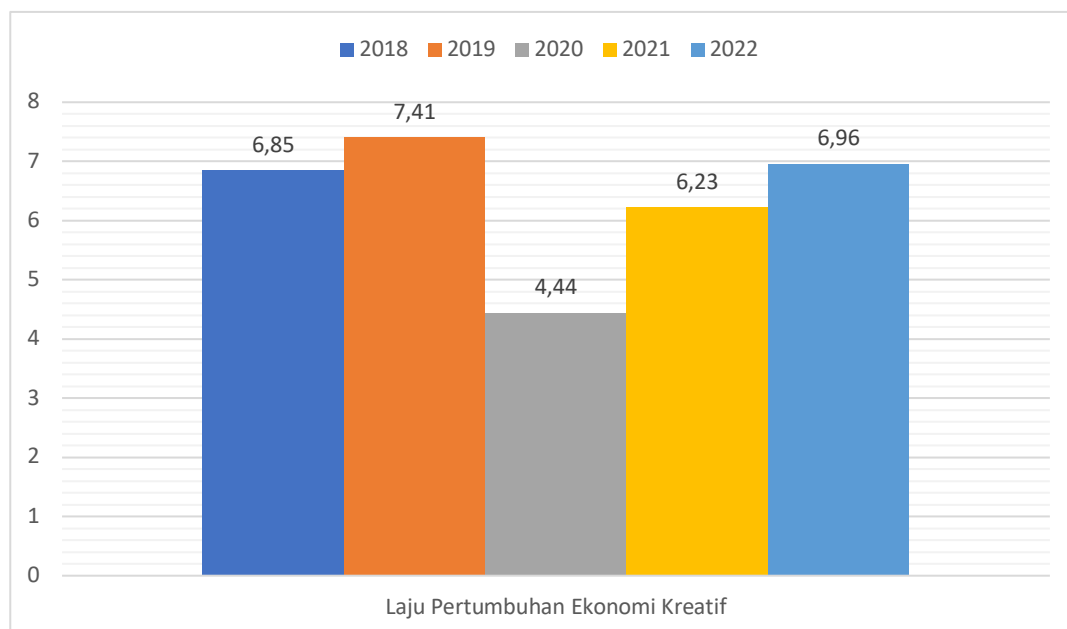
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,55	6,96)*	106,26

)* menggunakan data capaian tahun sebelumnya (2022)

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Menurut *Insitute For Development Economy and Finance*, ekonomi kreatif diartikan sebagai suatu proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksplorasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk dapat dijual.

Grafik 27. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif



Sumber: Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara 2018-2022

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 67. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,96	6,96)*	7,09	7,48	7,56

)* menggunakan data capaian tahun sebelumnya (2022)

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 68. Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	6.900.000.000,00	3.571.987.000,00	3.500.252.967,00	97,99
Total		6.900.000.000,00	3.571.987.000,00	3.500.252.967,00	97,99

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.3.500.252.967,00 dari anggaran sebesar Rp. 3.571.987.000,00 atau 97,99%. Realisasi keuangan sebesar 97,99% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 106,26%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

Peran generasi muda sangat mempengaruhi capaian sasaran ini, ketersediaan tenaga kerja yang dimiliki, terbukanya kesempatan bagi mereka untuk berkreasi didukung dengan kemajuan teknologi yang dimiliki, kemudahan dalam akses komunikasi, serta perkembangan media sosial, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengejar perkembangan Ekosistem Kreatif, yang diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif.

12. Analisis Kinerja Sasaran 12: “Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah” dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi mencapai 168,62% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 69. Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	30,47	51,38	168,62

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Di Tahun 2023 target Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi dilakukan perubahan dari target yang di tuangkan dalam RPJMD sebesar 1,73%, menjadi 30,47%. Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2023 berhasil mencapai Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar 51,38%.

Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi adalah:

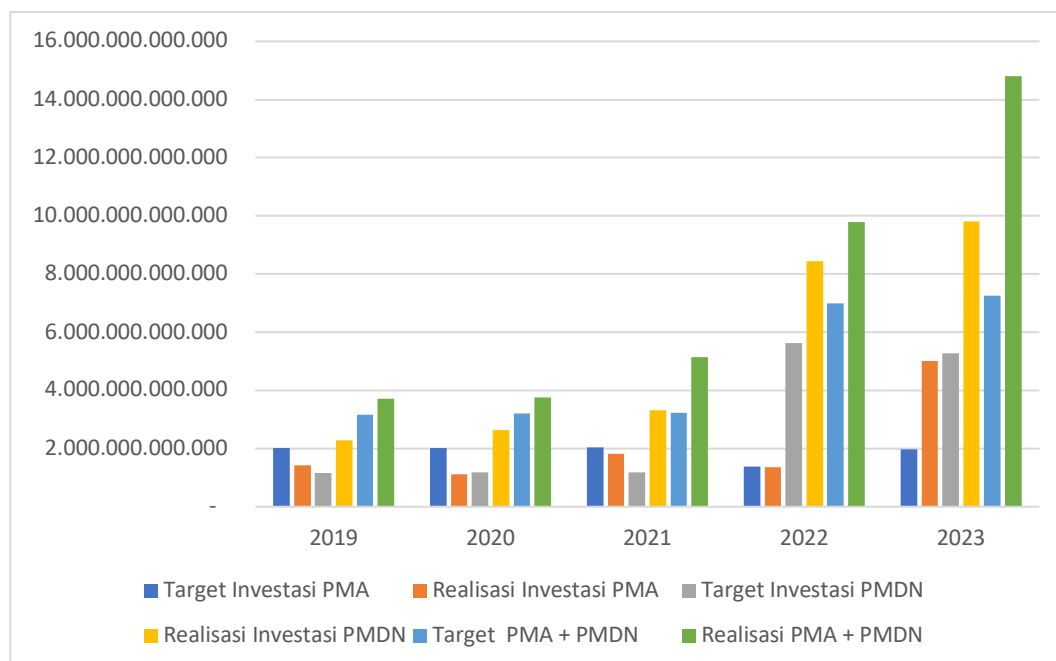
$$\text{Tingkat Pertumbuhan Investasi} = \frac{(\text{Jumlah Investasi Tahun } n - \text{Jumlah Investasi } n-1) \text{ di Kabupaten/ Kota}}{\text{Jumlah Investasi } n-1 \text{ di Kabupaten/ Kota}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Investasi} = \frac{14.809.258.004.235 - 9.782.835.525.026}{9.782.835.525.026} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Investasi} = \mathbf{51,38\%}$$

Berikut disajikan Perhitungan Target, Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2023.

Grafik 28. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022



Sumber: DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

Nilai Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 sebesar Rp.14.809.258.004.235, lebih tinggi Rp. 5.026.422.479.209, dibandingkan realisasi investasi Tahun 2022 yang mencapai nilai Rp.9.782.835.525.026. Angka ini melebihi target investasi Tahun 2023 sebesar Rp. 7.264.178.519.952, sehingga Capaian tingkat pertumbuhan nilai investasi sebesar 51,38%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 70. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	36,22	90,63	51,38	1,75	1,77	1,79

Sumber: DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara 2023

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 71. Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	999.081.840,00	99,91
2	Program Promosi Penanaman Modal	950.000.000,00	1.295.494.400,00	1.286.579.471,00	99,31
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	1.148.907.057,00	91,91
Total		2.950.000.000,00	3.545.494.400,00	3.434.568.368,00	96,87

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.3.434.568.368,00 dari anggaran sebesar Rp. 3.545.494.400,00 atau 96,87%. Realisasi keuangan sebesar 96,87% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 168,62%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Adapun Faktor pendukung antara lain sebagai berikut :

1. Besarnya dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penanaman Modal dan Perizinan;
2. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara dan Iklim yang baik, sangat mendukung Investasi di sektor Pariwisata, Pertambangan, Perkebunan, Pertanian dan perikanan;
3. Posisi geografis yang strategis karena sebagai IKN;
4. Infrastruktur transportasi yang mulai membaik.

Dan adapun hambatan- hambatan yang ada, antara lain sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data dan Peta Potensi Investasi menuju sektor hilirisasi yang berstandar IPRO (Investment Project To Over);
2. Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Fasilitas kemudahan Penanaman Modal belum juga disahkan menjadi PERDA Pemberian Fasilitas/ Insentif Kemudahan Berusaha.

13. Analisis Kinerja Sasaran 13: “Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih” dengan indikator Cakupan Layanan Air Bersih dan Presentase Rumah Layak Huni mencapai 96,87% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 72. Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	90,74	82,18	90,57
17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	90,62	93,49	103,17
Rata-Rata Capaian					96,87

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Cakupan Layanan Air Bersih

Indikator Kinerja Utama Cakupan Layanan Air Bersih adalah Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih / Jumlah rumah tangga dikali 100. Sumber data berasal dari Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Mahakam” dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk data non perpipaan, dengan asumsi perhitungan 1 KK = 4 Jiwa.

Cakupan Layanan Air Bersih

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\% \\
 &= \frac{161.911}{197.028} \times 100\% = \underline{\underline{82,18\%}}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- a) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih diperoleh dari perhitungan jumlah Layanan PDAM, Perpipaan Perdesaan dan Non Perpipaan.
- b) Jumlah rumah tangga diperoleh dari proyeksi jumlah jiwa diseluruh kabupaten/kota tersebut dibagi 4 jiwa/kk.



Pembangunan Boster Loa Ipuh Darat dan Jembatan Pipa JDU menuju Boster Kecamatan Tenggarong

Capaian kinerja Indikator Cakupan Layanan Air Bersih Tahun 2023, meningkat cukup tinggi, yaitu Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih meningkat sebesar 29.951, jika dibandingkan Tahun 2022, dengan total rumah tangga yang mendapat akses air bersih sebesar 131.960.

Secara umum nilai capaian Indikator Cakupan Layanan Air Bersih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Pada Tahun 2022, realisasi sebesar 76,68% dari target sebesar 89,32% dengan Capaian Kinerja sebesar 85,85%. Sedangkan pada Tahun 2023, realisasi kinerja sebesar 82,18% dari target yang ditetapkan berdasarkan Renstra periode 2021-2026 sebesar 90,74% dengan Capaian Kinerja sebesar 90,57 %. Dari data yang tersebut diatas terlihat adanya peningkatan Capaian Kinerja dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 4,72%.

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari sungai Mahakam yang didalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air leding, pompa mata air terlindung dan sumur terlindung.

Tabel 73. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Layanan PDAM	Perpipaan Perdesaan	Non Perpipaan	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih	Capaian
1.	Tenggarong	114.039	28.510	27.597	68	230	28.895	
2.	Tenggarong Seberang	73.060	18.265	13.197	2.596	149	15.942	
3.	Loa Kulu	57.048	14.262	5.258	4.846	2.490	12.594	
4.	Loa Janan	76.051	19.013	15.372	435	410	16.217	
5.	Sebulu	43.329	10.832	3.685	1.228	937	5.850	
6.	Anggana	38.674	9.669	4.012	1.065	1.588	6.665	
7.	Muara Badak	50.666	12.672	3.081	3.063	4.211	10.355	
8.	Muara Jawa	44.070	11.018	5.940	2.988	581	9.509	
9.	Samboja	73.120	18.280	6.056	2.792	3.471	12.319	
10.	Sanga-Sanga	20.969	5.242	3.402	-	118	3.520	
11.	Kota Bangun	38.307	9.577	3.074	3.705	1.527	8.306	

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Layanan PDAM	Perpipaan Perdesaan	Non Perpipaan	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih	Capaian
12.	Muara Wis	9.730	2.433	758	1.065	243	2.066	
13.	Marangkayu	29.244	7.311	2.339	2.273	848	5.460	
14.	Muara Kaman	46.309	11.577	4.516	2.997	2.131	9.644	
15.	Muara Muntai	21.234	5.309	2.955	946	767	4.668	
16.	Kenohan	12.346	3.087	915	1.102	662	2.679	
17.	Kembang Janggut	26.620	6.655	2.879	2.503	116	5.498	
18.	Tabang	13.277	3.319	902	1.637	185	2.724	
TOTAL		788.113	197.028	105.938	35.309	20.664	161.911	82,18

Sumber Data:

- Bidang Penyehatan Lingkungan DPKP dan PDAM Tahun 2023
- Jumlah rumha tangga (sasaran) merupakan hasil konversi dari jumlah penduduk (jiwa) dengan asumsi 1 rumah tangga = 4 jiwa
- Jumlah penduduk menggunakan sata per semester II Tahun 2023

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program.

1. Salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber air bersih, belum meratanya pelayanan penyediaan air bersih terutama di perdesaan dan sumber air bersih yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga.
2. Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih masih jauh dari kebutuhan, sementara seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka Sambungan Rumah (SR) untuk memenuhi kebutuhan air bersih pun semakin bertambah. Apalagi dengan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 27.263,10 Km² dan terdiri dari 20 Kecamatan.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program

1. Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut menggunakan sumber dana dari APBD murni.

2. Pada tahun 2023, dalam rangka melaksanakan Misi ke 4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program dedikasi KUKAR IDAMAN yang salah satunya adalah Program Air Bersih Desa, program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang menunjang keberhasilan Indikator yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Kegiatan yang dilaksanakan seperti yang terdapat di dalam matrik berikut:

Tabel 74. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran terkait penyediaan air bersih Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	4.883.500.000
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	93.504.024.000
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	22.777.073.902
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	62.172.970.289
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	60.659.000.000
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	79.598.944.850
		Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	13.973.611.882
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	14.742.826.143

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

Tabel 75. Daftar Proyek Strategis Tahun 2023

DAFTAR PROYEK STRATEGIS TAHUN 2023			
Pembangunan Boster Loa Ipuh Darat dan Jembatan Pipa JDU Menuju Boster Kecamatan Tenggarong	Pembangunan WTP Kaps 100 Ltr/Dtk SPAM Bukit Biru dan Prasarannya Kecamatan Tenggarong	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi JDU dari Loa Ipuh Darat Menuju Bensamar Kecamatan Tenggarong	

DAFTAR PROYEK STRATEGIS TAHUN 2023		
Pembangunan SPAM Lengkap 50 Ltr/Dtk Argosari Kecamatan Samboja Darat (MCP KPK)	Pembangunan WTP Kaps 100 Ltr/Dtk SPAM Sukarame Kota Tenggara	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Karya Merdeka Beserta Boster Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Darat
Pembangunan WTP 50 Ltr/Dtk SPAM Sei Merdeka beserta prasarananya	Optimalisasi SPAM IKK Tenggara	Pengadaan Material Bedah Rumah (MCP KPK)



Pembangunan WTP 50 Ltr/Dtk SPM Sei Merdeka beserta prasarananya

Persentase Rumah Layak Huni

Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah Layak Huni adalah Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Seluruh Rumah di wilayah pemda x 100%

Cakupan Rumah Layak Huni

$$= \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda}} \times 100\%$$

$$= \frac{173.370}{185.000} \times 100\%$$

$$= \underline{\underline{93,49 \%}}$$

185.433

Keterangan:

- Jumlah seluruh rumah diwilayah pemda sumber data diperoleh dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2019.
- Untuk mendapatkan jumlah rumah tidak layak huni adalah dengan cara mengurangkan data DTKS dikurangi dengan jumlah rumah yang telah di rehabilitasi baik melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH), Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Jumlah rumah tidak layak huni = 13.420 - (790+268+120+179)
= 13.420 – 1.357
= 12.063 Unit Rumah Tidak Layak Huni.

Jumlah rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh rumah dikurangi jumlah rumah tidak layak huni.

185.433 – 12.063 = 173.370 Unit Rumah Layak Huni.

$$\begin{aligned} &= \frac{173.370}{185.433} \times 100 \\ &= 93,49 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan data tersebut, maka nilai capaian Indikator Cakupan Rumah Layak Huni dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 92,76% dari target sebesar 90,35% sehingga diperoleh Capaian Kinerja sebesar 102,67%. Sedangkan pada Tahun 2023, realisasi kinerja sebesar 93,49% dari target yang ditetapkan sebesar 90,62% dengan Capaian Kinerja sebesar 103,17%. Dari data yang tersebut diatas terlihat adanya peningkatan Capaian Kinerja dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 0,5%.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya (Sumber: UU NOMOR 01 TAHUN 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)).

Rumah yang layak huni dan sehat menjadi kebutuhan setiap masyarakat. Untuk memiliki rumah yang layak huni, setidaknya harus memenuhi lima syarat penting, yaitu:

- a. Ketahanan dan keselamatan bangunan;
- b. Kecukupan luas ruang penghuni;
- c. Adanya luas luasan pencahayaan dan penghawaan;
- d. Akses sanitasi layak;
- e. Akses air minum layak.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan Program adopsi dari BSPS. Pengadaan rumah secara swadaya ini telah banyak merumahkan masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, permasalahan yang muncul dari pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas adalah minimnya perencanaan dan pengetahuan teknis mengenai rumah layak huni (RLH). Hal ini menyebabkan kondisi rumah yang dibangun dalam jangka panjang menjadi tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH. Karena itulah, pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program

Bertambahnya jumlah penghunian rumah yang layak huni melalui skema R-RTLH, meningkatnya sistem pelaksanaan program Rumah Swadaya,

serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan program Rumah Swadaya.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Di tahun 2023 ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta dalam rangka melaksanakan Misi ke 4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program dedikasi KUKAR IDAMAN yang salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas permukiman masyarakat, menetapkan 3 Zona yang terdiri dari Zona Tengah, Zona Hulu dan Zona Pesisir untuk memperoleh bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak

Layak Huni (R-RTLH) melalui alokasi dana APBD. Dari 1000 Unit rumah yang rencananya akan direhabilitasi sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan terealisasi sebanyak 853 Unit. Data realisasi tersebut didapatkan dari akumulasi hasil Rekapitulasi Perhitungan Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan RTLH Provinsi dll dengan rincian sebagai berikut:

- Perbaikan rumah tidak layak huni = 574 Unit
 - BSPS (Pusat) = 265 Unit
 - CSR (BSSR) = 3 Unit
 - Rehabilitasi RTLH dilokasi Kumuh = 11 Unit
- Total Jumlah Rumah (R-RTLH) = 853 Unit

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Indikator ini dilaksanakan dengan Program Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Tabel 76. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran terkait rumah layak huni Tahun 202

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	263.615.440,00
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	59.952.066.000,00

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2023

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (R RTLH)

Program Rehabiliatsi Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan Program adopsi dari BSPS. Pengadaan rumah secara swadaya ini telah banyak merumahkan masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, permasalahan



yang muncul dari pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas adalah minimnya perencanaan dan pengetahuan teknis mengenai rumah layak huni (RLH). Hal ini menyebabkan kondisi rumah yang dibangun dalam jangka panjang menjadi tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH. Karena itulah, pemerintah

melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

TUJUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (R RTLH)

Bertambahnya jumlah penghunian rumah yang layak huni melalui skema R RTLH, meningkatnya sistem pelaksanaan program Rumah Swadaya, serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan program Rumah Swadaya.



DEFINISI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (R RTLH)

Adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).



Di tahun 2023 ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta dalam rangka melaksanakan Misi ke 4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program dedikasi KUKAR IDAMAN yang salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas permukiman masyarakat, di Tahun 2023 sebanyak 564 unit rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, yang tersebar di 15 Kecamatan. Jumlah yang mendapat bantuan rehabilitasi di Tahun 2023 lebih banyak

dibandingkan Tahun 2022 dengan total sebanyak 517 Unit rumah yang direhabilitasi, atau meningkat 47 unit rumah.



Tabel 77. Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RTLH) Tahun 2023

Zona	Tahap	Jumlah Unit Rumah Per Zona	Kecamatan	Jumlah Unit Rumah Per Kecamatan	Keterangan
Tengah	I	226	Tenggarong	58	13 Kelurahan dan Desa
			Tenggarong Seberang	39	12 Desa
			Loa Janan	30	7 Desa
			Loa Kulu	99	13 Desa
Pesisir	I	148	Samboja Barat	40	8 Kelurahan
			Samboja	14	6 Kelurahan
			Anggana	20	4 Desa
			Muara Jawa	18	6 Kelurahan
			Muara Badak	51	10 Desa
			Marangkayu	4	1 Desa
			Sangasanga	1	1 Kelurahan
Hulu	I	90	Kota Bangun	19	9 Desa
			Kota Bangun Darat	38	8 Desa
			Kembang Janggut	17	7 Desa
			Kenohan	16	5 Desa
Tengah	II	100	Tenggarong	95	7 Kelurahan
			Tenggarong Seberang	5	2 Desa
Total		564			

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

Tabel 78. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	76,67	82,54	92,16	93,58	95
17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	92,76	93,39	93,49	90,89	91,16	91,44

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2023

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 79. Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Perumahan	7.276.384.560,00	10.566.929.560,00	9.739.561.561,00	92,17
2	Program Kawasan Permukiman	2.113.615.440,00	4.113.615.440,00	2.186.134.500,00	53,14
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	61.000.000.000,00	59.952.066.000,00	32.602.134.700,00	54,38
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	55.975.000.000,00	202.291.281.500,00	183.684.522.884,16	90,80
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	213.065.287.752,00	352.311.951.066,00	338.306.654.717,00	96,02
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	26.200.000.000,00	31.124.479.000,00	29.486.508.326,00	94,74
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	428.942.796.371,00	494.922.931.371,00	429.395.466.775,00	86,76
8	Program Pengelolaan Persampahan	12.070.000.000,00	45.514.199.142,00	41.712.715.961,00	91,65
Total		806.643.084.123,00	1.200.797.453.079,00	1.067.113.699.424,16	88,87

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.1.067.113.699.424,16 dari anggaran sebesar Rp.1.200.797.453.079,00 atau 88,87%. Realisasi keuangan sebesar 88,87% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,87%, maka terjadi ketidak efisiensi

penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walau penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Selain itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan kegiatan pendampingan dan fasilitasi kegiatan APBN seperti PISEW, BSPS dan KOTAKU.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Indikator ini dilaksanakan dengan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

14. Analisis Kinerja Sasaran 14: “Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah” dengan indikator Indeks Aksesibilitas Wilayah mencapai 90,62% dan termasuk predikat “Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 80. Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	85,18	77,19	90,62

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2023

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Aksesibilitas Wilayah} = \frac{\text{Jalan Mantap} + \text{Aksesibilitas}}{2}$$

$$\text{Indeks Aksesibilitas Wilayah} = \frac{65,497 + 88,89}{2} = 77,19$$

Keterangan:

$$\text{Aksesibilitas} = \frac{\text{jumlah Kecamatan terhubung}}{\text{total Kecamatan}} \times 100 \%$$

Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas dari 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ada 2 kecamatan yang belum terhubung jalur darat dengan ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Muara Wis, dan ada beberapa desanya terletak di pulau dan kawasan lindung daerah gambut sehingga tidak dapat terkoneksi melalui jalur darat. Dari 237 jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, ada 11 desa yang belum terhubung jalur darat, dari 11 desa tersebut ada 7 desa yang tidak bisa terhubung jalur darat karena kondisi wilayah. Data sebaran desa tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Grafik 29. Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Desa yang Belum Terhubung Jalur Darat	Desa yang Tidak Bisa Terhubung Jalur Darat
1	Muara Muntai	13	1 Desa (Desa Jantur)	1 Desa (Desa Jantur)
2	Loa Kulu	15		
3	Loa Janan	8		
4	Anggana	8	3 Desa (Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru)	3 Desa (Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru)
5	Muara Badak	13		
6	Tenggarong	14		
7	Sebulu	14		
8	Kota Bangun	11		
9	Kenohan	9		
10	Kembang Janggut	11		
11	Muara Kaman	20	5 Desa (Desa Kupang Baru, Desa Liang Buaya, Desa Muara Siran, Desa Bukit Jering, Desa Tunjungan)	3 Desa (Desa Liang Buaya, Desa Muara Siran, Desa Bukit Jering)
12	Tabang	19		

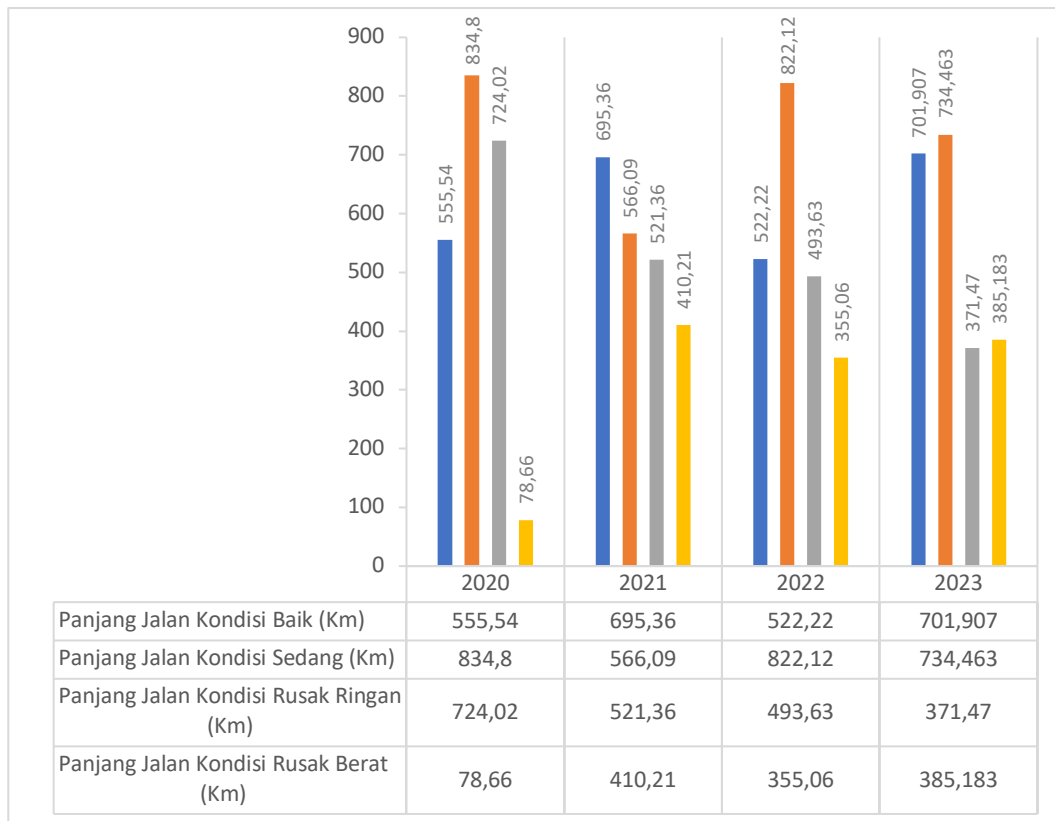
No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Desa yang Belum Terhubung Jalur Darat	Desa yang Tidak Bisa Terhubung Jalur Darat
13	Samboja	13		
14	Muara Jawa	8		
15	Sanga-Sanga	5		
16	Tenggarong Seberang	18		
17	Marangkayu	11		
18	Muara Wis	7	2 Desa (Desa Enggelam, Desa Muara Enggelam)	
19	Kota Bangun Darat	10		
20	Samboja Barat	10		
TOTAL		237	11 Desa	7 Desa

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara

Di Kecamatan Anggana terdapat 3 (tiga) desa yang terletak di pulau yaitu Desa Muara Pantuan, Desa Sepatin, dan Desa Tani Baru. Ketiga desa tersebut sulit dihubungkan melalui jalur darat karena lokasinya yang berada pulau dan Muara Selat Makassar. Selain itu, 3 (tiga) desa di Kecamatan Muara Kaman yaitu Desa Liang Buaya, Desa Bukit Jering, dan Desa Muara Siran juga sulit terhubung melalui jalur darat. Desa Liang Buaya tidak dapat terkoneksi karena desa tersebut masuk dalam kawasan lindung daerah gambur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 590/526/001/A.Ptn/2013 tentang Penunjukan Konservasi Sebaran lahan Gambut Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Desa Bukit Jering dan Desa Muara Siran berada di lokasi yang terpisah dari Kecamatan Muara Kaman oleh Sungai Mahakam dan Sungai Kedang Kepala dan di Kecamatan Muara Muntai ada Desa Jantur.

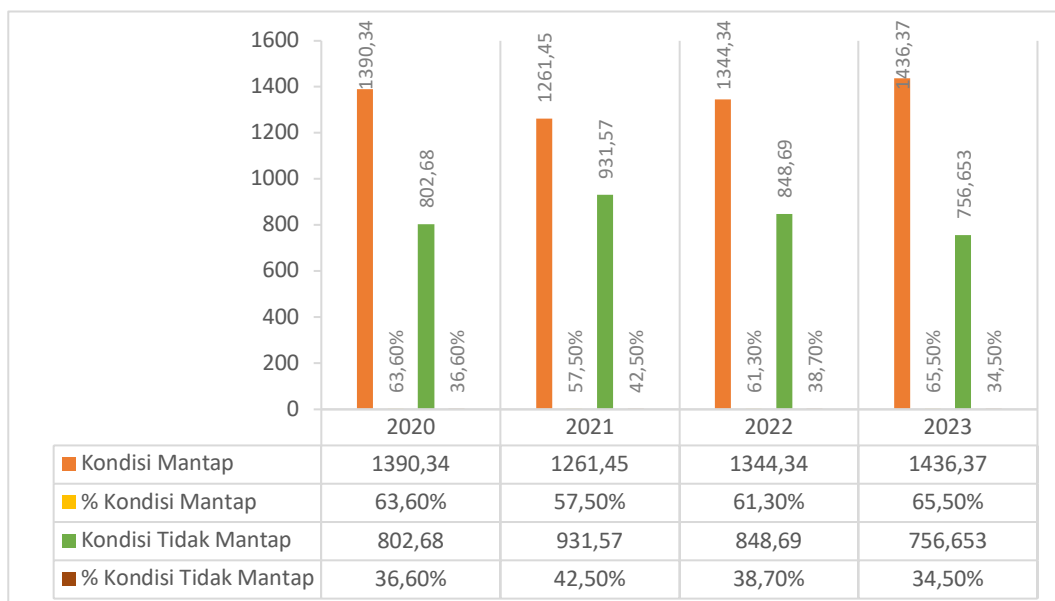
Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah dengan indikator Indeks Aksesibilitas Wilayah Tahun 2023 sebesar 77,19, capaian ini lebih tinggi 1,54% dari capaian kinerja di Tahun 2022 yaitu sebesar 75,65%. Berikut disajikan grafik perbandingan kondisi jalan dan perbandingan kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2023:

Grafik 30. Perbandingan Kondisi Jalan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara

Grafik 31. Panjang Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara 2023

capaian ini meningkat dari capaian di Tahun 2022 sebesar 75,65%, hal ini diperoleh karena adanya peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 4,2% atau peningkatan panjang jalan mantap sebesar 92,03 Km di Tahun 2023 dibandingkat Tahun 2022. Kondisi jalan mantap di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 81. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	n.a	75,65	77,19	86,18	87,18	88,18

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 82. Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.800.000.000,00	4.946.570.500,00	4.530.564.688,00	91,59
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	175.145.043.240,00	205.630.754.119,00	131.200.140.919,00	63,80
3	Program Penyelenggaraan Jalan	541.264.984.667,00	869.715.299.967,00	647.672.768.483,00	74,47
Total		719.210.027.907,00	1.080.292.624.586,00	783.403.474.090,00	72,52

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.783.403.474.090,00 dari anggaran sebesar Rp.1.080.292.624.586,00 atau 72,52%. Realisasi keuangan sebesar 72,52%, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 90,62%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

- a. Wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan, terutama di peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan seperti fasilitas penerangan jalan umum secara umum meningkat.

15. Analisis Kinerja Sasaran 15: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 98,56% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 83. Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,47	72,41	98,56

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2023

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang

selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. Dan IKLH kabupaten/kota meliputi IKA, IKU, dan IKL.



Keterangan: Sampling Udara Ambien Sampler Kec.
Kota Bangun

Mulai tahun 2020, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan

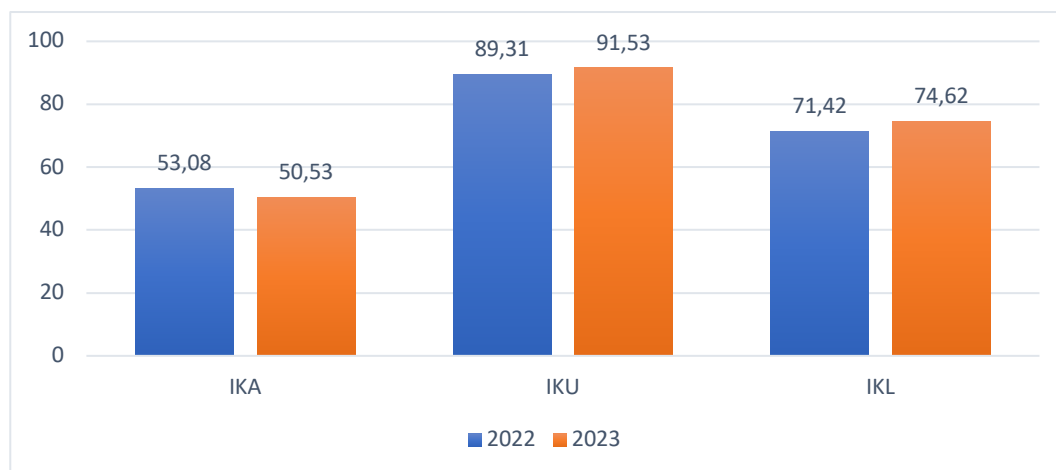
hutan, kawasan fungsi lindung.

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.

Grafik 32. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 - 2023



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2023

Terhitung mulai Tahun 2020 Perhitungan IKLH mulai diterapkan secara online melalui aplikasi: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>. Dalam aplikasi ini masing-masing Pemerintah Daerah hanya memasukan hasil uji laboratorium parameter pada masing-masing Indeks, dan sistem akan menghitung dan menghasilkan nilai akhir untuk masing-masing indeks.

Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep Environmental Quality Index (EQI) dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

$$IKLH \frac{Kab}{Kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

$$IKLH \frac{Kab}{Kota} = (0,376 \times 50,53) + (0,405 \times 91,53) + (0,219 \times 74,62)$$

$$IKLH \text{ Kab. Kutai Kartanegara} = 72,41 = \text{Kategori IKLH "BAIK"}$$

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 84. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,76	71,77	72,41	73,81	74,15	74,51

Sumber: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 85. Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.080.247.395,00	1.480.247.395,00	1.277.488.085,00	86,30
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.420.000.000,00	4.010.276.000,00	3.564.035.378,00	88,87
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	285.000.000,00	285.000.000,00	255.095.720,00	89,51
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	600.000.000,00	520.000.000,00	476.927.668,00	91,72
5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	305.000.000,00	4.491.000.000,00	4.112.421.500,00	91,57
Total		4.690.247.395,00	10.786.523.395,00	9.685.968.351,00	89,80

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.9.685.968.351,00 dari anggaran sebesar Rp.10.786.523.395,00 atau 89,80%. Realisasi keuangan sebesar 89,80% dibandingkan dengan

capaian kinerja sasaran sebesar 98,56%, maka terjadi ketidak efisienan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Jika dilihat dari realisasi IKLH tahun 2023 sebesar 72,41, capaian ini lebih tinggi 0,64 dari capaian IKLH di Tahun 2022 yaitu 71,77. Nilai capaian hanya sekitar 98,56 % dari target IKLH 73,47 Namun tetap masuk dalam Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup “BAIK”. Adapun beberapa hal yang menyebabkan realisasi IKLH tidak dapat tercapai sesuai dengan yang ditarget dikarenakan beberapa hal:

- a. Tidak terpenuhinya target pada Indeks Kualitas Air, IKA : Target = 57,42 Realisasi = 50,53. Pelaksanaan Pemantauan air permukaan pada 31 titik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kutai Kartanegara sebanyak 16 titik, Pusat sebanyak 6 titik, dan Provinsi sebanyak 9 titik (penentuan titik pantau berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-155/DLHK/BID III.1/663.1/02/22 Tentang Penetapan Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2023.
- b. Metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperketat lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 dengan jumlah 8 parameter uji (pH,TSS,DO,BOD,COD,NO3-N,Fecal Coli,Total Phospat) tetapi pada tahun 2022 menggunakan Metode perhitungan PerMen LHK nomor 27 Tahun 2021 dengan Aplikasi IKLH.
- c. Pola Hidup Masyarakat di bantaran sungai yang menyebabkan Parameter Fecal Coliform masih diatas baku mutu hal ini disebabkan karena kondisi sungai kita yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik.

- Belum adanya IPAL Komunal untuk mengatasi limbah domestik di Wilayah Perkotaan dan perdesaan;
- Belum adanya pengolahan air limbah dari usaha kecil

Berikut beberapa sungai yang nilai parameter Fecal Coli di atas baku mutu:

Tabel 86. Sungai yang nilai parameter *Fecal Coli* di atas Baku Mutu

Sungai	Baku Mutu Sungai Kelas 2	Hasil Sample (<i>fecal coliform</i> mg/l)
Danau Semayang Kec. Kenohan	1000	1726
Sungai Perian	1000	>2419,6
Jembayan Desa Jonggon	1000	2419,6
Sungai Merdeka Jalan Poros SMD-BPP	1000	2419,6
Anggana	1000	2419,6
Danau Jempang Desa Jantur	1000	6867
Kedang Rantau Hilir	1000	>2419,6
Intake PDAM Sanga-Sanga	1000	1091,5

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2023

Meskipun capaian pada tahun 2023 belum tercapai namun secara umum berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pencemaran dengan status mutu air permukaan, sungai memenuhi baku mutu 3, Tercemar ringan 28 dan tercemar sedang dan berat 0 (tidak ada).

16. Analisis Kinerja Sasaran 16: “Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah” dengan indikator Indeks Risiko Bencana mencapai 92,59% dan termasuk predikat “Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 87. Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	106,42	114,3	92,595

Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasar-kan rumus berikut: $Risk = Hazard \times Vulnerability$. Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan)



dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

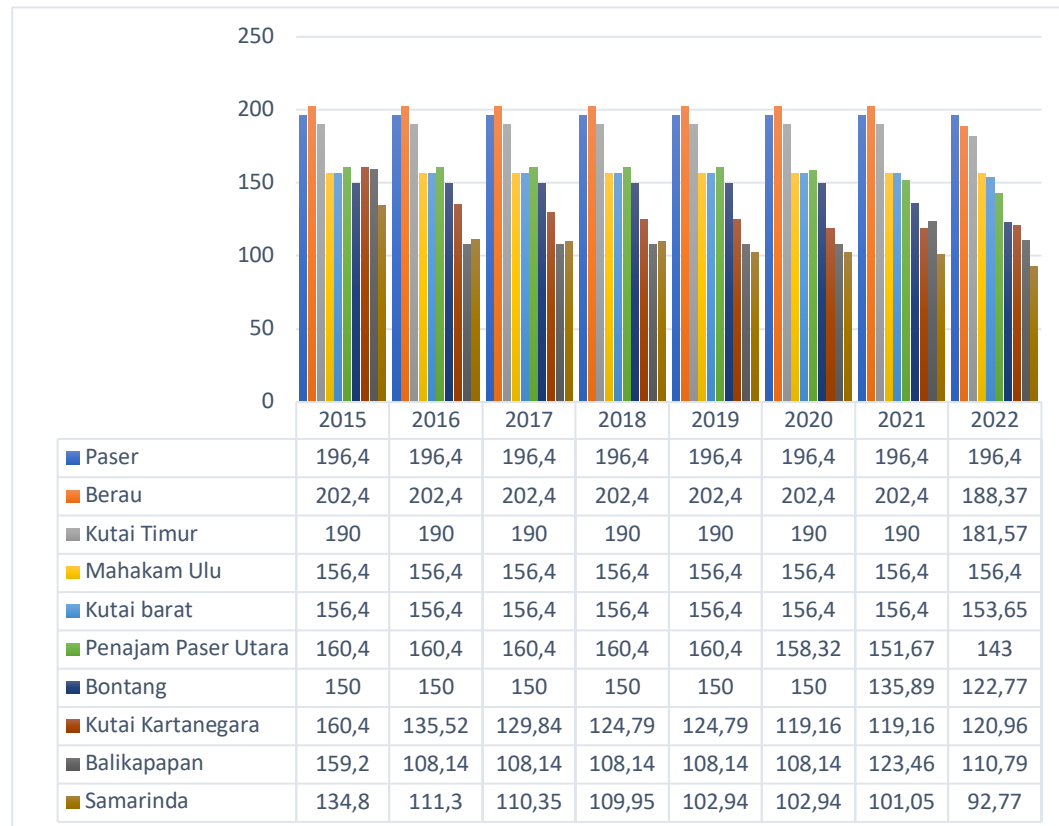


Sampai saat ini nilai Indeks Risiko Bencana hasil perhitungan dari IRBI oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB. Berdasarkan Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-035/BNPB/PERB/SS.01.03/02/2024 Tanggal 06 Februari 2024, Nilai

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah

114,30 dan masuk ke tingkat RESIKO SEDANG. Capaian ini meningkat 6,66 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yaitu sebesar 120,96.

Tabel 88. Indeks Resiko Bencana Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2022



Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 89. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,16	120,96	114,3	104,28	102,14	100

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 90. Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Penanganan Bencana	625.000.000,00	1.744.224.000,00	1.352.197.531,00	77,52
2	Program Penanggulangan Bencana	4.099.895.550,00	6.064.895.550,00	4.656.315.029,00	76,77
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.527.541.280,00	1.917.617.350,00	1.808.420.766,00	94,31
Total		8.252.436.830,00	9.726.736.900,00	7.816.933.326,00	80,37

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 7.816.933.326,00 dari anggaran sebesar Rp. 9.726.736.900,00 atau 80,37%. Realisasi keuangan sebesar 80,37% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 92,59%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

- Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat di daerah rawan bencana.
- Belum adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) atau forum sejenis yang terbentuk beranggotakan pemerintah daerah, dunia usaha, perwakilan masyarakat, akademisi atau pakar serta media.

Berikut Rekapitulasi Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 91. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		Ket
					2022	2023	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	67,4	67,86	Meningkat 0,46
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,38	8,66	Meningkat 0,28
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	9,81	8,41	Menurun 1,4
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,687	0,679	Menurun 0,008
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	47,42	53,23	Meningkat 5,81
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,811	0,812	Meningkat 0,001
6	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,8	79,8)*	Data tahun sebelumnya karena angka kinerja tahun 2023 belum tersedia
7	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,269	0,284	Menurun 0,015
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,747	0,776	Meningkat 0,029
8	Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	7,96	4,05	Meningkat 3,91
		11	PDRB per Kapita	Nilai	254,5	270,72	Meningkat 16,22
9	Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,91	2,91	Meningkat 1
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,74	3,74)*	Data tahun sebelumnya karena angka kinerja tahun 2023 belum tersedia
11	Berkembangnya Ekosistem Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,96	6,96)*	Data tahun sebelumnya karena angka kinerja tahun 2023 belum tersedia

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		Ket
					2022	2023	
12	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	90,63	51,38	Meningkat 39,25
13	Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	76,68	82,18	Meningkat 5,5
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	93,39	93,49	Meningkat 0,1
14	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	75,65	77,19	Meningkat 1,54
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,77	72,41	Meningkat 0,64
16	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	120,96	114,3	Meningkat 6,66

*) menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2022), karena angka kinerja tahun 2023 belum tersedia.

Dari data pada tabel diatas secara garis besar capaian kinerja 2023 menunjukkan angka peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2022, namun terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang menunjukkan angka penurunan yaitu pada indikator Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik, Indeks Pendidikan, dan Indeks Gini. Dan ada 3 (tiga) indikator yang menggunakan data capaian tahun sebelumnya, karena data Tahun 2023 belum tersedia.

2.3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

- Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata - rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 92. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

NO	Sasaran	Rata-rata Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	KET
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	96,94	205.860.925.019	195.308.642.289	94,87%	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	133,23	938.273.095.555	715.386.407.172	76,25%	Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	94,49	42.154.841.036	39.904.786.587	94,66%	Tidak Efisien
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	101,41	1.306.985.307.293	909.500.358.013	69,59%	Efisien
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	99,75	337.961.762.207	297.778.891.027	88,11%	Tidak Efisien
6	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	100,95	6.327.480.083	4.549.691.376	71,90%	Efisien
7	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat	102,80	69.028.939.508	65.451.125.511	94,82%	Efisien
8	Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	127,16	33.368.400.000	31.042.538.324	93,03%	Efisien
9	Meningkatnya Pengelolaan	47,32	796.813.226.370	725.846.297.858	91,09%	Tidak Efisien

NO	Sasaran	Rata-rata Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	KET
	Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah					
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	149,00	68.834.571.000	67.281.772.424	97,74%	Efisien
11	Berkembangnya Ekosistem Kreatif	106,26	3.571.987.000	3.500.252.967	97,99%	Efisien
12	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	168,62	3.545.494.400	3.434.568.368	96,87%	Efisien
13	Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih	96,87	1.200.797.453.079	1.067.113.699.424	88,87%	Tidak Efisien
14	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	77,19	1.080.292.624.586	783.403.474.090	72,52%	Tidak Efisien
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	72,41	10.786.523.395	9.685.968.351	89,80%	Tidak Efisien
16	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	114,30	9.726.736.900	7.816.933.326	80,37%	Efisien

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 16 sasaran menunjukkan 9 (sembilan) efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, terdapat 7 (tujuh) sasaran tidak efisien, karena kinerja tidak mencapai 100%. Dari 7 (tujuh) sasaran yang tidak efisien, ada sebanyak 6 (enam) sasaran yang tidak mencapai target namun penyerapan anggaran lebih rendah dari capaian kinerja, dan terdapat 3 (tiga) sasaran yang penyerapan anggaran lebih besar dari capaian kinerja.

b. Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebanyak 14.930 paket non tender pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.288.958.139.050,00 dan total setelah ditetapkan HPS turun

menjadi sebesar Rp. 1.251.808.424.404,00 dan dalam proses pelaksanaan pemilihan setelah dilakukan negosiasi oleh kelompok kerja pemilihan anggaran turun menjadi sebesar Rp. 1.251.808.424.404,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 37.149.714.646, 00 atau sebesar 2,88% dari total HPS. Sedangkan untuk Paket Tender sebanyak 1.296 Paket, diperoleh efisiensi anggaran sebesar 0,75% atau sebesar Rp. 18.458.958.735. Efisiensi ini diperoleh dari selisih pagu anggaran sebesar Rp. 2.454.866.438.750,00 dengan HPS dan realisasi sebesar Rp. 2.436.407.480.015,00.

Sedangkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai Rp. 2.850.569.357.806,00, dengan rincian Rp. 1.900.002.997.757,00 dari Paket Tender dan Rp. 950.566.360.049,00 dari paket pengadaan NonTender.

Tabel 93. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

Kriteria	Jumlah Paket	Pagu	HPS	Realisasi	Selisih	Efisiensi	PDN/ TKDN
Tender	1.296	2.454.866.438.750	2.436.407.480.015	2.436.407.480.015	18.458.958.735	0,75%	1.900.002.997.757
Nontender	14.930	1.288.958.139.050	1.251.808.424.404	1.251.808.424.404	37.149.714.646	2,88%	950.566.360.049
Dikecualikan	12	1.132.384.700	416.990.572	416.990.572	715.394.128	63,18%	-
Paket E-Purchasing	6307	2.851.778.044.383	2.746.077.617.168	2.746.077.617.168	105.700.427.215	3,71	-

Sumber Data: Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2023

Dari keseluruhan penjabaran diatas dapat disimpulkan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 94. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	% Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	70,00	67,860	96,943
Rata-rata Capaian							96,943
2	Meningkatnya akuntabilitas	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,50	8,660	133,231

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	% Capaian
	pengelolaan keuangan daerah						
Rata-rata Capaian							133,231
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,90	8,410	94,494
Rata-rata Capaian							94,494
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,697	0,679	97,418
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	50,50	53,230	105,406
Rata-rata Capaian							101,412
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,814	0,812	99,754
Rata-rata Capaian							99,754
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,05	79,800)*	100,949
Rata-rata Capaian							100,949
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,280	0,284	98,571
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,725	0,776	107,034
Rata-rata Capaian							102,803
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,650	4,050	112,903
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	191,44	270,720	141,412
Rata-rata Capaian							127,158
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,150	2,910	47,317
Rata-rata Capaian							47,317
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,510	3,740)*	149,004
Rata-rata Capaian							149,004
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,550	6,960)*	106,260
Rata-rata Capaian							106,260
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	30,470	51,380	168,62
Rata-rata Capaian							168,625
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	90,740	82,180	90,566
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	90,620	93,490	103,167
Rata-rata Capaian							96,867

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	% Capaian
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	85,180	77,190	90,620
Rata-rata Capaian							90,620
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,470	72,410	98,557
Rata-rata Capaian							98,557
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	106,420	114,300	92,595
Rata-rata Capaian							92,595

)* menggunakan angka kinerja tahun sebelumnya (2022), karena angka kinerja tahun 2023 belum tersedia

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori "sangat berhasil" sebanyak 12 sasaran, atau 75%;
- Capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori "berhasil" sebanyak 3 sasaran, atau 18,75%;
- Capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori "cukup berhasil" sebanyak 0 sasaran, atau 0%.
- Capaian kinerja 0 s/d $<50\%$ kategori "kurang berhasil" sebanyak 1 sasaran, atau 6,25%.

Jika membandingkan antara capaian Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 2.3.78 berikut:

Tabel 95. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dibanding dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2023 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KEt
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	66,35	67,4	67,860	73,00	77,00	80,01	84,81	-12,15	-15,19	
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,166	8,38	8,660	6,75	6,80	7,00	123,71	1,66	23,71	Capaian 2023 telah melebihi targetakhir RPJMD
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	9,81	8,410	8,95	9,00	9,05	92,93	-0,64	-7,07	
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,687	0,679	0,70	0,70	0,71	96,18	-0,03	-3,82	
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n.a	47,42	53,230	51,00	51,50	53,00	100,43	0,23	0,43	Capaian 2023 telah melebihi targetakhir RPJMD
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,81	0,812	0,82	0,82	0,82	98,54	-0,01	-1,46	
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,8	79,80	79,10	79,15	79,20	100,76	0,60	0,76	Capaian 2023 telah melebihi targetakhir RPJMD
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,269	0,284	0,28	0,27	0,27	94,81	-0,01	-5,19	
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,747	0,776	0,75	0,77	0,79	98,85	-0,01	-1,15	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2023 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KEt
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	5,660	4,140	4,05	4,40	4,25	4,10	101,22	0,05	1,22	Capaian 2023 telah melebihi targetakhir RPJMD
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	241,7	254,5	270,72	197,62	202,16	204,69	132,26	66,03	32,26	
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	1,02	1,91	2,91	6,60	7,05	7,50	38,80	-4,59	-61,20	
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	3,74	3,74	3,42	4,00	4,23	88,42	-0,49	-11,58	
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,96	6,96	7,09	7,48	7,56	92,06	-0,60	-7,94	
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	36,22	90,63	51,38	30,60	30,75	30,90	166,28	20,48	66,28	Capaian 2023 telah melebihi targetakhir RPJMD
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	76,67	82,18	92,16	93,58	95,00	86,51	-12,82	-13,49	
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	92,76	93,39	93,49	90,89	91,16	91,44	102,24	2,05	2,24	Capaian 2023 telah melebihi targetakhir RPJMD
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	n.a	75,65	77,19	86,18	87,18	88,18	87,54	-10,99	-12,46	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,76	71,77	72,41	73,81	74,15	74,51	97,18	-2,10	-2,82	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2023 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KEt
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,16	120,96	114,30	102,14	102,14	100,00	85,70	-14,30	-14,30	

BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pada Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara **tidak mendapatkan pelaksanaan tugas pembantuan** baik itu dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa SPM Bidang Pendidikan meliputi:

e. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.

f. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs).

g. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci penetapan target Pencapaian SPM pada Penerima Layanan dan Mutu Layanan dengan Anggaran Penunjang Capaian SPM pada tabel berikut.

Tabel 96. Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
1	Pendidikan PAUD		100%	130.742.107.582
	Jumlah peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD		28.645	
		Angka partisipasi sekolah	62,80	
		Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	62,20	
		Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	72,80	
		Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,85	
		Kecukupan formasi guru ASN	113,00	
		Indeks distribusi guru	0,47	
		Proporsi PTK bersertifikat	22,21	
		Proporsi PTK penggerak	11,00	
		Pengalaman pelatihan guru	0,22	
2	Pendidikan Dasar		100%	943.845.353.748
	Jumlah peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs)		139.405	
		(SD) Angka partisipasi kasar	100,00	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		(SD) Angka partisipasi kasar sekolah	100,00	
		(SD) Angka partisipasi murni	100,00	
		(SD) Kemampuan literasi	56,12	
		(SD) Kemampuan numerasi	41,94	
		(SD) Perbedaan Skor Literasi	3,77	
		(SD) Perbedaan Skor numerasi	1,06	
		(SD) Indeks iklim keamanan	68,99	
		(SD) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	59,27	
		(SD) Kecukupan formasi guru ASN	48,54	
		(SD) Indeks distribusi guru	48,54	
		(SD) Proporsi PTK bersertifikat	60,45	
		(SD) Proporsi PTK penggerak	0,06	
		(SD) Pengalaman pelatihan guru	5,98	
		(SMP) Angka partisipasi kasar	100,00	
		(SMP) Angka partisipasi sekolah	100,00	
		(SMP) Angka partisipasi murni	100,00	
		(SMP) Kemampuan literasi	60,57	
		(SMP) Kemampuan numerasi	42,79	
		(SMP) Perbedaan skor literasi	2,70	
		(SMP) Perbedaan skor numerasi	0,42	
		(SMP) Indeks iklim keamanan	71,97	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		(SMP) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	57,89	
		(SMP) Kecukupan formasi guru ASN	48,54	
		(SMP) Indeks Distribusi guru ASN	48,54	
		(SMP) Proporsi PTK bersertifikat	56,31	
		(SMP) Proporsi PTK penggerak	0,22	
		(SMP) Pengalaman pelatihan guru	5,93	
3	Pendidikan Kesetaraan		100%	39.887.573.460
	Jumlah peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan		179.228	
		Angka partisipasi kasar	6.707,00	
		Angka partisipasi sekolah	6.707,00	
		Angka partisipasi murni	6.707,00	
		Kemampuan literasi	49,23	
		Kemampuan numerasi	36,32	
		Perbedaan Skor Literasi	1,15	
		Perbedaan Skor Numerasi	0,74	
		Indeks iklim keamanan	76,78	
		Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	57,48	
		Kecukupan formasi guru ASN		
		Indeks distribusi guru		

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Proporsi PTK bersertifikat		
		Proporsi PTK penggerak		
		Pengalaman pelatihan guru	261,00	

4.1.3. Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 97. Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
		Bobot (80%)	Bobot (20%)	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	67,57%	71,36%	68,33%
2	Pendidikan Dasar	94,14%	86,33%	92,58%
3	Pendidikan Kesetaraan	79,43%	84,13%	80,37%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan				80,43% Tuntas Madya

Berdasarkan 3 jenis pelayanan SPM pada urusan pendidikan Tahun 2023 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan yaitu 80,43% dengan kategori Tuntas Madya. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian Pelayanan Dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023 sebesar 67,57% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 28.645 jiwa dan 19.355 peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.

Tabel 98. Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	28.645	19.355	67,57%	54,05%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023 sebesar 71,36% dari target 100%. Terdapat 4 Mutu Pelayanan Dasar telah melampaui target dari 100% dan masih 5 jenis Mutu Pelayanan Dasar yang belum mencapai 100%.

Tabel 99. Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Angka partisipasi sekolah	62,80	62,80	100,00%	
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	62,20	48,37	77,77%	
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	72,80	72,80	100,00%	
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,85	0,31	8,05%	
5	Kecukupan formasi guru ASN	113,00	60,00	53,10%	
6	Indeks distribusi guru	0,47	0,40	85,11%	
7	Proporsi PTK bersertifikat	22,21	30,90	100%	
8	Proporsi PTK penggerak	11,00	2,00	18,18%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
9	Pengalaman pelatihan guru	0,22	0,33	100%	
Rata-Rata				71,36%	14,27%

b. Pendidikan Dasar

Capaian Pelayanan Dasar pada Pendidikan Dasar Tahun 2023 sebesar 94,15% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 13.9405 jiwa dan 13.1243 peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs).

Tabel 100. Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pendidikan Dasar	13.9405	13.1243	94,15%	75,32%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Dasar Tahun 2023 sebesar 86,33% dari target 100%. 14 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target dari 100% dan masih terdapat 14 jenis Mutu Pelayanan Dasar yang belum mencapai 100%.

Tabel 101. Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Dasar

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	(SD) Angka partisipasi kasar	100,00	104,44	100,00%	
2	(SD) Angka partisipasi kasar sekolah	100,00	99,95	99,95%	
3	(SD) Angka partisipasi murni	100,00	95,99	95,99%	
4	(SD) Kemampuan literasi	56,12	65,35	100,00%	
5	(SD) Kemampuan numerasi	41,94	50,32	100,00%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
6	(SD) Perbedaan Skor Literasi	3,77	2,84	75,33%	
7	(SD) Perbedaan Skor numerasi	1,06	1,04	98,11%	
8	(SD) Indeks iklim keamanan	68,99	69,39	100,00%	
9	(SD) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	59,27	68,50	100,00%	
10	(SD) Kecukupan formasi guru ASN	48,54	16,00	32,96%	
11	(SD) Indeks distribusi guru	48,54	16,00	32,96%	
12	(SD) Proporsi PTK bersertifikat	60,45	87,10	100,00%	
13	(SD) Proporsi PTK penggerak	0,06	0,05	83,33%	
14	(SD) Pengalaman pelatihan guru	5,98	73,80	100,00%	
15	(SMP) Angka partisipasi kasar	100,00	101,67	100,00%	
16	(SMP) Angka partisipasi sekolah	100,00	98,99	98,99%	
17	(SMP) Angka partisipasi murni	100,00	79,32	79,32%	
18	(SMP) Kemampuan literasi	60,57	72,84	100,00%	
19	(SMP) Kemampuan numerasi	42,79	47,60	100,00%	
20	(SMP) Perbedaan skor literasi	2,70	2,45	90,74%	
21	(SMP) Perbedaan skor numerasi	0,42	0,70	100,00%	
22	(SMP) Indeks iklim keamanan	71,97	67,19	93,36%	
23	(SMP) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	57,89	66,59	100,00%	
24	(SMP) Kecukupan formasi guru ASN	48,54	16,50	33,99%	
25	(SMP) Indeks Distribusi guru ASN	48,54	16,50	33,99%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
26	(SMP) Proporsi PTK bersertifikat	56,31	87,70	100,00%	
27	(SMP) Proporsi PTK penggerak	0,22	0,15	68,18%	
28	(SMP) Pengalaman pelatihan guru	5,93	23,50	100,00%	
Rata-Rata				86,33%	17,27%

c. Pendidikan Kesetaraan

Capaian Pelayanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023 sebesar 63,54% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 9.625 jiwa dan 7.645 peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 102. Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pendidikan Kesetaraan	9.625	7.645	79,43%	63,54%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023 sebesar 84,13% dari target 100%. 4 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target dari 100% dan masih 10 jenis Mutu Pelayanan Dasar yang belum mencapai 100%.

Tabel 103. Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Angka partisipasi kasar	6.707,00	4.081,00	60,85%	
2	Angka partisipasi sekolah	6.707,00	4.081,00	60,85%	
3	Angka partisipasi murni	6.707,00	4.081,00	60,85%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
4	Kemampuan literasi	49,23	43,86	89,09%	
5	Kemampuan numerasi	36,32	32,18	88,60%	
6	Perbedaan Skor Literasi	1,15	1,15	100,00%	
7	Perbedaan Skor Numerasi	0,74	0,74	100,00%	
8	Indeks iklim keamanan	76,78	62,24	81,06%	
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	57,48	57,48	100,00%	
10	Kecukupan formasi guru ASN	-	-	-	
11	Indeks distribusi guru	-	-	-	
12	Proporsi PTK bersertifikat	-	-	-	
13	Proporsi PTK penggerak	-	-	-	
14	Pengalaman pelatihan guru	261,00	261,00	100,00%	
Rata-Rata				84,13%	16,83%

4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan sebesar Rp. 1.114.457.034.790,00 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara pada APBD Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 104. Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	64.733.332.036	130.724.107.582	127.053.528.146	97%
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.700.000.000	1.875.000.000	1.752.220.000	93%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.453.614.300	4.985.974.300	4.793.899.780	96%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.148.712.200	1.378.712.200	1.157.398.000	84%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	139.879.300	139.879.300	139.879.300	100%
	Pengadaan Mebel PAUD	10.448.200.236	28.907.924.342	28.907.924.342	100%
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	2.193.600.000	39.616.211.440	39.616.211.440	100%
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	23.077.876.000	23.098.956.000	23.098.956.000	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.450.000.000	3.650.000.000	2.605.008.225	71%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.630.000.000	6.930.000.000	6.719.222.819	97%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	450.000.000	1.100.000.000	614.000.000	56%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	18.641.450.000	18.641.450.000	17.248.808.240	93%
Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	281.417.245.729	492.960.675.479	465.257.936.154	94%
	Penambahan Ruang Kelas Baru	21.845.000.000	21.845.000.000	19.032.707.824	87%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.782.670.250	3.782.670.250	3.167.458.496	84%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4.296.895.058	4.296.895.058	4.268.235.150	99%
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	7.410.599.934	7.610.599.934	6.199.820.223	81%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.073.866.000	13.638.866.000	12.572.670.127	92%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.380.000.000	13.680.000.000	9.862.352.896	72%
	Pengadaan Mebel Sekolah	35.568.571.040	59.738.066.140	54.989.124.200	92%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	20.604.800.000	120.476.024.900	118.894.649.000	99%
	Pengadaan Perlengkapan Siswa		3.000.000.000	-	0%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	950.000.000	950.000.000	950.000.000	100%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	40.277.473.447	104.772.195.197	99.495.096.352	95%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	950.000.000	5.950.000.000	3.601.428.038	61%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	240.000.000	240.000.000	169.892.000	71%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.405.000.000	4.783.000.000	4.577.726.000	96%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	250.000.000	1.071.988.000	971.988.000	91%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	128.382.370.000	127.125.370.000	126.504.787.848	100%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	154.600.808.100	450.884.678.269	430.585.459.050	95%
	Pembangunan Unit Sekolah BarU (USB)	6.967.670.100	6.967.670.100	6.456.159.500	93%
	Penambahan Ruang Kelas Baru	495.000.000	495.000.000	467.374.400	94%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.202.493.000	3.202.493.000	3.186.701.600	100%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4.174.599.150	4.374.599.150	4.311.084.780	99%
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	830.600.250	1.030.600.250	1.029.519.270	100%
	Pembangunan Laboratorium	14.978.077.200	14.978.077.200	14.542.184.020	97%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.208.130.360	7.808.130.360	7.567.118.000	97%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	950.000.000	12.950.000.000	12.502.186.130	97%
	Pengadaan Mebel Sekolah	11.367.680.000	35.252.163.500	34.328.888.270	97%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	25.090.815.040	53.556.549.756	51.890.546.000	97%
	Pengadaan Perlengkapan Siswa		1.800.000.000	-	0%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	975.000.000	975.000.000	927.000.000	95%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8.495.573.000	234.179.224.953	221.667.629.600	95%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.520.000.000	4.640.000.000	4.170.936.000	90%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000	1.480.000.000	342.961.480	23%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	67.195.170.000	67.195.170.000	67.195.170.000	100%
Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.814.861.460	39.887.573.460	25.538.161.903	64%
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	100%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	675.000.000	675.000.000	675.000.000	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	750.000.000	750.000.000	750.000.000	100%
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100%
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.000.000	75.000.000	-	0%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.200.000.000	1.200.000.000	83.448.000	7%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	9.505.000.000	27.417.712.000	14.511.455.600	53%
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	550.000.000	550.000.000	473.368.000	86%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	237.491.460	2.397.491.460	2.397.491.460	100%
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.572.370.000	4.572.370.000	4.397.398.843	96%
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan		520.566.247.325	1.114.457.034.790	1.048.435.085.253	94%

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai

Kartanegara didukung dengan sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105. Jumlah Personil Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
1	Eselon	
	a. II.b / Kepala Dinas	1
	b. III.a / Sekretaris	1
	c. III.b / Administrator	5
	d. IV.a / Pengawas / Fungsional	10
2	Jabatan Fungsional	
	a. Guru PNS (TK, SD dan SMP)	5.139
	b. Guru PPPK (TK, SD dan SMP)	604
	c. Pengawas (TK, SD dan SMP)	60
	d. Kepala Sekolah	1.076
	e. Penilik	9
	f. Pamong Belajar	0
	g. Fungsional Umum (staf)	
	- Dinas Kabupaten	
	- Sekolah (TU/Penjaga)	1.270
	- SKB	11
3	Pangkat/Golongan Satuan Pendidikan	
	a. IV	1.684
	b. III	3.051
	c. II	454
	d. I	20
	e. IX	-
4	Jenjang Pendudukan	
	a. S3	-
	b. S2	252
	c. S1/DIV	9.157
	d. D/III	88
	e. SMA sederajat	1.6363
	f. SMP Sederajat	55
	g. SD Sederajat	49

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata	Diperlukan Pendataan berbasis Desa/Kelurahan yang terintegrasi ke dalam Sistem Pendataan Secara Nasional
2	Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1. Pengumpulan data belum optimal karena data Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat 2. Belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah 3. Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapodik secara berkala	1. Perlu peningkatan koordinasi dengan kemenag untuk ketersediaan data yang valid dan akurat 2. Perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan 3. Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, namun hanya sebatas jenjang SD dan SMP negeri dan swasta karena terbatasnya anggaran.
3	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia	Penghitungan kebutuhan disesuaikan realisasi jumlah siswa yang ada sehingga terdapat selisih antara perencanaan dan realisasi
4	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	Belum ada SOP di Tingkat Kabupaten tentang pelaksanaan penerapan SPM	Koordinasi dengan Bagian Organisasi untuk penyusunan regulasi dan SOP penerapan SPM

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Urusan Kesehatan, bahwa SPM Urusan Kesehatan meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci penetapan target Pencapaian SPM pada Penerima Layanan dan Mutu Layanan dengan Anggaran Penunjang Capaian SPM pada tabel berikut.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: P-724/DINKES/SDK-DIK/400.8.5.4/1/2023 tentang Penetapan Data Sasaran Program Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, telah menetapkan target sasaran SPM Tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 106. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100%	2.641.226.000
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan		13.942	
		Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1394	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Tablet Tambah Darah	1254763	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	13942	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	13942	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	13942	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2091	
		Kartu ibu/rekam medis ibu	13942	
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13942	
		Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	36	
		Tenaga kesehatan : Bidan	32	
		Tenaga kesehatan : Perawat	32	
		Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	13942	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		100%	1.313.420.000
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan kesehatan		12.801	
		Formulir Partograf	12801	
		Kartu ibu (rekam medis)	12801	
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12801	
		Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis	36	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Kebidanan dan Kandungan		
		Tenaga kesehatan : Bidan	32	
		Tenaga kesehatan : Perawat	32	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		100%	256.250.000
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		12.674	
		Vaksin Hepatitis BO	12674	
		Vitamin K1 Injeksi	12674	
		Salep/Tetes Mata Antibiotik	12674	
		Formulir Bayi Baru Lahir	12674	
		Formulir MTBM	38023	
		Buku KIA	13942	
		Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	39	
		Tenaga kesehatan : Bidan	32	
		Tenaga kesehatan : Perawat	32	
4	Pelayanan Kesehatan Balita		100%	505.000.000
	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		68.254	
		Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	68254	
		Formulir DDTK	273016	
		Buku KIA	1365	
		Vitamin A Biru	7027	
		Vitamin A Merah	47460	
		Vaksin imunisasi dasar: HBO	12879	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Vaksin imunisasi dasar: BCG	12879	
		Vaksin imunisasi dasar: Polio	12879	
		Vaksin imunisasi dasar: IPV	12652	
		Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	12652	
		Vaksin imunisasi dasar: Campak	12652	
		Vaksin imunisasi dasar: Rubella	12652	
		Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	12476	
		Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	12476	
		Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	12476	
		Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	54068	
		Peralatan Anafilaktik	948	
		Tenaga kesehatan : Dokter	32	
		Tenaga kesehatan : Bidan	32	
		Tenaga kesehatan : Perawat	32	
		Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	
		Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	32	
		Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	32	
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		100%	410.000.000
	Jumlah Anak pada Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		141.015	
		Buku Raport Kesehatanku	141015	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Buku Pemantauan Kesehatan	141015	
		Kuesioner Skrining Kesehatan	141015	
		Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	1	
		Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	28203	
		Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	64	
		Tenaga kesehatan : Bidan	32	
		Tenaga kesehatan : Perawat	32	
		Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	
		Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	32	
		Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	32	
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif		100%	1.067.960.160
	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		506.653	
		Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	1	
		Alat ukur berat badan	244	
		Alat : Alat ukur tinggi badan	244	
		Alat : Alat ukur lingkar perut	244	
		Alat : Tensimeter	244	
		Alat : Glukometer	244	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Alat : Tes strip gula darah	510000	
		Alat : Lancet	510000	
		Alat : Kapas alkohol	510000	
		Alat : KIT IVA Tes	116170	
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	
		Tenaga kesehatan : Dokter	32	
		Tenaga kesehatan : Bidan	32	
		Tenaga kesehatan : Perawat	32	
		Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	
		Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	32	
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		100%	410.000.000
	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		53.988	
		Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	107976	
		Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	53988	
		Buku kesehatan lansia	53988	
		Tenaga kesehatan : Dokter	32	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Tenaga kesehatan : Bidan	32	
		Tenaga kesehatan : Perawat	32	
		Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	
		Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	32	
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		100%	525.000.000
	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan		56.849	
		Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	1	
		Tensimeter	32	
		Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	1	
		Tenaga kesehatan : Dokter	32	
		Tenaga kesehatan : Bidan	32	
		Tenaga kesehatan : Perawat	32	
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	
		Obat Hipertensi	56849	
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus		100%	525.000.000
	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan		16.315	
		Alat : Glukometer	244	
		Alat : Strip Tes Gula Darah	17000	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Alat : Kapas Alkohol	17000	
		Alat : Lancet	17000	
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	
		Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	32	
		Tenaga kesehatan : Dokter	32	
		Tenaga kesehatan : Bidan	32	
		Tenaga kesehatan : Perawat	32	
		Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	
		Obat Diabetes Melitus	16315	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		100%	650.000.000
	Jumlah Wargan Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		856	
		Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	32	
		Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	32	
		Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	1	
		Media KIE	32	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Tenaga kesehatan : Dokter	32	
		Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	32	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	32	
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis		100%	1.663.110.000
	Jumlah Warga Negara yang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		9.851	
		Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	244	
		Reagen Zn TB	32	
		Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	15000	
		Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	10000	
		Catridge tes cepat molekuler	10000	
		Formulir pencatatan dan pelaporan	10000	
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	
		Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	45	
		Tenaga kesehatan : Perawat	32	
		Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	32	
		Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	3	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Tenaga kesehatan masyarakat	32	
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	32	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)		100%	858.440.000
	Jumlah Warga Negara dengan Resiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan		17.294	
		Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	244	
		Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	18000	
		Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	18000	
		Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	32	
		Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	46	
		Tenaga kesehatan : Perawat	32	
		Tenaga kesehatan : Bidan	32	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	32	
		Tenaga kesehatan masyarakat	32	
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	32	

4.2.3. Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 107. Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
		Bobot (80%)	Bobot (20%)	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	91,36	93,52	91,79
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	95	97,73	95,92
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	93	95,42	93,59
4	Pelayanan Kesehatan Balita	88	79,92	86,12
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	99	99,67	99,15
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	94	99,66	95,32

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
		Bobot (80%)	Bobot (20%)	
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	90	96,75	91,54
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	100	100	100
Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan				96,12% Tuntas Utama

Berdasarkan 12 jenis pelayanan SPM pada urusan kesehatan Tahun 2023 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan yaitu 96,12% dengan kategori Tuntas Utama. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2023 sebesar 91,36% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 13.942 Ibu Hamil dan 12.737 Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

Tabel 108. Capaian Penerima Layanan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.942	12.737	91,36%	73,09%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2023 sebesar 93,52% dari target 100%. 3 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target dari 100% dan masih 9 jenis Mutu Pelayanan Dasar yang belum mencapai 100%.

Tabel 109. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1394	1274	91,39%	
2	Tablet Tambah Darah	1254763	1146330	91,36%	
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	13942	12737	91,36%	
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	13942	12737	91,36%	
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	13942	12737	91,36%	
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2091	1911	91,39%	
7	Kartu ibu/rekam medis ibu	13942	12737	91,36%	
8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13942	12737	91,36%	
9	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	36	36	100,00%	
10	Tenaga kesehatan : Bidan	32	32	100,00%	
11	Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100,00%	
12	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	13942	12737	91,36%	
Rata-Rata				93,52%	18,70%

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2023 sebesar 95,46% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 12.801 Ibu Bersalin dan 12.220 ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan kesehatan.

Tabel 110. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.801	12.220	95,46%	73,09%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2023 sebesar 97,73% dari target 100%. belum seluruhnya Mutu Pelayanan Dasar yang mencapai target 100% namun rata-rata capaian sudah 93,73%.

Tabel 111. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Vaksin Hepatitis BO	12674	11803	93,13%	
2	Vitamin K1 Injeksi	12674	11803	93,13%	
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	12674	11803	93,13%	
4	Formulir Bayi Baru Lahir	12674	11803	93,13%	
5	Formulir MTBM	38023	35409	93,13%	
6	Buku KIA	13942	12983	93,12%	
Rata-Rata				97,73%	19,55%

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2023 sebesar 93,13% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 12.674 Bayi Baru Lahir dan 11.803 bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 112. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.674	11.803	93,13%	75,50%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2023 sebesar 95,42% dari target 100%. 3 Mutu Pelayanan Dasar mencapai 100% sedangkan 3 Mutu Layanan belum mencapai 100%.

Tabel 113. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Formulir Partograf	12801	12220	95,46%	
2	Kartu ibu (rekam medis)	12801	12220	95,46%	
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12801	12220	95,46%	
4	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	36	36	100,00%	
5	Tenaga kesehatan : Bidan	32	32	100,00%	
6	Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100,00%	
Rata-Rata				97,73%	15,98%

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2023 sebesar 87,66% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 62.114 Balita dan 54.452 Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 114. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Balita

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Balita	62.114	54.452	87,66%	70,13%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2023 sebesar 79,92% dari target 100%. 6 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target 100%, sedangkan 17 Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100.

Tabel 115. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Balita

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	68254	59835	87,67%	
2	Formulir DDTK	273016	239338	87,66%	
3	Buku KIA	1365	1197	87,69%	
4	Vitamin A Biru	7027	4657	66,27%	
5	Vitamin A Merah	47460	31456	66,28%	
6	Vaksin imunisasi dasar: HBO	12879	10524	81,71%	
7	Vaksin imunisasi dasar: BCG	12879	10011	77,73%	
8	Vaksin imunisasi dasar: Polio	12879	9477	73,58%	
9	Vaksin imunisasi dasar: IPV	12652	8874	70,14%	
10	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	12652	9918	78,39%	
11	Vaksin imunisasi dasar: Campak	12652	9537	75,38%	
12	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	12652	9537	75,38%	
13	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	12476	9655	77,39%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
14	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	12476	6261	50,18%	
15	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	12476	6261	50,18%	
16	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	54068	35835	66,28%	
17	Peralatan Anafilaktik	948	628	66,24%	
18	Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	100,00%	
19	Tenaga kesehatan : Bidan	32	32	100,00%	
20	Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100,00%	
21	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	32	100,00%	
22	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	32	32	100,00%	
23	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	32	32	100,00%	
Rata-Rata				79,92%	15,98%

e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Tahun 2023 sebesar 99,01% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 141.015 Jiwa dan 139.625 Anak pada Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 116. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	141.015	139.625	99,01%	79,21%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2023 sebesar 99,67% dari target 100%. 8 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai mencapai target 100%, sedangkan 4 Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100%.

Tabel 117. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Buku Raport Kesehatanku	141015	139625	99,01%	
2	Buku Pemantauan Kesehatan	141015	139625	99,01%	
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	141015	139625	99,01%	
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	1	1	100,00%	
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	28203	27925	99,01%	
6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	64	64	100,00%	
7	Tenaga kesehatan : Bidan	32	32	100,00%	
8	Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100,00%	
9	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	32	100,00%	
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100,00%	
11	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	32	32	100,00%	
12	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	32	32	100,00%	
Rata-Rata				99,67%	19,93%

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Tahun 2023 sebesar 94,24% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran

yang harus dilayani sebanyak 506.653 Jiwa dan 477.454 Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 118. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	506.653	477.454	94,24%	73,39%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Tahun 2023 sebesar 99,66% dari target 100%. 16 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai mencapai target 100%, hanya 1 Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100%.

Tabel 119. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE	1	1	100,00%	
2	Alat ukur berat badan	244	244	100,00%	
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	244	244	100,00%	
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	244	244	100,00%	
5	Alat : Tensimeter	244	244	100,00%	
6	Alat : Glukometer	244	244	100,00%	
7	Alat : Tes strip gula darah	510000	510000	100,00%	
8	Alat : Lancet	510000	510000	100,00%	
9	Alat : Kapas alkohol	510000	510000	100,00%	
10	Alat : KIT IVA Tes	116170	109475	94,24%	
11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	100,00%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
12	Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	100,00%	
13	Tenaga kesehatan : Bidan	32	32	100,00%	
14	Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100,00%	
15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	32	100,00%	
16	Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100,00%	
17	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	32	32	100,00%	
Rata-Rata				99,66%	19,93%

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Tahun 2023 sebesar 94,24% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 53.988 Jiwa dan 48.721 Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 120. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	53.988	48.721	90,24%	72,20%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Tahun 2023 sebesar 99,75% dari target 100%. 6 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai mencapai target 100%, hanya 3 Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100%.

Tabel 121. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	107976	97442	90,24%	
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	53988	48721	90,24%	
3	Buku kesehatan lansia	53988	48721	90,24%	
4	Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	100,00%	
5	Tenaga kesehatan : Bidan	32	32	100,00%	
6	Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100,00%	
7	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	32	100,00%	
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100,00%	
9	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	32	32	100,00%	
Rata-Rata				99,75%	19,35%

h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 56.849 Jiwa dan 56.849 Warga Negara Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 122. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	56.849	56.849	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 123. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	1	1	100,00%	
2	Tensimeter	32	32	100,00%	
3	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	1	1	100,00%	
4	Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	100,00%	
5	Tenaga kesehatan : Bidan	32	32	100,00%	
6	Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100,00%	
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100,00%	
8	Obat Hipertensi	56849	56849	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

i. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 16.315 Jiwa dan 16.315

Warga Negara Penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 124. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus	16.315	16.315	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 125. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Alat : Glukometer	244	244	100,00%	
2	Alat : Strip Tes Gula Darah	17000	17000	100,00%	
3	Alat : Kapas Alkohol	17000	17000	100,00%	
4	Alat : Lancet	17000	17000	100,00%	
5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	100,00%	
6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	32	32	100,00%	
7	Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	100,00%	
8	Tenaga kesehatan : Bidan	32	32	100,00%	
9	Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100,00%	
10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	32	100,00%	
11	Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100,00%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
12	Obat Diabetes Melitus	16315	16315	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

j. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 856 Jiwa dan 856 Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 126. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	856	856	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 127. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa	32	32	100,00%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
	terbaru (bila sudah tersedia)				
2	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	32	32	100,00%	
3	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	1	1	100,00%	
4	Media KIE	32	32	100,00%	
5	Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	100,00%	
6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	32	32	100,00%	
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	32	32	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

k. Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 9851 Jiwa dan 9851 Warga Negara yang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 128. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis	9.851	9.851	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 129. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	244	244	100,00%	
2	Reagen Zn TB	32	32	100,00%	
3	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	15000	15000	100,00%	
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	10000	10000	100,00%	
5	Catridge tes cepat molekuler	10000	10000	100,00%	
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	10000	10000	100,00%	
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	1	100,00%	
8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	45	45	100,00%	
9	Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100,00%	
10	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	32	32	100,00%	
11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	3	3	100,00%	
12	Tenaga kesehatan masyarakat	32	32	100,00%	
13	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	32	32	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

I. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 17.294 Jiwa dan 17.294 Warga Negara dengan Resiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

Tabel 130. Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	17.294	17.294	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 131. Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	244	244	100,00%	
2	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	18000	18000	100,00%	
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	18000	18000	100,00%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	32	32	100,00%	
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	46	46	100,00%	
6	Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100,00%	
7	Tenaga kesehatan : Bidan	32	32	100,00%	
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	32	32	100,00%	
9	Tenaga kesehatan masyarakat	32	32	100,00%	
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	32	32	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

4.2.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132. Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.641.226.000	2.641.226.000	2.152.870.587	82%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.313.420.000	1.313.420.000	812.758.271	62%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	256.250.000	256.250.000	184.375.000	72%
Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	505.000.000	505.000.000	398.358.000	79%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	410.000.000	410.000.000	368.370.742	90%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	800.074.160	1.067.960.160	936.436.084	88%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	410.000.000	410.000.000	338.889.619	83%
Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	525.000.000	525.000.000	513.228.521	98%
Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	525.000.000	525.000.000	501.748.676	96%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	650.000.000	650.000.000	574.621.082	88%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.663.110.000	1.663.110.000	1.633.942.829	98%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	650.000.000	858.440.000	804.537.321	94%
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan		10.349.080.160	10.825.406.160	9.220.136.732	85%

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh berbagai profesi kesehatan maupun non kesehatan, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang terbagi ke dalam 12 SPM yang ada, yaitu

Tabel 133. Jumlah Personil Pendukung Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan										
		Dokter	Perawat	Bidan	Ahli Gizi	Kader Kesehatan	Guru PAUD	Kesmas	Penata Rontgen	ATLM	Nakes lainnya	Nonkes Terlatih
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	39	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelayanan Kesehatan Balita	32	32	32	32	32	32	-	-	-	-	-
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	64	32	32	32	32	32	32	-	-	-	-
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	32	32	32	32	-	-	32	-	-	-	32
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	32	32	32	32	-	-	32	-	-	-	32
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	32	32	32	-	-	-	32	-	-	-	-
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	32	32	32	32	-	-	32	-	-	-	-
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	32	32	-	-	-	-	-	-	-	32	-
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	45	32	-	-	-	-	32	3	32	-	32
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	46	32	32	-	-	-	32	-	32	-	32

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2023 sebesar 91,36%, yang berarti belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan karena:

- Tidak semua jejaring Puskesmas seperti Klinik dan PMB merujuk pasien ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium (pada kasus jejaring tidak memiliki fasilitas laboratorium)
- Ibu hamil melakukan *shopping provider* dan tidak tercatat
- Sistem pencatatan jejaring yang belum maksimal (data tidak terlapor)
- Pencatatan dan pemantauan kohort
- ANC pada umur kehamilan di atas 12 minggu
- Peran serta masyarakat dalam melapor data ibu hamil ke tenaga kesehatan masih belum maksimal

Solusi

- Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital (kohort manual dan aplikasi e-kohort)
- Koordinasi dengan fasilitas kesehatan di sekitarnya dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu hamil sertamengoptimalkan pencatatan dan pelaporan ibu hamil
- Pembinaan jejaring dalam meningkatkan peran aktif dan dukungan dari praktik bidan mandiri dan klinik dalam pelayanan KIA
- Kerjasama lintas sektor dalam strategi konvergensi penurunan AKI dan AKB
- Kader melakukan pendataan Ibu Hamil di wilayahnya masing-masing sesuai dengan sasaran Ibu Hamil di Wilayahnya.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2023 sebesar 95,46%. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh:

- Masih ada persalinan oleh dukun

- Masih ada persalinan oleh tenaga kesehatan di bukan Fasilitas Kesehatan
- P4K belum berjalan optimal di masyarakat
- Distribusi petugas yang belum merata di semua Faskes
- Masalah geografis (banjir, jalan putus dan lain-lain)

Solusi

- Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital (kohort manual dan aplikasi e-kohort)
- Kemitraan Bidan-Dukun
- Menggerakkan masyarakat melalui lintas sektor untuk melahirkan di Fasilitas Kesehatan
- Koordinasi dengan faskes disekitarnya dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu bersalin serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan ibu bersalin
- Meningkatkan peran aktif dan dukungan Praktik Bidan Mandiri / Faskes lainnya dalam pelayanan KIA
- Kader melakukan pendataan ibu bersalin di wilayah masing-masing sesuai dengan sasaran ibu hamil di wilayahnya.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir tahun 2023 sebesar 93,13%. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh:

- Persalinan Dukun
- Tidak semua komponen pelayanan bayi baru lahir terpenuhi
- Bayi risiko tinggi tidak mendapat komponen IMD dan HB0

Solusi

- Meningkatkan persalinan nakes di faskes
- Pembinaan jejaring untuk memberikan asuhan persalinan dan perawatan bayi baru lahir sesuai standar

- *Home visit* petugas untuk memenuhi komponen *neo asensial* yang belum terpenuhi

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan Balita tahun 2023 sebesar 87,66%. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh:

- Banyaknya indikator capaian dalam setiap tahun umur terutama pemantauan pertumbuhan 8 sekali setahun
- Kesadaran orang tua untuk membawa bayi balitanya ke posyandu masih kurang
- Peran UKBM di masyarakat belum optimal (tidak menarik, jadwal berubah, dll)

Solusi

- Integrasi program GIZI-KIA dalam pemantauan tumbuh kembang
- Optimalisasi pencatatan di Kohort manual dan aplikasi e-kohort
- Suport kader melalui lintas sektor dalam meningkatkan pelayanan UKBM
- *Home Visit* balita untuk mengejar capaian SPM

5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2023 sebesar 99,01%, angka ini lebih rendah dari capaian SPM tahun 2022 yang juga sebesar 100%. Maintenance program perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian berada di angka 100%.

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2023 sebesar 94.24%. Capaian ini masih di bawah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan, sehingga pada saat kegiatan skrining

kesehatan sebagian masyarakat masih kurang berminat diperiksa kesehatannya.

- Masih kurangnya jumlah dan kapasitas pengelola program
- Masih belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor

Solusi

- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor (PKK, Dharma Wanita Persatuan, OPD, Kecamatan, Desa) dengan memanfaatkan kegiatan rapat lintas sektor tribulanan di tiap kecamatan
- Meningkatkan jumlah dan kapasitas pengelola program.
- Menerapkan strategi dalam melakukan skrining mobile di setiap kelurahan, instansi pemerintah, tempat ibadah dan tempat umum

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2022 sebesar 90.59%. Hal ini disebabkan karena:

- Masih ada sasaran lansia yang belum pernah kontak petugas
- Dukungan keluarga kurang dalam memfasilitasi lansia untuk mendapatkan pelayanan

Solusi

- Mapping lansia oleh petugas bersama-sama dengan desa/kelurahan
- Melakukan pelayanan skrining lansia per desa/kelurahan
- Integrasi Posyandu Lansia-Posbindu
- Home Visit lansia yang belum mendapatkan pelayanan atau kontak dengan petugas.

8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Permasalahan

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tahun 2023 sebesar 100%. Walaupun capaian tersebut sesuai dari target yang ditetapkan, akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang dapat menghambat tercapainya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar antara lain :

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat penderita hipertensi untuk aktif melakukan pengobatan secara rutin
- Masih kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektor (promosi kesehatan)

Solusi

Meningkatkan kegiatan lintas program dan lintas sektor dengan mengoptimalkan kegiatan promosi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dan pengobatan secara rutin bagi penderita hipertensi

9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus

Permasalahan

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus tahun 2023 sebesar 100%. Walaupun capaian tersebut sesuai dari target yang ditetapkan, akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang dapat menghambat tercapainya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar antara lain :

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat penderita Diabetes Melitus untuk aktif melakukan pengobatan secara rutin.
- Masih kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektor (Promosi Kesehatan).

Solusi

Meningkatkan kegiatan lintas program dan lintas sektor dengan mengoptimalkan kegiatan promosi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dan pengobatan secara rutin bagi penderita Diabetes Melitus

10. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Permasalahan

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tahun 2023 sebesar 100%. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditentukan. Namun ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penderita Gangguan Jiwa Berat antara lain:

- Masih kurangnya kapasitas pengelola program kesehatan Puskesmas
- Masih kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap penderita ODGJ Berat pasca perawatan.
- Belum adanya tenaga psikolog di puskesmas yang bertugas memberikan pendampingan bagi petugas, keluarga, kader dalam penanganan ODGJ.
- Belum terbentuknya Call Center penanganan ODGJ.

Solusi

- Meningkatkan kapasitas Pengelola Program Kesehatan Jiwa
- Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penanganan ODGJ serta meningkatkan edukasi pada keluarga dan masyarakat
- Menambah tenaga psikolog
- Membentuk Call Center Penanganan ODGJ dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)

11. Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) tahun 2023 sebesar 100%. Capaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis terutama bagi kontak erat dengan penderita Tuberkulosis, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian:

- Masih kurangnya kesadaran dari kontak erat penderita Tuberkulosis untuk secara aktif memeriksakan diri atau diperiksa oleh Tenaga Kesehatan.

- Masih kurangnya kemampuan sebagian tenaga kesehatan Pengelola Program TB
- Masih kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam upaya penemuan orang terduga Tuberkulosis
- Masih kurangnya alat Tes Cepat Molekuler (TCM) di Fasilitas Kesehatan.

Solusi

- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan melalui kerjasama lintas program dan sektor
- Meningkatkan kapasitas Pengelola Program TB
- Meningkatkan kegiatan Investigasi Kontak (IK) yang dilakukan oleh Kader Kesehatan
- Menambah jumlah alat Tes Cepat Molekuler (TCM) dan Catridge di Fasilitas Kesehatan

12. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV tahun 2023 sebesar 100%. Capaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian:

- Masih kurangnya kesadaran dari kelompok yang berisiko terinfeksi HIV untuk secara aktif memeriksakan diri atau diperiksa oleh Tenaga Kesehatan
- Masih kurangnya kemampuan sebagian tenaga kesehatan Pengelola Program HIV
- Masih kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam upaya penemuan orang berisiko terinfeksi HIV

Solusi

- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor

- Meningkatkan kapasitas Pengelola Program HIV
- Meningkatkan kegiatan *skrining/mobile VCT* pada kelompok berisiko

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum meliputi:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci penetapan target Pencapaian SPM pada Penerima Layanan dan Mutu Layanan dengan Anggaran Penunjang Capaian SPM pada tabel berikut.

Tabel 134. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		100%	352.312.851.066
	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		195.659	
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	156.527	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)		
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	46.958	
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	39.132	
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	11.740	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		100%	31.124.479.000
	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		195.659	
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	195.659	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		(minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)		
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	146.744	
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	48.915	
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	-	
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	-	

4.3.3. Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 135. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
		Bobot (80%)	Bobot (20%)	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	82,53%	71,47%	80,32%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	69,93%	23,64%	60,78%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum				70,50% Tuntas Pratama

Berdasarkan 2 jenis pelayanan SPM pada urusan pekerjaan umum Tahun 2023 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum yaitu 70,50% dengan kategori Tuntas Pratama. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2023 sebesar 82,53% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 195.659 Rumah

Tangga dan 161.485 Rumah Tangga yang telah memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Tabel 136. Capaian Penerima Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	195.659	161.485	82,53%	66,03%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2023 sebesar 71,47% dari target 100%.

Tabel 137. Capaian Mutu Layanan Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	156.527	140.821	89,97%	
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	46.958	38.442	81,86%	
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	39.132	20.664	52,81%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	11.740	7.191	61,25%	
Rata-Rata				71,47%	14,29%

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2023 sebesar 82,53% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 195.659 Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 138. Capaian Penerima Pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	195.659	136832	69,93%	55,95%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2023 sebesar 71,47% dari target 100%.

Tabel 139. Capaian Mutu Layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air	195.659	136832	69,93%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
	limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)				
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	146.744	979	0,67%	
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	48.915	149	0,30%	
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)				
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan				

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
	kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)				
Rata-Rata				23,64%	4,73%

4.3.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 140. Alokasi Anggaran Penunjang Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	213.065.287.752	352.312.851.066	338.308.064.717	96%
	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	0	4.883.500.000	3.984.095.884	82%
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	93.300.000.000	93.504.024.000	90.388.196.287	97%
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	19.927.954.284	22.777.973.902	22.170.950.002	97%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	57.977.333.468	62.172.970.289	59.971.269.545	96%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	31.560.000.000	60.659.000.000	58.666.143.651	97%
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	0	79.598.944.850	76.038.029.616	96%
	Pembangunan Barn SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.150.000.000	13.973.611.882	12.770.003.907	91%
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.150.000.000	14.742.826.143	14.319.375.825	97%
Penyediaan Pelayanan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	26.200.000.000	31.124.479.000	29.486.508.326	95%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pengolahan Air Limbah Domestik	Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	3.544.479.000	3.387.015.880	96%
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	25.731.250.000	26.981.250.000	25.728.797.246	95%
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	430.000.000	282.080.100	66%
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	168.750.000	168.750.000	88.615.100	53%
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum		239.265.287.752	383.437.330.066	367.794.573.043	96%

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara didukung personil secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 141. Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Personil	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	
	- Kepala Dinas	1
	- Sekretaris	1
	- Kepala Bidang	4
	- Kepala Sub Bagian	3
	- Kepala Seksi	11
	- Fungsional Umum	176
2	Tenaga Harian Lepas	131
	Jumlah	327

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Dalam satu Kecamatan/Kelurahan/Desa terdapat Pekerjaan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum antara Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan
- Belum adanya persamaan standar pelayanan penyediaan pengolahan air limbah domestik

Solusi

- Perlu dilakukan penetapan lokasi Pekerjaan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan secara jelas
- Perlu menempatkan OPD mana yang melaksanakan sosialisasi/edukasi air limbah domestik dengan OPD pengampu

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum meliputi:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Tekena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.4.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci penetapan target Pencapaian SPM pada Penerima Layanan dan Mutu Layanan dengan Anggaran Penunjang Capaian SPM pada tabel berikut:

Tabel 142. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		100%	10.266.929.560
	Jumlah Rumah Tanggaa Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak huni		-	
		Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	-	
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	-	
		Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	-	
		Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	-	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Tekena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	
	Jumlah Rumah Tangga yang terkena relokasi akibat Prgram Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		30	
		Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	-	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Subsidi Uang Sewa	-	
		Penyediaan Rumah Layak Huni	30	

4.4.3. Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 143. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
		Bobot (80%)	Bobot (20%)	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	92,86%	98,57%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Teka Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum				99,29% Tuntas Utama

Berdasarkan 2 jenis pelayanan SPM pada urusan perumahan rakyat Tahun 2023 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan

Perumahan Rakyat yaitu 99,29% dengan kategori Tuntas Utama. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dikarenakan pada Tahun 2022 tidak terjadi bencana daerah yang harus ditetapkan status bencana oleh Kepala Daerah. Namun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyediakan anggaran dalam pencapaian SPM pada layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 144. Capaian Penerima Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%. Dikarenakan pada Tahun 2022 tidak terjadi bencana daerah yang harus ditetapkan status bencana oleh Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tahapan SPM yang meliputi Pendataan, Perhitungan Kebutuhan, dan Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan

Tabel 145. Capaian Mutu Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan	1	1	100%	
Pendataan					
Form 4.a.4	Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			100%	
Form 4.a.5	Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			100%	
Form 4.a.6	Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			100%	
Form 4.a.10	Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah			100%	
Form 4.A.11	Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Di Kabupaten/Kota			100%	
Form 4.A.12	Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)			100%	
Form 4.A.12	Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota			100%	
Perhitungan Kebutuhan					
Form 4.B.3	Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			100%	
Form 4.B.4	Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana Kabupaten/Kota			100%	
Form 4.B.7	Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%	
Form 4.B.8	Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota			100%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
Perencanaan Pemenuhan					
Form 4.C.2	Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota			100%	
Form 4.C.4	Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			100%	
Rata-Rata				100%	20%

- b. Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Tekena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Tekena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/SK-BUP/HK2020 tentang Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Khusus di Desa Muara Pendohon Kecamatan Tabang Tahun Anggaran 2021, Telah ditetapkan 94 Rumah Tangga yang menerima bantuan rumah khusus.

Kecamatan Tabang hampir di 18 Desa terendam banjir tiap tahunnya, salah satunya Desa Muara Pendohon Kecamatan Tabang yang sering mengalami banjir dan abrasi daerah aliran sungai Belayan yang berakibat langsung teganggunya pemukiman penduduk, sosial, budaya dan ekonomi stempat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan relokasi ke wilayah yang lebih layak.

Tabel 146. Capaian Penerima Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Tekena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30	30	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hanya menyediakan Rumah Layak Huni bagi 30 Rumah Tangga.

Tabel 147. Capaian Mutu Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	
2	Subsidi uang sewa	-	-	-	
3	Penyediaan rumah layak huni	30	30	100%	
Rata-Rata				100%	20%

4.4.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 148. Alokasi Penunjang Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota-hari Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Tekena Relokasi Program	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	950.000.000	990.545.000	681.327.767	69%
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	400.000.000	384.552.826	96%
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000	290.545.000	173.222.441	60%
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	200.000.000	100.000.000	-	0%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	250.000.000	0	-	0%
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	100.000.000	100.000.000	39.601.500	40%
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000	100.000.000	83.951.000	84%
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	75.872.100	76%
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	100.000.000	100.000.000	75.872.100	76%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.926.384.560	9.176.384.560	8.826.833.895	96%
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000	200.000.000	179.791.000	90%
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	150.000.000	900.000.000	759.307.800	84%
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.300.000.000	7.800.000.000	7.627.399.235	98%
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	276.384.560	276.384.560	260.335.860	94%
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum		6.976.384.560	10.266.929.560	9.584.033.762	93%

4.4.5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara didukung personil secara rinci dalam tabel berikut

Tabel 149. Dukungan Personil Penujang Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Personil	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	

No	Personil	Jumlah
	- Kepala Dinas	1
	- Sekretaris	1
	- Kepala Bidang	4
	- Kepala Sub Bagian	3
	- Kepala Seksi	11
	- Fungsional Umum	176
2	Tenaga Harian Lepas	131
	Jumlah	327

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Bencana Daerah yang terjadi tidak sampai di tetapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Bencana Daerah
- Penetapan lokasi yang ditetapkan Kepala Daerah diambil oleh warga

Solusi

- Perlu dilakukan peninjauan ulang persyaratan penetapan lokasi
- Dilakukan pemasangan pagar pembatas sesuai penetapan lokasi yang ditetapkan Kepala Daerah

4.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.5.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dibagi 3 Sub Urusan yaitu: Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Bencana Daerah, Urusan Kebakaran Daerah.

Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121

Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab. / Kota, bahwa SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sub Urusan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota, bahwa SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Bencana Daerah meliputi:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Urusan Kebakaran Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota, bahwa SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran meliputi Pelayanan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci penetapan target Pencapaian SPM pada Penerima Layanan dan Mutu Layanan dengan Anggaran Penunjang Capaian SPM pada tabel berikut:

Tabel 150. Target Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	352.312.851.066
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota		-	
		Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	576	
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6	
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	2.990	
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda	1	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan		
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	-	
Sub Urusan Bencana Daerah				
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		100%	31.124.479.000
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		782.634	
		Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	569.485	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	6.154	
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	146	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		782.634	
		Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	407	
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	405	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3.802	
		Aktivasi sistem komando penanganan	2	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)		
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	3.802	
		Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	-	
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	144	
Sub Urusan Kebakaran				
1	Pelayanan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100%	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		999	
		Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan	94	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)		
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	3	
		Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	30	
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	230	
		Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	980	
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	19	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)		

4.5.3. Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 151. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
		Bobot (80%)	Bobot (20%)	
Sub Urusan Ketenterman dan Ketertiban Umum				100%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
Sub Urusan Bencana Daerah				75,81%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	72,77%	100%	78,21%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	36,53%	100%	49,22%

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
		Bobot (80%)	Bobot (20%)	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%
Sub Urusan Kebakaran Daerah				95,16%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	96,30%	90,61%	95,16%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum				90,32% Tuntas Utama

Berdasarkan 3 Sub Urusan dan 5 jenis pelayanan SPM pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2023 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yaitu 99,32% dengan kategori Tuntas Utama. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dikarenakan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 tidak ada warga negara yang terdampak dari penegakan Perda dan Perkada. Namun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyediakan anggaran dalam pencapaian SPM pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 152. Capaian Penerima Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%. Tahun 2022 dan Tahun 2023 tidak ada warga negara yang terdampak dari penegakan Perda dan Perkada. Namun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyediakan anggaran dalam pencapaian SPM pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 153. Capaian Mutu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	576	576	100	
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6	6	100	
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	2.990	2.990	100	
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan	1	1	100	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
	hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)				
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-		
	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	-	-		
Rata-Rata				100%	20%

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2023 sebesar 72,77% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 782.634 warga negara dan 569.485 Warga Negara yang telah memperoleh informasi rawan bencana.

Tabel 154. Capaian Penerima Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	782.634	569.485	72,77%	58,21%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 155. Capaian Mutu Layanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

.No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	1	1	100,00%	
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	569.485	569.485	100,00%	
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	6.154	6.154	100,00%	
	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	146	146	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2023 sebesar 36,53% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 782.634 warga negara dan 285.900 Warga

Negara yang telah memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Tabel 156. Capaian Penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	782.634	285.900	36,53%	58,21%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 157. Capaian Mutu Penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

.No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	407	407	100,00%	
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	405	405	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Capaian Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 3.802 warga negara dan 3.802 Warga Negara yang

terdampak dari bencana yang terjadi di Tahun 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 158. Capaian Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.802	3.802	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 159. Capaian Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

.No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	2	2	100,00%	
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	3802	3802	100,00%	
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	2	100,00%	
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara	-	-	-	

.No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
	cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)				
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	144	144	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
 Capaian Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 999 warga negara dan 962 Warga Negara yang dilayani dalam waktu *respons time* tidak melebihi 15 menit.

Tabel 160. Capaian Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	999	963	96,30%	77,04%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 161. Capaian Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

.No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman,	94	86	91,49%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
	Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)				
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	3	3	100,00%	
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	30	30	100,00%	
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	230	120	52,17%	
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	980	980	100,00%	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	19	19	100,00%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
	(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)				
Rata-Rata				90,61%	20%

4.5.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku pengampu SPM sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku pengampu SPM sub urusan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selaku OPD pengampu SPM sub urusan kebakaran daerah pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 162. Alokasi Anggaran Penunjang Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.293.703.500	11.983.713.700	10.031.819.553	83,7%
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	325.698.000	325.698.000	315.192.000	96,8%
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	50.000.000	0	0,0%
	Koordinasi Penyelenggaraan	17.478.000	17.478.000	17.478.000	100,0%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	420.527.500	11.060.537.700	9.230.351.494	83,5%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	370.000.000	520.000.000	468.798.059	90,2%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000	0	0	0,0%
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	10.000.000	10.000.000	0	0,0%
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	170.000.000	170.000.000	24.917.280	14,7%
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	170.000.000	170.000.000	24.917.280	14,7%
Total Sub Urusan Trantibum		1.463.703.500	12.153.713.700	10.056.736.833	82,7%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.000.000.000	2.215.000.000	446.076.380	20,1%
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1.000.000.000	2.215.000.000	446.076.380	20,1%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.449.895.550	1.749.895.550	1.398.224.409	79,9%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	900.000.000	900.000.000	699.899.995	77,8%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	149.999.750	149.999.750	149.305.600	99,5%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	149.895.800	149.895.800	146.130.215	97,5%
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		150.000.000	129.458.955	86,3%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		150.000.000	104.820.524	69,9%
	Penyusunan Rencana Kontijensi	250.000.000	250.000.000	168.609.120	67,4%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.413.336.280	11.523.973.514	11.077.674.548	96,1%
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	250.000.000	231.770.298	92,7%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	525.000.000	386.971.374	381.073.165	98,5%
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	150.000.000	264.980.000	258.371.820	97,5%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	600.729.000	9.061.290.000	8.833.815.976	97,5%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	137.607.280	1.303.564.280	1.120.225.289	85,9%
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penyelamatan Non Kebakaran Penyelamatan Non Kebakaran	0	257.167.860	252.418.000	98,2%
	Total Sub Urusan Bencana	3.449.895.550	5.564.895.550	3.203.751.999	57,6%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.413.336.280	11.523.973.514	11.077.674.548	96,1%
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	250.000.000	231.770.298	92,7%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	525.000.000	386.971.374	381.073.165	98,5%
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	150.000.000	264.980.000	258.371.820	97,5%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	600.729.000	9.061.290.000	8.833.815.976	97,5%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	137.607.280	1.303.564.280	1.120.225.289	85,9%
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penyelamatan Non Kebakaran Penyelamatan Non Kebakaran	0	257.167.860	252.418.000	98,2%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.564.205.000	1.567.533.416	1.314.754.110	83,9%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		194.485.000	150.106.950	77,2%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	324.205.000	324.205.000	232.009.160	71,6%
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	1.240.000.000	1.048.843.416	932.638.000	88,9%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	0	14.645.000	3.030.000	20,7%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	0	14.645.000	3.030.000	20,7%
Total Sub Urusan Kebakaran		2.977.541.280	13.106.151.930	12.395.458.658	94,6%
Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibum		7.891.140.330	30.824.761.180	25.655.947.490	83,2%

4.5.5. Dukungan Personil

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara diampu 3 OPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja pengampu SPM Sub Urusan Trantibum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengampu SPM Sub Urusan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pengampu SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah.

Tabel 163. Personil Pendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum

No	Uraian	Jumlah Personil
1	ASN	136
2	BANPOL PP	270
Jumlah		496

Sumber daya manusia yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada unsur pelaksana terdiri dari Pejabat Struktural (Eselon IIB, IIIA, IIIB dan IVA) dan Pejabat Non Struktural (Fungsional Umum dan Teknis), seperti yang ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel 164. Personil Pendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah

No	Pangkat	Gol	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	
2	Pembina Tingkat 1	IV/b	1	
3	Pembina	IV/a	6	
4	Penata Tingkat 1	III/d	9	
5	Penata	III/c	1	
6	Penata Muda Tingkat 1	III/b	3	
7	Penata Muda	III/a	8	
8	Pengatur Tingkat 1	II/d	21	
9	Pengatur	II/c	1	
Jumlah			51	

Tabel 165. Jumlah Petugas Operasional telah Mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran dan Bencana

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	SAR MFR dan Water Rescue	6	
2	Jungle Rescue	11	
3	HART dan MFR	8	
4	Scuba Diving and Sea Survival	2	
5	Water Rescue Lanjutan	-	
6	Personil Damkar Tingkat Dasar	-	

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
7	Personil Damkar Tingkat Lanjutan	-	
8	Basic Water Rescue	10	

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai penunjang pencapaian SPM Urusan Kabakaran Daerah Tahun 2023 sebanyak 276 orang dengan jenis kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 166. Dukungan Personil Penunjang SPM Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	Eselon	
	a. II.b	1
	b. III.a	3
	c. III.b	27
	d. IV.a	52
2	Jabatan Fungsional	
	a. Analis Kebakaran Ahli Madya	1
	b. Analais Kebakaran Ahli Pertama	24
	c. Pemadam Kebakaran Terampil	47
	d. Fungsional Pelaksana	2
3	Tenaga Harian Lepas (Honoror)	198
4	Diklat Keterampilan Pemadam I	120

4.5.6. Permalahan dan Solusi

a. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Secara umum, pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan akibat penegakan tersebut. Akan tetapi bukan berarti selama melakukan penegakan Perda dan Perkada tidak terdapat kendala. Beberapa permasalahan diantaranya adalah

- 1) Jumlah penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada Tahun 2023 ini capaian satpol PP ada 1.484 pelanggaran Perda dan Perkada yang dipantau dan diselesaikan, artinya Satpol PP berhasil menyelesaikan semua laporan Perda dan Perkada yang diterima, akan tetapi pencapaian tersebut belum menggambarkan tingkat pencapaian secara keseluruhan Kabupaten Kutai Kartanegara, etapi hanya berdasarkan data dari Seksi Penyelidikan dan Penindakan, dan Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum SATPOL Kabupaten, hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia (petugas) terutama di tingkat kecamatan kurang memadai, seperti ada beberapa kecamatan yang kepala seksi Ketentraman dan Ketertibannya tidak memiliki staf, atau hanya memiliki tidak lebih dari 4 staf. Juga diketahui hanya beberapa kecamatan yang memiliki staf PNS, sedangkan sisanya hanya tenaga honorer, serta tingkat pendidikan dari anggota Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang hanya setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau lebih rendah dari itu. Hal-hal tersebut menyebabkan penegakan peraturan daerah tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga untuk kedepannya, perlu dilakukan beberapa hal seperti mengadakan bimbingan teknis tentang penegakan perda di tingkat kecamatan, sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal ke kecamatan, sehingga baik Camat maupun Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban lebih memahami tentang pentingnya pencapaian SPM
- 2) Jumlah patroli siaga ketentraman dan ketertiban, pada tahun 2023, SATPOL PP telah melakukan 1440 kali patroli, akan tetapi, ada catatan penting yang harus diperhatikan, yaitu, dari data yang diperoleh, jumlah kelompok patroli tidak tersebar merata di setiap kecamatan, melainkan hanya terpusat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, sedangkan kecamatan tidak memiliki kelompok patroli, hal ini dikarenakan kecamatan sangat kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana terutama kendaraan patroli baik kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga tidak

mampu untuk memenuhi kebutuhan patroli setiap harinya, oleh karena itu, solusi yang harus diambil adalah penambahan personil Seksi Ketentraman dan Ketertiban sehingga jumlah yang ada cukup untuk melakukan patroli minimal 2 kali dalam satu hari, dan juga perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang patroli.

- 3) Program/kegiatan terkait pemenuhan terhadap pelayanan ketentraman dan ketertiban. Sebagai pengemban amanat SPM, maka SATPOL PP telah menterjemahkan amanat tersebut ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021 - 2026. Permasalahan yang ada adalah minimnya ketersediaan anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan prioritas yang terkait dengan pemenuhan SPM yang dapat dilaksanakan secara maksimal.

b. Sub Urusan Bencana Daerah

Beberapa isu dan permasalahan / hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Pemetaan terhadap lokasi atau daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana belum lengkap. 2. Belum adanya data dan indentifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana. 3. Terbatasnya sumber daya petugas sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana. 4. Terbatas sumber daya petugas pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana. 5. Belum terdatanya indentifikasi warga yang	1. Meningkatkan mutu dan standar dokumen kajian risiko bencana 2. Melakukan pendataan Indentifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di Kawasan Rawan Bencana 3. Diklat, Bimtek bagi Petugas sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana. 4. Menyusun standarisasi penyebaran informasi rawan bencana

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
		berpotensi menjadi korban bencana	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana bagi warga negara di Kawasan Rawan Bencana 2. Terbatasnya Kapasitas Personil/Sumber Daya Manusia (SDM) petugas dan Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana	1. Meningkatkan Kuantitas Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB. 2. Menyelenggarakan Latihan (Gladi) Kesiapsiagaan 3. Menyediakan Supras PUSDALOPS Penanggulangan Bencana yang memadai 4. Melaksanakan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 5. Menyediakan sarana dan prasarana sistem peringatan dini (EWS) Bencana 6. Meningkatkan jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana 7. Membentuk dan Mengoptimalkan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana 8. Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi sesuai Kajian Risiko Bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Belum optimalnya pelaksanaan dan penentuan status tanggap darurat 2. Belum optimalnya penerapan sistem komando operasi darurat 3. Masih rendahnya kapasitas petugas Tim Kaji Cepat ke lokasi Bencana secara cepat dan tepat 4. Belum adanya Rencana Kontijensi yang dapat dijadikan Rencana operasi penanggulangan bencana 5. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum mencukupi mengingat luas wilayah 6. Terhambatnya peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia yang disebabkan oleh sebagian besar personil pencarian, pertolongan dan evakuasi berstatus sebagai tenaga THL sehingga kesulitan untuk mengikuti pendidikan dan latihan 7. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan	1. Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status tanggap darurat 2. Mengoptimalkan penerapan sistem komando operasi darurat 3. Meningkatkan kapasitas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat 4. Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan 5. Menerapkan sistem penyimpanan yang terpadu pada pergudangan logistik PB

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
		kapasitas personil/sumber daya manusia 8. Luas wilayah dan masih ada wilayah yang mengalami Blank spot sehingga informasi ketika terjadinya bencana tidak diterima dengan cepat 9. Masih kurangnya partisipasi serta kesadaran baik dari Tingkat RT, Desa/Kelurahan bahkan Kecamatan memberikan Laporan Kejadian Bencana	

c. Sub Urusan Kebakaran

Kendala dan Permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran, baik internal maupun eksternal, Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Sub Urusan Kebakaran belum mendapat prioritas dari APBD dalam pembiayaan SPM 2. Ketersediaan Pos Sektor Pemadam Kebakaran yang belum sesuai dengan amanat pada Permendagri 122 Tahun 2018 3. Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana & prasarana pemadam kebakaran dan sarana & Prasarana Penyelamatan 4. Sumber daya aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baik secara Kualitas maupun kuantitas masih terbatas 5. Belum setiap kelurahan/desa memiliki relawan pemadam kebakaran dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta meningkatkan ketahanan masyarakat dalam	1. Mendorong dan mengawal prioritas APBD untuk pemenuhan pembiayaan APBD 2. Pemenuhan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan sarana dan prasarana penyelamatan di setiap kecamatan 3. Pendataan dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan sarana dan prasarana penyelamatan 4. Meningkatkan jumlah dan standar kualifikasi sumber daya aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara 5. Membentuk dan membina relawan pemadam kebakaran di setiap kelurahan/desa dengan jumlah minimal 2 orang dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran 6. Membuka akses konektivitas daerah

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
		menghadapi bahaya kebakaran 6. Kondisi geografis yang menyulitkan penjangkauan layanan ke daerah terpencil 7. Pengumpulan data korban kebakaran secara <i>by name by address</i> sulit dilakukan karena dokumen kependudukan ada ikut terbakar	terpencil sehingga layanan pemadam kebakaran dapat menjangkau daerah tersebut 7. Mengidentifikasi penerima layanan SPM Sub Urusan Kebakaran terkait dokumen kependudukan secara <i>by name by address</i> dengan melibatkan peran kecamatan, kelurahan/desa secara berjenjang dan terpadu, sehingga data kependudukan yang diperlukan dalam pengumpulan data korban kebakaran bisa didapatkan

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa SPM Bidang Sosial meliputi:

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial;
2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
4. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan

5. Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota.

4.6.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci penetapan target Pencapaian SPM pada Penerima Layanan dan Mutu Layanan dengan Anggaran Penunjang Capaian SPM pada tabel berikut:

Tabel 167. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		100%	10.266.929.560
	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		2.932	
		Layanan Data dan Pengaduan	1	
		Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	
		Penyediaan Permakanan	2.932	
		Penyediaan Sandang	80	
		Penyediaan Alat bantu	230	
		Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	80	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	80	
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	13	
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	45	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	46	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	46	
		Layanan Rujukan	7	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial		100%	
	Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		347	
		Layanan Data dan Pengaduan	1	
		Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	1	
		Penyediaan permakanan	151	
		Penyediaan sandang	16	
		Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	52	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	52	
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	3	
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	347	
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	
		Layanan Rujukan	3	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial		100%	
	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		11.909	
		Layanan Data dan Pengaduan	1	
		Penyediaan Layanan Kedaruratan	1	
		Penyediaan Permakanan	11.909	
		Penyediaan Sandang	6	
		Penyediaan Alat bantu	52	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	6	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	6	
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	2	
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	610	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	2	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2	
		Layanan Rujukan	7	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		100%	
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		-	
		Layanan Data dan Pengaduan	-	
		Penyediaan Layanan Kedaruratan	-	
		Penyediaan Permakanan	-	
		Penyediaan Sandang	-	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	-	
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	-	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	
		Layanan Rujukan	-	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota		100%	
	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota		1.553	
		Penyediaan Permakanan	1.553	
		Penyediaan Sandang	1553	
		Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		

No	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Target	Anggaran
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	-	
		Pelayanan Dukungan Psikososial		

4.6.3. Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 168. Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
		Bobot (80%)	Bobot (20%)	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	100%	100%	20%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	100%	100%	20%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	100%	100%	20%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%	20%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan	100%	100%	20%

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
		Bobot (80%)	Bobot (20%)	
	Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota			
Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial				100% Tuntas Paripurna

Berdasarkan 5 jenis pelayanan SPM pada urusan sosial Tahun 2023 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan sosial Tahun 2023 yaitu 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial

Capaian Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 2.932 Warga Negara dan 2.932 Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.

Tabel 169. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	2.932	2.932	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 170. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial

.No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
	Layanan Data dan Pengaduan	1	1	100,00%	
	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	2	100,00%	
	Penyediaan Permakanan	2.932	2.932	100,00%	
	Penyediaan Sandang	80	80	100,00%	
	Penyediaan Alat bantu	230	230	100,00%	
	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2	2	100,00%	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	80	80	100,00%	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	80	80	100,00%	
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	13	13	100,00%	
	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	45	45	100,00%	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	46	46	100,00%	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	46	46	100,00%	
	Layanan Rujukan	7	7	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial

Capaian Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dengan

Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 347 Warga Negara dan 347 Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.

Tabel 171. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	347	347	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 172. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial

.No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
	Layanan Data dan Pengaduan	1	1	100,00%	
	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	1	1	100,00%	
	Penyediaan permakanan	151	151	100,00%	
	Penyediaan sandang	16	16	100,00%	
	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100,00%	
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	52	52	100,00%	
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	52	52	100,00%	
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu	3	3	100,00%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
	Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan				
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	347	347	100,00%	
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100,00%	
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100,00%	
	Layanan Rujukan	3	3	100,00%	
Rata-Rata				100%	20%

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial

Capaian Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 11.909 Warga Negara dan 11.909 Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.

Tabel 173. Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	11.909	11.909	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 174. Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial

.No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Layanan Data dan Pengaduan	1	1	100,00%	
2	Penyediaan Layanan Kedaruratan	1	1	100,00%	
3	Penyediaan Permakanan	11.909	11.909	100,00%	
4	Penyediaan Sandang	6	6	100,00%	
5	Penyediaan Alat bantu	52	52	100,00%	
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1	1	100,00%	
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	6	6	100,00%	
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	6	6	100,00%	
9	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	2	2	100,00%	
10	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	610	610	100,00%	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	2	2	100,00%	
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2	2	100,00%	
13	Layanan Rujukan	7	7		
Rata-Rata				100%	20%

- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

Capaian Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, pada Tahun 2023 tidak terdapat gelandangan dan pengemis yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota

Capaian Pelayanan Dasar pada Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 175. Capaian Penerima Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (80%)
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah	1.553	1.553	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel 176. Capaian Mutu Layanan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah

.No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
1	Penyediaan Permakanan	1.553	1.553	100,00%	
2	Penyediaan Sandang	1553	1553	100,00%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%	IP SPM (20%)
3	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	-	-		
5	Pelayanan Dukungan Psikososial		-		
Rata-Rata				100%	20%

4.6.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 177. Alokasi Anggaran Penunjang Urusan Sosial

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	7.217.600.000	5.987.600.000	5.389.594.941	90%
	Penyediaan Permakanan	5.767.600.000	4.070.333.000	3.931.525.800	97%
	Penyediaan Sandang	150.000.000	150.000.000	127.054.000	85%
	Penyediaan Alat Bantu	950.000.000	1.020.000.000	897.186.937	88%
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	150.000.000	300.000.000	233.970.156	78%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000	347.267.000	127.592.000	37%
	Pemberian Layanan Rujukan	100.000.000	100.000.000	72.266.048	72%

Jenis Layanan	Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	425.000.000	1.051.000.000	942.943.831	90%
	Penyediaan Makanan	300.000.000	623.000.000	590.658.401	95%
	Penyediaan Sandang	125.000.000	428.000.000	352.285.430	82%
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial		7.642.600.000	7.038.600.000	6.332.538.772	90%

4.6.5. Dukungan Personil

Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:

6. Tenaga Kesejahteraan Sosial; yaitu seseorang yang didik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di Lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial
7. Pekerja Sosial; yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi
8. Penyuluh Sosial; yaitu seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Relawan Sosial; yaitu Relawan Sosial; yaitu seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di

instansi sosial pemeritah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Selanjutnya pada Pasal 40 Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tersebut diatur bahwa setiap personil penyelenggara kesejahteraan sosial tersebut harus tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai jenis SDM nya. Gambaran umum SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Tabel 178. Dukungan Personil Penunjang SPM Urusan Sosial

No	Jenis SDM	Status SDM	Jumlah	Keterangan
1	Pekerja Sosial	PNS	2 orang	Pejabat Struktural
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial	Non PNS	93 orang	Pendamping Sosial dari Kemensos
3	Penyuluh Sosial	PNS	6 orang	Penyetaraan dari pejabat struktural eselon IV, dengan pangkat penyuluh sosial ahli muda
4	Penyuluh Sosial	Non PNS	30 orang	Rekrutmen dari Dinsos Provinsi
5	Relawan Sosial	Non PNS	48 orang	Tersebar di 20 Kecamatan

Data tersebut menunjukkan bahwa di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara belum tersedia SDM Pekerja Sosial yang seharusnya memegang peran sentral dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang sosial. Idealnya untuk setiap jenis pelayanan dasar diampu oleh 1 orang Pekerja Sosial, Mengacu pada ketentuan tersebut maka ketersediaan personal penyelenggara kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah kekurangan. Sebagai contoh bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 237 Desa/Kelurahan, sehingga setidaknya dibutuhkan minimal 237 relawan sosial. Setiap Puskesmas Desa/Kelurahan minimal memiliki 1 orang Relawan Sosial.

Penyuluh Sosial Fungsional yang ada di Dinas Sosial jumlahnya juga kurang jika dibandingkan dengan jumlah Kecamatan apalagi Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika setiap kecamatan didampingi oleh 1 orang Penyuluh Sosial maka dibutuhkan setidaknya 20 orang Penyuluh Sosial Fungsional Ahli Muda. Keberadaan Penyuluh Sosial yang direkrut dan dibina oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur saat ini juga banyak yang sudah mengundurkan diri karena mendapat pekerjaan ditempat lain yang lebih menjanjikan dari sisi ekonomi.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial;

Permasalahan

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi dengan disabilitas terutama sahabat tuli
- b. Kurangnya SDM yang memahami tentang klasifikasi ragam disabilitas dan pendekatan masing-masing sesuai kebutuhan spesifiknya
- c. Kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk memberikan layanan shelter terutama bagi disabilitas menyal yang tidak terurus
- d. Kurangnya kepedulian keluarga dengan disabilitas mental dalam bekerjasama untuk proses rehabilitasi sosial pasca medis.

Solusi

- a. Menjalinkan komunikasi dan kerjasama dengan komunitas sahabat tuli untuk belajar bahasa isyarat
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan UPT Loka Bina Karya sebagai shelter bagi disabilitas dan orang terlantar
- c. Pendekatan dan edukasi ke masyarakat dan keluarga yang memiliki anggota keluarga mengalami gangguan jiwa

2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
Permasalahan

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam memberikan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar.
- b. Kurangnya SDM yang memahami tentang kebutuhan spesifik anak berkenaan dengan tugas perkembangannya.
- c. Terbatasnya wewenang Kabupaten dalam memberikan pelayanan sosial bagi anak terlantar yang membutuhkan lembaga pengganti fungsi keluarga.

Solusi

- a. Pelayanan yang diberikan terbatas pada kebutuhan yang diungkap saja dan belum menyentuh kebutuhan spesifik tugas perkembangan anak
- b. Mencoba mengoptimalkan fungsi keluarga pengganti di sekitar tempat tinggal anak

3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;

Permasalahan

- a. Kecenderungan adanya ketidak pedulian keluarga dalam mengurus lanjut usia terutama yang dalam kondisi miskin
- b. Kurangnya SDM penyelenggara kesejahteraan sosial untuk menangani kasus lanjut usia yang ada di masyarakat
- c. Terbatasnya wewenang Kabupaten dalam memberikan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia terlantar yang membutuhkan pelayanan dalam lembaga.

Solusi

- a. Koordinasi dengan PSTW Nirwana Puri Samarinda untuk merujuk lanjut usia
- b. Sosialisasi melalui puskesmas desa / kelurahan

4. Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota.

Permasalahan

- a. Kurangnya sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersertifikasi untuk memberikan layanan dukungan psikososial pada saat dan setelah masa tanggap darurat.

Solusi

- a. Optimalisasi peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam proses perlindungan dan jaminan bagi korban bencana.

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama satu tahun, disusun guna memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi penunjang pemerintahan daerah.

LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 memuat Capaian Kinerja pada Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan. Selain hal tersebut juga dilaporkan Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sesuai dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2023 diselenggarakan dengan tema ***“Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar, Konektifitas dan Pengembangan SDM”***.

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 mencapai kinerja sangat baik, namun demikian disadari bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal.

Penetapan arah kebijakan bukan lagi mengejar peringkat akan tetapi lebih fokus kepada proses, pelaksanaan dan hasil dari setiap urusan pemerintah sehingga dapat diambil langkah menetapkan kebijakan urusan pemerintah

yang dianggap kurang baik dapat ditingkatkan serta yang sudah berjalan dengan baik agar tetap dipertahankan.

Beberapa penghargaan yang diperoleh Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023, merupakan bentuk pengakuan atas kinerja baik yang telah dilaksanakan bersama sebagai hasil kerjasama dan dukungan semua pihak yaitu jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara serta masyarakat.

Pemerintah Kabupaten telah mencoba memenuhi komitmen bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa akan datang dalam mewujudkan Kutai Kartanegara IDAMAN 2021-2026.

Demikian buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini kami susun, besar harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.



Kabupaten Kutai Kartanegara